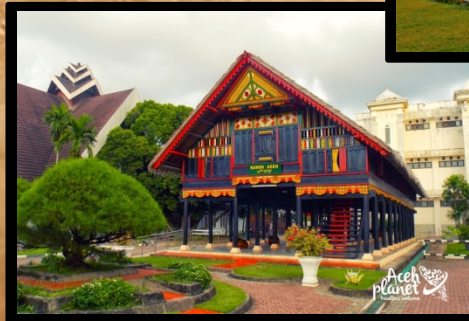




Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Aceh Tahun 2016



Pemerintah Aceh Tahun 2017

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhaNya, Pemerintah Aceh telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016, sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja Pemerintah Aceh merupakan media pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.

Secara substantif Laporan Kinerja Pemerintah merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui pengukuran dan analisis setiap indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2016 menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara normatif telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, dalam penyajian ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan laporan ini.

Demikian, kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi kinerja Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Terima kasih.

Banda Aceh,, Maret 2017

GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan yang menyajikan informasi kinerja dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2016 telah menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara normatif telah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2016 berisikan analisis terhadap hasil pengukuran kinerja dari 15 sasaran strategis dan 70 indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pertama					
<i>Meningkatnya Implementasi UUPA dalam Percepatan Pembangunan dan Menjaga Keberlanjutan Perdamaian</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Jumlah Qanun Aceh yang ditetapkan	15 Qanun	13 Qanun	86,67	Baik
2	Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan	75 Pergub	147 Pergub	196,00	Sangat Baik
3	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	80%	80%	100,00	Baik
Rata-rata tingkat capaian				127,56	Sangat Baik

Sasaran Strategis Kedua					
<i>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Government</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Perolehan Opini hasil Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100,00	Baik
2	Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh*	60,5	58,25*	96,28	Baik
3	Nilai/skor LPPD Pemerintah Aceh*	2,35	2,34	99,57	Baik
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik :				
	a. RSUZA	95	99,30	104,53	Sangat Baik
	b. RSIA	79,6	75,75	95,16	Baik
	c. RSJ	76,5	69,00	90,20	Baik
	d. BP2T	86	83,56	97,16	Baik
5	Persentase penurunan temuan kerugian daerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa*	0,2%	0,08%	40,00	Kurang
6	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan	5%	6,05%	121,00	Sangat Baik
7	Persentase informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi pada website Pemerintah Aceh	96%	96%	100,00	Baik
Rata-rata tingkat capaian				94,39	Baik

Sasaran Strategis Ketiga					
<i>Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Penurunan pelanggaran Qanun Syariat, dan Gangguan Trantibum	4%	3%	75,00	Cukup
2	Jumlah Fatwa, Himbauan, Seruan dan Taushiah yang ditetapkan*	7 dokumen	7 dokumen	100,00	Baik
3	Jumlah sertifikasi produk halal*	30 sertifikat	60 sertifikat	200,00	Sangat Baik
4	Jumlah Qari/Qariah, Hafidh/Hafidhah, Mufassir/Mufassirah yang berprestasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	10 orang	12 orang	120,00	Sangat Baik
5	Jumlah Dayah Berakreditasi	471 dayah	1.015 dayah	215,50	Sangat Baik
6	Jumlah Penerimaan Infaq/sadaqah*	28,45 M	22,45 M	78,91	Baik
7	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Aceh	30%	25,46%	84,87	Baik
Rata-rata tingkat capaian				124,90	Sangat Baik

Sasaran Strategis Keempat					
<i>Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada semua sektor dan peningkatan investasi</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Pertumbuhan PDRB	6,9%	3,31%	47,97	Kurang
2	Laju inflasi Aceh	5%	3,86 %	122,80	Sangat Baik
3	Ekspor non migas	US \$ 100 juta	US \$ 68,7 juta	68,70	Cukup
4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	3,041 T	4,973 T	163,53	Sangat Baik
5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1 : 160	1 : 74	46,25	Kurang
Rata-rata tingkat capaian				89,85	Baik

Sasaran Strategis Kelima					
<i>Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh (PAA)</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Kontribusi Pajak Aceh terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA)*	60%	61,65%	102,75	Sangat Baik
2	Persentase Kontribusi Zakat terhadap PAA	1,5%	1,77%	118,00	Sangat Baik
3	Persentase Kontribusi PAA terhadap APBA	15%	16,77%	111,80	Sangat Baik
Rata-rata tingkat capaian				110,85	Sangat Baik

Sasaran Strategis Keenam					
<i>Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka Aceh dan Angka Kemiskinan dengan Perbaikan Pendapatan dan Pemberdayaan Kemandirian melalui Perluasan Lapangan Usaha</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Persentase angka pengangguran terbuka*	6,8%	7,57%	88,68	Baik
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,83%	64,26%	89,46	Baik
3	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	11,5%	16,43%	57,13	Cukup
4	Persentase Penanganan PMKS	60%	36,69%	61,15	Cukup
5	Persentase Koperasi Aktif	57,79%	67,33 %	116,51	Sangat Baik
6	Jumlah Penyaluran Kredit untuk UMKM	22,66 T	11,34 T	50,04	Kurang
Rata-rata tingkat capaian				77,16	Baik

Sasaran Strategis Ketujuh					
Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Pendidikan pada tahun 2015.					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Angka partisipasi murni: *				
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,60%	95,55%	96,91	Baik
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80,50%	82,21%	102,12	Sangat Baik
2	c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/ Paket C	74,50%	67,22%	90,23	Baik
	Angka pendidikan yang ditamatkan*				
	a. Tamat SD/ sederajat	21%	20,85%	99,29	Baik
3	b. Tamat SMP/ sederajat	17%	24,29%	142,88	Sangat Baik
	c. SMA/ sederajat	32%	35,52%	111,00	Sangat Baik
3	Angka melek huruf dewasa *	97,8%	97,63%	99,83	Baik
Rata-rata tingkat capaian				106,04	Sangat Baik

Sasaran Strategis Kedelapan					
Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Angka rata-rata lama sekolah	11,5 Tahun	13,37 Tahun	116,26	Sangat Baik
2	Angka Partisipasi Kasar :				
	a. SD/MI/Paket A	105%	105,77%	99,27	Baik
	b. SMP/MTS/Paket B	100%	103,39%	96,61	Baik
3	c. SMA/MA/Paket C	91%	86,19%	94,71	Baik
	Angka Putus Sekolah :				
	a. SD/MI	4%	5%	75,00	Cukup
4	b. SMP/MTs	12%	12%	100,00	Baik
	c. SMA/SMK/MA	0,10%	0,37%	370,00	Sangat Baik
4	Angka Kelulusan* :				
	a. SD/MI	96%	99%	99,00	Baik
	b. SMP/MTs	96%	98%	102,08	Sangat Baik
	c. SMA/SMK/MA	97%	99%	102,06	Baik
Rata-rata tingkat capaian				125,91	Sangat Baik

Sasaran Strategis Kesembilan					
Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015.					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Umur harapan hidup	71,6 tahun	69,9 tahun	97,63	Baik
2	Angka kematian ibu melahirkan*	100/100.000 LH	144/100.000 LH	56,00	Cukup
3	Angka kematian bayi*	12/1000 LH	10/1000 LH	116,67	Sangat Baik
4	Angka kematian anak balita*	25/1000 LH	10/1000 LH	160,00	Sangat Baik
5	Prevalensi gizi kurang dan buruk	14%	16,2%	84,29	Baik
Rata-rata tingkat capaian				102,92	Sangat Baik

Sasaran Strategis Kesepuluh					
<i>Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Angka kesuksesan pengobatan TB	93%	86%	92,47	Baik
2	Cakupan prevalensi penyakit kusta <1	1/10.000	0,99/10.000	101,00	Sangat Baik
3	Cakupan kabupaten/kota yang memasuki tahap eliminasi malaria*	23 Kab/Kota	16 Kab/Kota	69,57	Cukup
4	Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan JKMA	1,76 juta jiwa	1,97 juta jiwa	111,93	Sangat Baik
5	Prevalensi ODMK	2%	6,6%	30,30	Kurang
Rata-rata tingkat capaian				81,05	Baik

Sasaran Strategis Kesebelas					
<i>Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik *	61,52%	61,15%	99,40	Baik
2	Rasio Jaringan Irigasi*	69,74%	72,67%	104,20	Sangat Baik
3	Persentase penurunan lingkungan pemukiman kumuh	4,5%	4,57	101,56	Sangat Baik
4	Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum /tahun	50%	39%	78,00	Baik
Rata-rata tingkat capaian				95,79	Baik

Sasaran Strategis Keduabelas					
<i>Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkualitas</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Penanganan Sampah	70%	70%	100,00	Baik
2	Pemantauan Pencemaran Status Mutu Air	65%	104%	160,00	Sangat Baik
3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	540 Ha	642,01 Ha	118,89	Sangat Baik
4	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	90%	19,57%	21,74	Kurang
5	Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi bencana	90%	91%	101,11	Sangat Baik
Rata-rata tingkat capaian				100,35	Sangat Baik

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



Sasaran Strategis Ketigabelas					
<i>Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Aceh</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Skor Pola Pangan Harapan	88,9	70,9	79,75	Baik
2	Penanganan desa Rawan Pangan	200 desa	50 desa	25,00	Kurang
3	Nilai Tukar Nelayan	110,10	97,79	88,82	Baik
4	Nilai Tukar Petani	115 %	98,85%	85,96	Baik
Rata-rata tingkat capaian				69,88	Cukup

Sasaran Strategis Keempat belas					
<i>Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Produksi Padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun* :				
	a. Padi	2.550.000 ton	2.321.328 ton	91,03	Baik
	b. Jagung	250.000 ton	286.730 ton	114,69	Sangat Baik
	c. Kedelai	70.000 ton	23.506 ton	33,58	Kurang
2	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura :				
	a. Bawang Merah	6.781 ton	6.288,9 ton	92,74	Baik
	b. Kentang	81.598 ton	50.674,3 ton	62,10	Cukup
	c. Cabe Besar	52.012 ton	41.031,3 ton	78,89	Baik
	d. Cabe Rawit	54.124 ton	41.595,1 ton	76,85	Baik
3	Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah :				
	a. Karet Kering	390.099 ton	72.710 ton	18,64	Kurang
	b. Kelapa Sawit	1.021.603 ton	505.844 ton	49,51	Kurang
	c. Kakao Biji Kering	209.425 ton	43.912 ton	20,97	Kurang
4	Produksi Daging per tahun *	32.348.218 kg	36.386.393 kg	112,48	Sangat Baik
5	Produksi telur pertahun	17.453.966 kg	15.192.018 kg	87,04	Baik
6	Jumlah Produksi perikanan*	335.224 ton	265.039,7 ton	79,06	Baik
Rata-rata tingkat Capaian				70,58	Cukup

Sasaran Strategis Ketigabelas					
<i>Meningkatnya eksplorasi sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan</i>					
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Persentase penurunan pertambangan tanpa ijin	24%	4,29%	17,88	Kurang
2	Rumah tangga pengguna air bersih	75,65%	74,09%	97,94	Baik
3	Rumah tangga pengguna listrik	94,50%	109,21%	115,57	Sangat Baik
Rata-rata tingkat Capaian				77,13	Cukup

Berdasarkan hasil pengukuran **70** indikator kinerja dan dari **15** Sasaran Strategis, rata-rata tingkat capaian diperoleh sebesar **96,95%** dengan kategori **Baik**. Sedangkan tingkat capaian akuntabilitas keuangan dengan alokasi anggaran yang direncanakan untuk pencapaian strategis sebesar **Rp 6.775.132.114.290,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp 6.091.148.844.056,93** maka tingkat capaian realisasi keuangan sebesar **89,90%**.

Persentase rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar **96,95%** dibandingkan dengan persentase rata-rata tingkat capaian akuntabilitas keuangan sebesar **89,90%**, maka terjadi efisiensi capaian kinerja sebesar **7,05%**, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Selain menyajikan pencapaian kinerja dan keuangan, laporan Kinerja ini juga menyajikan penghargaan yang diterima Pemerintah Aceh selama tahun 2016, yaitu ;

1. Peringkat Tiga Nasional kategori laju pencapaian MDGs 2016
2. Museum Rekor Indonesia (MURI) rekor jumlah penari terbanyak tarian Aceh (Ratoeh Jaroe) 2016
3. Penghargaan atas Kepeduliaan dan Pengabdian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia
4. Anugerah Pariwisata Halal Terbaik 2016 nominasi Airport Ramah Wisatawan Muslim Terbaik: Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda
5. Anugerah Pariwisata Halal Terbaik 2016 nominasi Destinasi Budaya Ramah Wisatawan Muslim Terbaik
6. Anugerah Pariwisata Halal Terbaik 2016 nominasi Daya Tarik Wisata Terbaik: Masjid Baiturrahman, Banda Aceh

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



7. Penghargaan Ombudsman Republik Indonesia atas Peran Aktif mewujudkan Pelayanan Publik Prima Tahun 2015 dengan Zona hijau kategori Kepatuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Sektor Perizinan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Piagam Penghargaan terbaik V Kategori perencanaan Kepegawaian Pemerintah Propinsi
9. Predikat sebagai terbaik pertama pada ajang Anugerah Media Humas atau AMH 2016, kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Daerah	2
C. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	3
1. Kelembagaan	3
2. Sumberdaya Aparatur	6
D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan	9
1. RPJMA Tahun 2012-2017	10
2. Indikator Kinerja Utama.....	19
3. Rencana kerja Pemerintah Aceh (RKPA)	21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja	27
B. Capaian Kinerja Pemerintah Aceh.....	29
C. Akuntabilitas Keuangan	205
BAB IV PENUTUP	209
LAMPIRAN 1 PENGUKURAN KINERJA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh	4
Tabel 1.2 Jumlah jabatan struktural menurut jenjang eselonering di lingkungan Pemerintah Aceh	6
Tabel 1.3 Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan jenis kelamin	6
Tabel 1.4 Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan	7
Tabel 2.1 Matrik Hubungan antara Misi, Tujuan, dan Indikator Tujuan	13
Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis	17
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh	21
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2016.....	24
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama	30
Tabel 3.2 Jumlah Peraturan Turunan UUPA yang ditetapkan.	34
Tabel 3.3 Perkembangan Jumlah Ormas, LSM, Lembaga Lainnya Tahun 2012-2016.....	35
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua.....	36
Tabel 3.5 Perolehan Hasil pemeriksaan BPK Tahun 2012-2016	38
Tabel 3.6 Perkembangan Perolehan Nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh.....	39
Tabel 3.7 Nilai Peringkat LPPD Pemerintah Aceh.....	42
Tabel 3.8 Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan publik Tahun 2012-2016	45
Tabel 3.9 Perkembangan Temuan Kerugian Daerah dibandingkan dengan Anggaran yang diperiksa	46
Tabel 3.10 Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan	48
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga	50
Tabel 3.12 Perkembangan Jumlah Kasus Pelanggaran Qanun Syariat Islam dan Gangguan Trantibum di Aceh	52
Tabel 3.13 Jumlah Fatwa, Keputusan, Hibauan, Tausiah yang Ditetapkan Sesuai Ketentuan Syariat Islam....	54
Tabel 3.14 Perkembangan jumlah Fatwa, Hibauan, Seruan Dan Tausiah yang ditetapkan	55
Tabel 3.15 Daftar Sertifikat Halal Yang ditetapkan MPU Aceh Tahun 2016	55
Tabel 3.16 Perkembangan Jumlah Sertifikat Produk Halal.....	57
Tabel 3.17 Khafilah Provinsi Aceh yang berhasil menjadi juara pada MTQ Nasional ke-26	59

Tabel 3.18	Jumlah Qari/Qariah, Hafidz/Hafidzah, Mufassir/Mufassirah yang berprestasi pada STQ dan MTQ Nasional/Internasional	60
Tabel 3.19	Persebaran Dayah di Aceh berdasarkan Akreditasi Tahun 2016	61
Tabel 3.20	Jumlah Penerimaan Infaq/Sadaqah.....	63
Tabel 3.21	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Aceh periode 2012-2016	65
Tabel 3.22	Perkembangan Objek Daya Tarik Wisata yang dikembangkan Pemerintah Aceh tahun 2014-2016.....	67
Tabel 3.23	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat	68
Tabel 3.24	Pertumbuhan PDRB tahun 2012-2016	75
Tabel 3.25	Laju Inflasi Aceh tahun 2012-2016.....	76
Tabel 3.26	Nilai Ekspor Non Migas di Aceh tahun 2012-2016 ..	77
Tabel 3.27	Jumlah Serapan Tenaga Kerja pada Sektor Penanaman Modal periode 2012-2016	83
Tabel 3.28	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kelima	84
Tabel 3.29	Kontribusi pajak Aceh terhadap Pendapatan Asli Aceh tahun 2012-2016	85
Tabel 3.30	Jumlah Penerimaan Zakat di Aceh Periode 202-2016	87
Tabel 3.31	Kontribusi Zakat Terhadap Pendapatan Asli Aceh tahun 2012-2016.....	88
Tabel 3.32	Perkembangan Kontribusi PAA Terhadap APBA Tahun 2012-2016	90
Tabel 3.33	Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Keenam.....	92
Tabel 3.34	Persentase Angka Pengangguran Terbuka.....	94
Tabel 3.35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2012-2016	98
Tabel 3.36	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Aceh Menurut Daerah Periode 2014-2016.....	99
Tabel 3.37	Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM di Aceh Periode 2014-2016	105
Tabel 3.38	Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Ketujuh.....	106
Tabel 3.39	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Aceh Tahun 2012-2016	109
Tabel 3.40	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2012-2016	110
Tabel 3.41	Angka Melek Huruf Dewasa di Aceh Tahun 2012-2016	111
Tabel 3.42	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan ..	113
Tabel 3.43	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	114
Tabel 3.44	Perkembangan Angka Partisipasi kasar Pada Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016.....	116

Tabel 3.45	Perkembangan Angka Putus Sekolah di Aceh Tahun 2012-2016	117
Tabel 3.46	Angka Kelulusan Tahun 2012-2016.....	118
Tabel 3.47	Pengukuran Sasaran Strategis Kesembilan	119
Tabel 3.48	Perkembangan Umur Harapan Hidup Penduduk Aceh Tahun 2012-2016	120
Tabel 3.49	Angka Kematian Ibu Melahirkan.....	123
Tabel 3.50	Rasio Angka Kematian Bayi di Aceh tahun 2012-2016	125
Tabel 3.51	Angka Kematian Anak Balita 2012-2016	127
Tabel 3.52	Jumlah Tenaga Dokter Umum dan Spesialis Pada Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2014-2016.....	128
Tabel 3.53	Kasus Gizi Buruk Balita Kab/Kota di Aceh tahun 2012-2016	129
Tabel 3.54	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh ..	130
Tabel 3.55	Perkembangan Angka Kesuksesan Pengobatan TB di Aceh 2013-2016.....	131
Tabel 3.56	Cakupan Prevalensi Kusta Berdasarkan Kab/Kota di Aceh Tahun 2014-2016.....	132
Tabel 3.57	Cakupan Prevalensi Penyakit Kusta <1	133
Tabel 3.58	Cakupan Kab/Kota yang Memasuki Tahapan Eliminasi Malaria tahun 2012-2016	134
Tabel 3.59	Perkembangan Jumlah Penduduk Yang Mendapat Pelayanan JKMA dari Tahun 2013-2016.....	135
Tabel 3.60	Jumlah Pasien Jiwa Mandiri di Kab/Kota Tahun 2016	137
Tabel 3.61	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas ...	138
Tabel 3.62	Target Sasaran Jangka Menengah dan Realisasi Kinerja dari Indikator Proporsi Panjang Jalan Provinsi.....	141
Tabel 3.63	Target SPM dan Realisasi kinerja Proporsi Panjang Jalan Provinsi dalam Keadaan Baik	142
Tabel 3.64	Tren Peningkatan Rasio Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2012-2016	144
Tabel 3.65	Persentase Penurunan Lingkungan Pemukiman Kumuh di Aceh Periode 2013-2016.....	146
Tabel 3.66	Jumlah Pesawat dan Penumpang Pada Bandar Udara di Provinsi Aceh Tahun 2016.....	148
Tabel 3.67	Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Laut pada Beberapa Pelabuhan di Provinsi Aceh Tahun 2016	150
Tabel 3.68	Pengukuran Sasaran Strategis Keduabelas	153
Tabel 3.69	Perkembangan Pencemaran Status Mutu Air di Aceh Tahun 2014-2016	156

Tabel 3.70	Luas Lahan Kritis Aceh	157
Tabel 3.71	Perkembangan Cakupan Pelaksanaan Terhadap AMDAL di Aceh Tahun 2013-2016	159
Tabel 3.72	Perkembangan Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah Dalam Menghadapi Bencana.....	161
Tabel 3.73	Sasaran Strategis Ketigabelas	173
Tabel 3.74	Tingkat Konsumsi Pola Pangan Harapan Aceh Tahun 2013-2016	163
Tabel 3.75	Perkembangan Nilai tukar Nelayan (NTN) di Aceh ...	165
Tabel 3.76	NTN Provinsi Aceh Menurut Subsektor Perikanan selama Tahun 2016	167
Tabel 3.77	Nilai Tukar Petani Berdasarkan Subsektor	172
Tabel 3.78	Nilai Tukar Petani (NTP)	173
Tabel 3.79	Sasaran Strategis Keempatbelas	173
Tabel 3.80	Perbandingan Luas Lahan, Hasil Per Hektar, dan Produksi jagung di Aceh Tahun 2014-2016	178
Tabel 3.81	Perbandingan Luas Lahan, Hasil Per Hektar, dan Produksi Kedelai di Aceh Tahun 2014-2016.....	181
Tabel 3.82	Perkembangan Produksi Empat Komoditi Holtikultura Tahun 2014-2016	185
Tabel 3.83	Peningkatan Produksi Tiga Komoditi Perkebunan Unggulan di Aceh Tahun 2012-2016.....	187
Tabel 3.84	Perkembangan Populasi Ternak Ruminansia Tahun 2015-2016	190
Tabel 3.85	Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Aceh tahun 2015-2016.....	190
Tabel 3.86	Analisa Capaian Perkembangan Populasi Ternak di Aceh Tahun 2014-2016.....	192
Tabel 3.87	Perkembangan Produksi telur di Aceh Tahun 2014-2016	194
Tabel 3.88	Volume Produksi Perikanan di Aceh Tahun 2012-2016	196
Tabel 3.89	Capaian Produksi Perikanan Menurut Jenis tahun 2014-2016.....	196
Tabel 3.90	Produksi Perikanan tangkap di Aceh Tahun 2016	198
Tabel 3.91	Jumlah Produksi Perikanan dibandingkan dengan target jangka menengah aceh	198
Tabel 3.92	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelimabelas	199
Tabel 3.93	Luas Wilayah Pertambangan Tanpa Izin	201
Tabel 3.94	Perkembangan Luasan Aktivitas PETI di Aceh Tahun 2015-2016	203

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



Tabel 3.95	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Aceh Tahun 2012-2016.....	205
Tabel 3.96	Realisasi Anggaran dan Pendapatan dan Pembiayaan Aceh Tahun Anggaran 2016	206
Tabel 3.97	Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2016	207
Tabel 3.98	Jumlah dan Realisasi APBA (dalam Kurun Waktu 2012-2016)	208

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1	Perkembangan Jumlah Turunan UUPA yang ditetapkan Tahun 2012-2016 34
Grafik 3.2	Perkembangan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh 40
Grafik 3.3	Hasil Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2016 41
Grafik 3.4	Nilai IKM BP2T Periode 2012-2016 45
Grafik 3.5	Jumlah Penerimaan Infaq/Sadaqah tahun 2012-2016 63
Grafik 3.6	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Aceh Tahun 2012-2016 66
Grafik 3.7	Pertumbuhan Kumulatif beberapa lapangan usaha tahun 2016 c-to-c 70
Grafik 3.8	Pertumbuhan PDRB c-to-c dan distribusi PDRB menurut pengeluaran 72
Grafik 3.9	Pertumbuhan PDRB y-on-y menurut pengeluaran 73
Grafik 3.10	Pertumbuhan PDRB c-to-c se-Sumatera 74
Grafik 3.11	Distribusi PDRB se-Sumatera tahun 2016 75
Grafik 3.12	Perkembangan Laju Inflasi Aceh tahun 2012-2016 76
Grafik 3.13	Perkembangan Nilai Ekspor non Migas Aceh periode 2012-2016 78
Grafik 3.14	Perkembangan Realisasi Investasi di Aceh tahun 2010-2016 dibandingkan dengan target RPJMA tahun 2012-2017 81
Grafik 3.15	Kontribusi setiap komponen terhadap PAA tahun 2016 86
Grafik 3.16	Jumlah Penerimaan Zakat di Aceh Periode 2012-2016 88
Grafik 3.17	Persentase Kontribusi PAA Terhadap APBA Tahun 2012-2016 90
Grafik 3.18	Kontribusi PAA Terhadap APBA 91
Grafik 3.19	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Pendidikan 94
Grafik 3.20	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Aceh Menurut Daerah Periode 2014-2016 100
Grafik 3.21	Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif 104
Grafik 3.22	Umur Harapan Hidup Masyarakat Aceh Tahun 2012-2016 121
Grafik 3.23	Angka Kematian ibu Melahirkan 123
Grafik 3.24	Angka Kematian Bayi di Aceh Tahun 2012-2016 .. 123

Grafik 3.25	Perkembangan Target, realisasi, dan capaian kinerja Proporsi Panjang Jalan Provinsi Tahun 2013-2016	140
Grafik 3.26	Tren Peningkatan Rasio Jaringan Irigasi di Aceh Tahun 2012-2016.....	145
Grafik 3.27	Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Aceh Tahun 2016.....	152
Grafik 3.28	Luas Lahan Kritis Aceh	157
Grafik 3.29	Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2012-2016	172
Grafik 3.30	Perkembangan Produksi Padi tahun 2012-2016 ...	176
Grafik 3.31	Perkembangan Produktivitas Padi Tahun 2012-2016	176
Grafik 3.32	Perkembangan Produksi Jagung dan Kedelai di Aceh Tahun 2012-2016.....	182
Grafik 3.33	Perkembangan Produktivitas Jagung dan Kedelai di Aceh Tahun 2012-2016.....	184
Grafik 3.34	Perkembangan Produksi Komoditi Holtikultura di Aceh Tahun 2014-2016.....	186
Grafik 3.35	Peningkatan Produksi Tiga Komoditi Perkebunan Unggulan di Aceh Tahun 2012-2016.....	188
Grafik 3.36	Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2014-2016	193
Grafik 3.37	Perkembangan Produksi telur di Aceh Tahun 2016.....	195
Grafik 3.38	Perkembangan Persentase Penurunan Pertambangan Tanpa Izin Tahun 2013-2016	202

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Berita Acara Penyerahan Laporan Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2015	37
Gambar 3.2 Santri Peraih juara dalam MTQ Nasional	58
Gambar 3.3 Hari Peringatan 11 Tahun MoU Helsinki	65
Gambar 3.4 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran Provinsi Aceh, 2015-2016	96
Gambar 3.5 Perkembangan TPT dan TPAK Provinsi Aceh 2015-2016	97
Gambar 3.6 Jumlah Penumpang Angkutan Udara Bandara Sultan Iskandar Muda Provinsi Aceh, Desember 2016.....	149
Gambar 3.7 Kondisi gempa Bumi yang Melanda Kabupaten Pidie Jaya Pada Penghujung 2016.....	160
Gambar 3.8 Fluktuasi NTN Aceh selama Tahun 2016.....	166
Gambar 3.9 Perbandingan Rata-Rata NTN Provinsi Se-Sumatra dan Nasional tahun 2016	168
Gambar 3.10 Gambar Aktivitas PETI di Wilayah Aceh	201

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Gubernur menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pemerintah Aceh telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2016 sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasararan sebagaimana telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2016 telah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017, Rencana

Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2016, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2016.

B. Kondisi Daerah

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01°58'37,2"- 06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"- 98°17'13,2" Bujur Timur. Batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia



Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Aceh

Aceh memiliki luas wilayah darat 5.867.366 km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 km² dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif pada tahun 2016, Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, 289 Kecamatan, 784 Mukim dan 6.498 Gampong/Desa dengan jumlah penduduk 5.096.248 jiwa.

C. Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur

1. Kelembagaan

Sebagai daerah otonomi khusus, Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangannya terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang terdiri dari 8 Sekretariat, 22 Dinas dan 18 Lembaga Teknis Daerah yang pembentukannya ditetapkan dalam Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh, yaitu :

- 1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007;
- 2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012;
- 3) Qanun Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

- 4) Qanun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- 5) Qanun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
- 6) Qanun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali;
- 7) Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh; dan
- 8) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh.

Adapun nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh, secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh

No.	Satuan Kerja Perangkat Aceh
I	Sekretariat terdiri dari :
	1 Sekretariat Daerah Aceh
	2 Sekretariat DPRA
	3 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	4 Sekretariat Majelis Adat Aceh
	5 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	6 Sekretariat Baitul Mal Aceh
	7 Sekretariat DPP KORPRI Aceh
	8 Sekretariat Wali Nanggroe/Keurukon Katibul Wali
II	Dinas terdiri dari :
	1 Dinas Syariat Islam
	2 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
	3 Dinas Kesehatan
	4 Dinas Pertambangan dan Energi

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



No.	Satuan Kerja Perangkat Aceh
	5 Dinas Kelautan dan Perikanan
	6 Dinas Sosial
	7 Dinas Keuangan Aceh
	8 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh
	9 Dinas Pendidikan
	10 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	11 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
	12 Dinas Kehutanan
	13 Dinas Perkebunan
	14 Dinas Pengairan
	15 Dinas Bina Marga
	16 Dinas Cipta Karya
	17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	18 Dinas Koperasi dan UKM
	19 Dinas Pemuda dan Olahraga
	20 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	21 Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
	22 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
III	Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
	1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	3 Badan Arsip dan Perpustakaan
	4 Badan Pemberdayaan Masyarakat
	5 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	6 Badan Investasi dan Promosi
	7 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	8 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
	9 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
	10 Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
	11 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	12 Badan Penanggulangan Bencana Aceh
	13 Inspektorat Aceh
	14 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
	15 Rumah Sakit Jiwa
	16 Rumah Sakit Ibu dan Anak
	17 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
	18 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta

Sumber : Biro Organisasi Setda Aceh, Desember 2016

Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Aceh, secara hirarki terdiri dari 1.264 Jabatan Struktural dengan jenjang eselonering tertera dalam tabel 1.2. berikut ini :

Tabel 1.2
Jumlah jabatan struktural menurut jenjang eselonering di lingkungan Pemerintah Aceh

No.	Eselon	Jumlah
1	I	1
2	II	63
3	III	344
4	IV	856
Jumlah		1.264

Sumber : BKPP Aceh, Desember 2016

2. Sumber Daya Aparatur

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Pemerintah Aceh kondisi pada 31 Desember 2016 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 9.075 orang dengan komposisi menurut Golongan, Jenis Kelamin sebagaimana tertera pada tabel 1.3. di bawah ini :

Tabel 1.3.
Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan jenis kelamin

No	GOL.	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		Laki-laki	Perempuan		
1	IV	808	417	1.225	13,50
2	III	3.310	2.755	6.065	66,83
3	II	1.267	438	1.705	18,79
4	I	74	6	80	0,88
JUMLAH		5.459	3.616	9.075	100,00

Sumber : BKPP Aceh, Desember 2016

Sedangkan menurut kualifikasi tingkat pendidikan masih didominasi strata-1 sebanyak 6.065 orang atau 66,83% dari jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dalam tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah PNS	Persentase
1	S3	26	0,29
2	S2	1.258	13,87
3	S1	4.303	47,44
4	D4	176	1,94
5	D3	895	9,87
6	D2	10	0,11
7	D1	31	0,34
8	SLTA	2.181	24,05
9	SLTP	128	1,41
10	SD/MI	62	0,68
JUMLAH		9.075	100,00

Sumber :BKPP Aceh, Desember 2016

D. Pemasalahan Utama (*Strategic Isued*)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2013, maka konsistensi dan sinkronisasi terhadap kebijakan pembangunan tahunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2016 untuk menjadi :

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja SKPA) Tahun 2016
- b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh dalam menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun 2016.
- c. Pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 termasuk didalamnya Kebijakan Umum (KU) APBA dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBA Tahun anggaran 2016 dengan tema pembangunan yaitu :

”Aceh Sejahtera dan Mandiri Melalui Pemenuhan Aksesibilitas, Peningkatan Investasi dan Penciptaan Kedaulatan Pangan”, dengan 5 (lima) isu strategis Pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan yaitu :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;
3. Ketahanan pangan dan nilai tambah produk;
4. Ketahanan pangan dan nilai tambah produksi;
5. Reformasi Birokrasi, Dinul Islam, adat, dan budaya, serta keberlanjutan perdamaian

Dari 5 (lima) isu strategis pembangunan tersebut, pemerintah Aceh pada tahun 2016 menetapkan sasaran utama pembangunan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 ditargetkan sekitar 5,8-6,5 persen dan 2017 ditargetkan berkisar 6,0-7,0 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada tahun 2016 ditargetkan turun menjadi sekitar 14,9-11,5 persen dan pada tahun 2017 dibawah 13,7-9,5 persen;
3. Tingkat pengangguran pada tahun 2016 sekitar 8,2-6,8 persen dan pada tahun 2017 sekitar 7,9-6,5 persen;
4. Tingkat inflasi diperkirakan pada tahun 2016 dan 2017 dapat terkendali sebesar 3,5-5,0 persen.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan Pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : (a). Nilai-nilai Islam; (b). Sosial Budaya; (c). Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan; (d). Keadilan dan Pemerataan; dan (e). Kebutuhan, yang disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 yang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan Aceh dalam kurun waktu lima tahun.

Sebagai langkah konkrit dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Pemerintah Aceh juga menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2016 yang merupakan penjabaran tahun keempat dalam pelaksanaan Qanun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA 2012-2017).

Secara sistematis, keterkaitan dan komponen setiap dokumen Perencanaan Pemerintah Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RPJMA Tahun 2012-2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 merupakan suatu tahapan rencana pembangunan Aceh yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Komponen perencanaan jangka menengah Pemerintah Aceh terdiri dari :

a. Visi

Visi Pemerintah Aceh tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :



b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi Pemerintah Aceh tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.
2. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat.
3. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.
4. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.

c. Tujuan

Tujuan Pembangunan Aceh ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJMA tahun 2012-2017, yang berisikan :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian peraturan pelaksana dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian abadi.
2. Mewujudkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan.
3. Mewujudkan struktur ekonomi dan kualitas Sumber Daya Manusia yang handal.

4. Mewujudkan Pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.

Untuk menjamin konsistensi Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh telah menetapkan sinkronisasi antar komponen Perencanaan Pembangunan Aceh. Sinkronisasi dimaksud, meliputi konsistensi keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan, sebagaimana tertera pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1

Matriks Hubungan antara Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian peraturan pelaksana dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi	Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK
		Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh
		Peringkat LPPD Pemerintah Aceh
		Persentase penurunan temuan kerugian daerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa
		Jumlah Peraturan Pelaksana UUPA yang harus diselesaikan
Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat	Mewujudkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan	Jumlah sertifikasi produk halal
		Jumlah Penerimaan Infaq/Sadaqah
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia	Mewujudkan struktur ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal	Pertumbuhan PDRB
		Laju Inflasi
		Persentase Angka Pengangguran Terbuka
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
		Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
		Jumlah nilai realisasi PMA/ PMDN
		Kontribusi Pajak terhadap PAA
		Kontribusi Zakat terhadap PAA
		Angka Melek huruf usia 15-24 tahun
		Angka rata-rata lama sekolah
		Angka Partisipasi Murni : a. SD/MI (APM) b. SMP/MTs (APM) c. SMA/SMK/MA
		Angka kelulusan : a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA
		Umur Harapan Hidup
		Angka kematian bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup.
		Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
		Prevalensi ODMK per 1.000.000 penduduk
Cakupan Kabupaten/Kota yang memasuki tahap eliminasi Malaria		
Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
		Rasio Jaringan irigasi
		Persentase penanganan bencana
Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA	Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA	NTN
		NTP
		Jumlah Produksi daging
		Jumlah Produksi perikanan
		Skor PPH
		Persentase penurunan Pertambangan tanpa izin (PETI)

d. Sasaran Strategis

Sasaran Pembangunan Aceh yang telah ditetapkan pada RPJMA tahun 2012-2017 menjadi acuan untuk menetapkan Sasaran Strategis dalam penyusunan Perjanjian Kinerja. Hal ini merupakan langkah dan strategi yang dilaksanakan Pemerintah Aceh dalam menjaga konsistensi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adapun sasaran strategis dimaksud adalah :

1. Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian.
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Government.
3. Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam.
4. Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada semua sektor dan peningkatan investasi.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh (PAA).
6. Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka Aceh dan Angka Kemiskinan dengan Perbaikan Pendapatan dan Pemberdayaan Kemandirian melalui Perluasan Lapangan Usaha.
7. Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) bidang Pendidikan pada tahun 2015.

8. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.
9. Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015.
10. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
11. Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
12. Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkualitas.
13. Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh.
14. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
15. Meningkatnya eksplorasi sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Matriks hubungan antara Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis sebagaimana tertera dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Matriks Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan			Sasaran Strategis		
No.	Uraian	Indikator Tujuan	No.	Uraian	Indikator Sasaran
1	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian peraturan pelaksana dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi	Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	1.	Meningkatnya Implementasi UUPA dalam Percepatan Pembangunan dan Menjaga Keberlanjutan Perdamaian	Jumlah Qanun Aceh yang ditetapkan *
		Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh			Jumlah Peraturan Gubernur Yang Ditetapkan*
		Peringkat LPPD Pemerintah Aceh	2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Good Governance dan Clean Government	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
		Persentase penurunan temuan kerugian daerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa			Perolehan Opini hasil pemeriksaan BPK*
		Jumlah Peraturan Pelaksana UUPA yang harus diselesaikan :			Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh*
		Nilai/skor LPPD Pemerintah Aceh*			
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik :			
		a. RSUZA			
		b. RSIA			
		c. RSJ			
		d. BP2T			
		Persentase penurunan temuan kerugian daerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa*			
		Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan			
		Persentase informasi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang terintegrasi pada website Pemerintah Aceh			
2	Mewujudkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan	Jumlah sertifikasi produk halal	3.	Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam.	Persentase Penurunan Pelanggaran Qanun Syariat dan Gangguan Trantibum
		Jumlah Penerimaan Infaq/Sadaqah			Jumlah Fatwa, Hibauan, Seruan dan Taushiah yang ditetapkan
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh			Jumlah sertifikasi produk halal*
					Jumlah Qari/Qariah, Hafidh/Hafidhah, Mufassir/Mufassirah yang berprestasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional
					Jumlah Dayah berakreditasi
					Jumlah Penerimaan Infaq/sadaqah*
					Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh*

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



Tujuan			Sasaran Strategis				
No.	Uraian	Indikator Tujuan	No.	Uraian	Indikator Sasaran		
3	Mewujudkan struktur ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang handal	Pertumbuhan PDRB	4.	Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada sektor dan peningkatan investasi.	Pertumbuhan PDRB*		
		Laju Inflasi			Laju inflasi Aceh*		
		Persentase Angka Pengangguran Terbuka			Ekspor non migas		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)*		
		Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan			Rasio daya serap tenaga kerja		
		Jumlah nilai realisasi PMA/ PMDN			5.	Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh (PAA)	Persentase Kontribusi Pajak Aceh terhadap PAA*
		Kontribusi Pajak terhadap PAA					Persentase kontribusi zakat terhadap PAA*
		Kontribusi Zakat terhadap PAA					Persentase kontribusi PAA terhadap APBA*
		Angka Melek huruf usia 15-24 tahun					6.
		Angka rata-rata lama sekolah			Tingkat partisipasi angkatan kerja*		
		Angka Partisipasi Murni : d. SD/MI (APM) e. SMP/MTs (APM) f. SMA/SMK/MA	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan*				
		Angka kelulusan : d. SD/MI e. SMP/MTs f. SMA/SMK/MA	Persentase Penanganan PMKS				
		Umur Harapan Hidup	Persentase koperasi aktif				
		Angka kematian bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup.	Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM				
		Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	7.	Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015.	Angka Partisipasi Murni: *		
		Prevalensi ODMK per 1.000.000 penduduk			a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		
		Cakupan Kabupaten/Kota yang memasuki tahap eliminasi Malaria			b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		
					c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/ Paket C		
					Angka pendidikan yang ditamatkan		
					a. Tamat SD/ sederajat		
b. Tamat SMP/ sederajat							
c. SMA/ sederajat							
Angka melek huruf usia 15-24 tahun *							

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



Tujuan			Sasaran Strategis		
No.	Uraian	Indikator Tujuan	No.	Uraian	Indikator Sasaran
			8.	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.	Angka rata-rata lama sekolah*
			Angka Partisipasi Kasar		
			a. SD/MI/Paket A		
			b. SMP/MTS/Paket B		
			c. SMA/MA/Paket C		
			Angka Putus Sekolah		
			a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		
			b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		
			c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA		
			Angka Kelulusan*		
a. Angka Kelulusan SD					
b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs					
c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA					
9.	Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015.	Umur harapan hidup*			
Angka kematian ibu melahirkan*					
Angka kematian bayi*					
Angka kematian anak balita					
Prevalensi gizi kurang dan buruk					
10.	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.	Angka kesuksesan pengobatan TB			
Cakupan prevalensi penyakit kusta <1					
Cakupan kabupaten/kota yang memasuki tahap eliminasi malaria*					
Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKMA*					
Prevalensi ODMK*					
4	Mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	11.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik *
		Rasio Jaringan irigasi			Persentase Peningkatan Rasio Jaringan Irigasi*
		Persentase penanganan bencana			Persentase penurunan lingkungan pemukiman kumuh
					Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum/tahun
			12.	Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkualitas.	Persentase penanganan sampah
					Pemantauan Pencemaran status mutu air
					Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
					Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal.
					Persentase Penanganan Bencana.*

Tujuan			Sasaran Strategis		
No.	Uraian	Indikator Tujuan	No.	Uraian	Indikator Sasaran
5	Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA	NTN	13.	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh.	Persentase penanganan bencana*
		NTP			Skor Pola Pangan Harapan*
		Jumlah Produksi daging			Penanganan desa Rawan Pangan
		Jumlah Produksi perikanan			Nilai Tukar Nelayan*
		Skor PPH			Nilai Tukar Petani*
		Persentase penurunan Pertambangan tanpa izin (PETI)	14.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan	Produksi Padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun :
					a. Padi
					b. Jagung
					c. Kedelai
					Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura :
					a. Bawang Merah
					b. Kentang
					c. Cabe Besar
					d. Cabe Rawit
					Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah :
	a. Karet Kering				
	b. Kelapa Sawit				
	c. Kakao Biji Kering				
	Produksi Daging per tahun *				
	Produksi telur pertahun				
	Jumlah Produksi perikanan*				
	15.	Meningkatnya eksplorasi sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.	Persentase penurunan pertambangan tanpa ijin*		
			Rumah tangga pengguna air bersih		
			Rumah tangga pengguna listrik		

Ket : * Indikator Kinerja Utama

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMA Tahun 2012-2017, Pemerintah Aceh telah

menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh, sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh

No.	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJMA Tahun 2012-2017	Indikator Kinerja Utama
1.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang good governance dan clean government;	Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK
			Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh
			Peringkat LPPD Pemerintah Aceh
			Persentase penurunan temuan kerugian daerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa
2.	Keberlanjutan Perdamaian	Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian;	Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang harus ditetapkan:
3.	Dinul Islam, Adat dan Budaya	Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam;	Jumlah sertifikasi produk halal
			Jumlah Penerimaan Infaq/Sadaqah
			Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh
4.	Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk	Meningkatnya produktifitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;	NTN
			NTP
			Jumlah Produksi daging
			Jumlah Produksi perikanan
			Skor PPH
5.	Penanggulangan kemiskinan	Menurunnya angka pengangguran terbuka Aceh dan Angka kemiskinan dengan perbaikan pendapatan dan pemberdayaan kemandirian melalui perluasan lapangan usaha;	Persentase Angka Pengangguran Terbuka
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
			Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
		Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh	Kontribusi Pajak terhadap PAA
			Kontribusi Zakat terhadap PAA
			Pertumbuhan PDRB
			Laju Inflasi
Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada semua sektor dan peningkatan investasi	Jumlah nilai realisasi PMA/ PMDN		

No.	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJMA Tahun 2012-2017	Indikator Kinerja Utama
6.	Pendidikan	Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan pada tahun 2015 (MDGs);	Angka Partisipasi Murni : a. SD/MI (APM) b. SMP/MTs (APM) c. SMA/SMK/MA Melek huruf usia 15-24 tahun
		Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.	Angka rata-rata lama sekolah Angka kelulusan : a. SD/MI b. SMP/MTs c. SMA/SMK/MA
7.	Kesehatan	Tercapainya tujuan pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2015 (MDGs);	Umur Harapan Hidup Angka kematian bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup. Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup.
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.	Prevalensi ODMK per 1.000.000 penduduk Cakupan Kabupaten/Kota yang memasuki tahapan eliminasi Malaria
8.	Infrastruktur yang terintegrasi	Meningkatnya pembangunan infrastruktur antar wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah;	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio Jaringan irigasi
9.	Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Meningkatnya eksplorasi sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan	Persentase penurunan Pertambangan tanpa izin (PETI)
10.	Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan	Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana dan pengelolaan yang berkualitas;	Persentase penanganan bencana

3. RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH (RKPA)

Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2016 merupakan dokumen penjabaran perencanaan Aceh periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017. Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2016 menjadi pedoman dan langkah kerja Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan. Langkah dan

kebijakan strategis yang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh bertujuan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented goverment*).

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2016 menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBA Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan dokumen APBA Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2016, Pemerintah Aceh telah menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang dijadikan pedoman dalam pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2016 serta merupakan perwujudan dari capaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Berdasarkan implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Aceh telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2016 yang merupakan pernyataan komitmen, tekad dan janji untuk mencapai kinerja dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2016 telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan memperhatikan Qanun

Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Aceh.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2016 berisikan 15 sasaran strategis dengan 70 indikator dan target kinerja sasaran. Secara rinci, dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2016 sebagaimana tertera pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Implementasi UUPA dalam Percepatan Pembangunan dan Menjaga Keberlanjutan Perdamaian	Jumlah Qanun Aceh*	15 Qanun
		Jumlah Peraturan Gubernur*	75 Pergub
		Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	80 %
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Good Governance dan Clean Government	Perolehan Opini hasil pemeriksaan BPK*	WTP
		Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh*	60,5
		Nilai LPPD Pemerintah Aceh*	2,35
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik :	
		a. RSUZA	95
		b. RSIA	79,6
		c. RSJ	76,5
		d. BP2T	86
		Persentase penurunan temuan kerugian daerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa*	0,20 %
		Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan	5 %
Persentase informasi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang terintegrasi pada website Pemerintah Aceh	96 %		

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
3.	Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam.	Persentase Penurunan Pelanggaran Qanun Syariat dan Gangguan Trantibum	4%
		Jumlah Fatwa, Hibauan, Seruan dan Taushiah yang ditetapkan	7 dokumen
		Jumlah sertifikasi produk halal*	30 sertifikat
		Jumlah Qari/Qariah, Hafidh/Hafidhah, Mufassir/Mufassirah yang berprestasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	10 Orang
		Jumlah Dayah berakreditasi	471 dayah
		Jumlah Penerimaan Infaq/sadaqah*	28,4 Milyar Rupiah
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh*	35 %
4.	Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada sektor dan peningkatan investasi.	Pertumbuhan PDRB*	6,9 %
		Laju inflasi Aceh*	5 %
		Ekspor non migas	US\$ 100.000.000
		Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)*	3.041.750.000.000
5.	Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh (PAA)	Rasio daya serap tenaga kerja	1:160
		Persentase Kontribusi Pajak Aceh terhadap PAA*	60%
		Persentase kontribusi zakat terhadap PAA*	1,5%
6.	Menurunnya angka pengangguran terbuka Aceh	Persentase kontribusi PAA terhadap APBA	15%
		Persentase angka pengangguran terbuka*	6,8%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*	71,83%
		Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan*	11,5%
		Persentase Penanganan PMKS	60%
		Persentase koperasi aktif	57,79%
7.	Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang pendidikan pada tahun 2015.	Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM	22,66 Trilyun
		Angka partisipasi murni: *	
		a. SD/MI/Paket A	98,60%
		b. SMP/MTs/Paket B	80,50%
		c. SMA/ SMK/ MA/ Paket C	74,50%
		Angka pendidikan yang ditamatkan	
		a. Tamat SD/ sederajat	21,00%
		b. Tamat SMP/ sederajat	17,00%
		c. SMA/ sederajat	32,00%
Angka melek huruf usia 15-24 tahun *	97,8%		

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
8.	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.	Angka rata-rata lama sekolah *	11,5 Tahun
		Angka Partisipasi Kasar	
		a. SD/MI/Paket A	105,00%
		b. SMP/MTS/Paket B	100,00%
		c. SMA/MA/Paket C	91,00%
		Angka Putus Sekolah	
		a. SD/MI	4%
		b. SMP/MTs	12%
		c. SMA/SMK/MA	10%
		Angka Kelulusan*	
a. SD/MI	96%		
b. SMP/MTs	96%		
c. SMA/SMK/MA	97%		
9.	Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015.	Umur harapan hidup*	71,60tahun
		Angka kematian ibu melahirkan*	100/100.000 LH
		Angka kematian bayi*	12/1000 LH
		Angka kematian anak balita	25/1000 LH
		Prevalensi gizi kurang dan buruk	14%
10	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.	Angka kesuksesan pengobatan TB	93%
		Cakupan prevalensi penyakit kusta <1	1%
		Cakupan kabupaten/kota yang memasuki tahap eliminasi malaria*	23 Kab/Kota
		Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKMA	1.762.452 Jiwa
		Prevalensi ODMK*	2 %
11.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik *	82,65 %
		Persentase Peningkatan Rasio Jaringan Irigasi*	69,74%
		Persentase penurunan lingkungan pemukiman kumuh	4,5%
		Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum/tahun	50%
12.	Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi masyarakat terhadap bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkualitas.	Persentase penanganan sampah	70%
		Pemantauan Pencemaran status mutu air	65%
		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	540 Ha
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal.	90%
		Persentase penanganan bencana*	90%
13.	Meningkatnya ketahanan dan kemandirian pangan Aceh.	Peningkatan pola Konsumsi Pangan Harapan*	88,9 Skor PPH
		Penanganan desa Rawan Pangan	200 Desa
		Nilai Tukar Nelayan*	110,10 NTN
		Nilai Tukar Petani*	115 %

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
14.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan	Produksi Padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun :	
		a. Padi	2.689.662 Ton
		b. Jagung	235.835 Ton
		c. Kedelai	148.387 Ton
		Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura :	
		a. Bawang Merah	6.781 Ton
		b. Kentang	81.598 Ton
		c. Cabe Besar	52.012 Ton
		d. Cabe Rawit	54.124 Ton
		Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah :	
		a. Karet Kering	390.099 Ton
		b. Kelapa Sawit	1.021.603 Ton
		c. Kakao Biji Kering	209.425 Ton
		Produksi Daging per tahun *	39.196.344 Kg
Produksi telur pertahun *	17.453.966 kg		
Jumlah Produksi perikanan*	363.159 Ton		
15.	Meningkatnya eksplorasi sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.	Persentase penurunan pertambangan tanpa ijin*	24 %
		Rumah tangga pengguna air bersih	75,65 %
		Rumah tangga pengguna listrik	94,50%

Keterangan :

* Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu wujud instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Organisasi Pemerintah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun secara periodik.

Pada bab ini akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Aceh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017. Pencapaian kinerja pemerintah Aceh dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengukuran pencapaian setiap sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2016.

A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai dalam mewujudkan organisasi akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan

kinerja yang diharapkan (target). Dari hasil pengukuran tersebut akan diketahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) dimasa yang akan datang.

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Aceh terdiri dari :

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik (**Progres Positif**) dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian (**Progres Negatif**), maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase tingkat capaian kinerja} = \frac{(\text{Target}) - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

B. Capaian Kinerja Pemerintah Aceh

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Pemerintah Aceh untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun ini, perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah, serta standar nasional, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Pemerintah Aceh tahun 2016 disajikan sebagai berikut :



Sasaran Strategis-1

Meningkatnya Implementasi UUPA dalam Percepatan Pembangunan dan Menjaga Keberlanjutan Perdamaian

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Jumlah Qanun Aceh yang ditetapkan	15 Qanun	13 Qanun	86,67	Baik
2	Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan	75 Pergub	147 Pergub	196,00	Sangat Baik
3	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	80%	80%	100,00	Baik
Rata-rata tingkat capaian				127,56	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran Strategis "*Meningkatnya Implementasi UUPA dalam Percepatan Pembangunan dan Menjaga Keberlanjutan Perdamaian*" dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **127,56%**.

Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh capaian 3 (tiga) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja Jumlah Qanun Aceh yang ditetapkan ditargetkan sebanyak 15 Qanun mampu direalisasi sebanyak 13 Qanun dengan tingkat capaian 86,67% atau kategori Baik.**

Pemerintah Aceh dan DPRA sepakat menetapkan Qanun Tahun 2016 baik usulan Pemerintah maupun inisiatif DPRA sebanyak 21 Qanun. Dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2016 telah menargetkan Qanun prioritas sebanyak 15 Qanun. Namun sampai dengan akhir tahun dapat terealisasi sebanyak 13 Qanun. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 9 Qanun yang dapat ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2014, qanun yang dapat ditetapkan sebanyak 12 Qanun, dan pada tahun 2012 sebanyak 12 Qanun.

Regulasi berupa Qanun Aceh yang ditetapkan Pemerintah Aceh dengan persetujuan bersama dengan DPRA yang merupakan salah satu tolok ukur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah. Adapun Qanun dimaksud, yaitu :

1. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2016.
2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian Sapi dan Kerbau Betina Produktif
4. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh
10. Qanun Aceh Nomor 10 tentang Perubahan Kedua Atas Qanunm Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan dana Otonomi Khusus
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun Anggaran 2016
12. Qanun Aceh nomor 12 tentang Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
13. Qanun Aceh nomor 13 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh

Dari 21 Rencana Qanun yang dapat ditetapkan tahun 2016, terdapat 8 (delapan) Qanun Aceh yang belum mendapat kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dengan DPRA.

- **Indikator Kinerja “Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan” ditargetkan sebanyak 75 dokumen mampu direalisasi sebanyak 147 dokumen dengan tingkat capaian 196% atau kategori *Sangat Baik*.**

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangan yang dimiliki telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan, yaitu dalam bentuk Peraturan Gubernur Aceh. Pada tahun 2016, jumlah Peraturan Gubernur Aceh yang ditetapkan mencapai 147 dokumen. Capaian tersebut merupakan komitmen Pemerintah Aceh untuk terus memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui penetapan regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.

Adapun peraturan Gubernur yang ditetapkan tahun 2016 diantaranya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tentang Pembebasan/Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat/Besar, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang

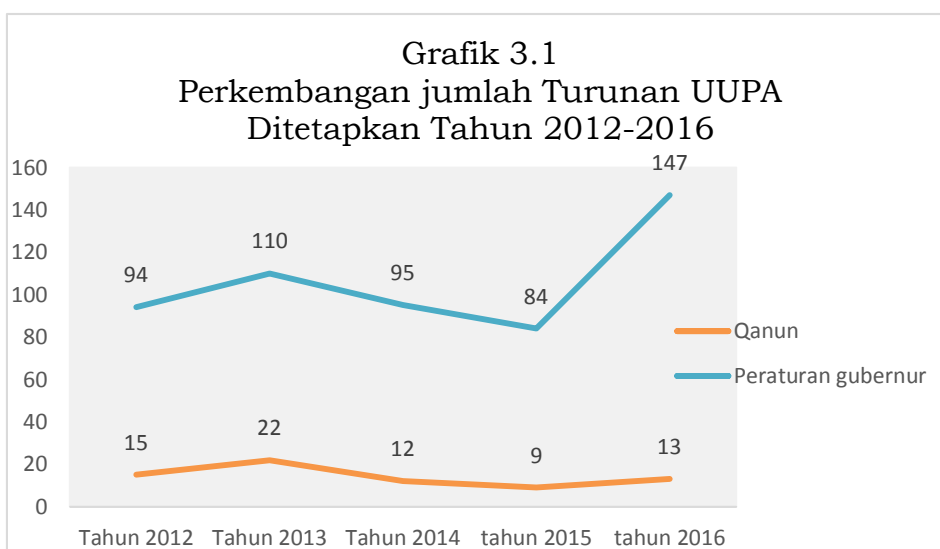
Berikut perkembangan regulasi turunan UUPA sebagaimana yang ditetapkan dari tahun 2012-2016 :

Tabel 3.2
Jumlah Peraturan Turunan UUPA yang ditetapkan

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Capaian
Qanun	15	22	12	9	15	13
Peraturan Gubernur	94	110	95	84	75	147
Jumlah	109	132	107	93	90	160

Sumber : Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, Januari 2017

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, secara grafik Jumlah Peraturan Turunan UUPA yang ditetapkan dapat digambarkan sebagai berikut :



- **Indikator Kinerja Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP ditargetkan sebesar 80% mampu direalisasikan sebesar 80% dengan tingkat capaian 100% atau kategori Baik.**

Sebagai mitra pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan OKP juga memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang

amanah, Pemerintah Aceh terus melakukan pembinaan terhadap lembaga dimaksud.

Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh telah melaksanakan pembinaan terhadap Ormas dan OKP, dengan tujuan memberikan pemahaman serta wawasan kebangsaan terhadap ideologi kebangsaan. Pembinaan ini dilaksanakan melalui penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada sejumlah LSM dan Ormas yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan di Aceh. Pengajuan permohonan penerbitan SKT dimaksud mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah LSM dan Ormas di Aceh.

Perkembangan jumlah Ormas, LSM dan Lembaga lainnya yang mendapat pembinaan dari Pemerintah Aceh sebagaimana tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel. 3.3
Perkembangan jumlah Ormas, LSM, Lembaga lainnya
tahun 2012-2016

No.	Organisasi/lembaga	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	67	45	33	21	19
2.	Organisasi Massa (Ormas)	47	35	20	9	14
3.	Yayasan	8	-	-	-	-

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Aceh, Desember 2016

Untuk terus mengoptimalisasikan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.257.818.910, Program Konsolidasi Perdamaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366.770.000 dan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 204.775.000,-,-,-.



**Sasaran
Strategis-2**

***Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Good Governance
dan Clean Government***

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Perolehan Opini hasil Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	100,00	Baik
2	Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh*	60,5	58,25	96,28*)	Baik
3	Nilai/skor LPPD Pemerintah Aceh*	2,35	2,34	99,57	Baik
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik :				
	a. RSUZA	95	99,30	104,53	Sangat Baik
	b. RSIA	79,6	75,75	95,16	Baik
	c. RSJ	76,5	69,00	90,20	Baik
	d. BP2T	86	83,56	97,16	Baik
5	Persentase penurunan temuan kerugian daerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa*	0,2%	0,08	42,00	Kurang
6	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan	5%	6,05	121,00	Sangat Baik
7	Persentase informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi pada website Pemerintah Aceh	96%	96%	100,00	Baik
Rata-rata tingkat capaian				94,39	Baik

* : hasil LPPD tahun 2014 yang ditetapkan dengan Kepmendagri Nomor 800-35 Tahun 2016

*) : Nilai SAKIP Pemerintah Aceh Tahun 2015

Berdasarkan pengukuran dari 7 (tujuh) indikator kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Government" diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **94,9%** atau dikategorikan **Baik**. Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam mencapai Sasaran Strategis ini didukung oleh capaian setiap indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja “Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK” yang ditargetkan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mampu direalisasikan Pemerintah Aceh dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).**

Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Aceh berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh. Perolehan ini juga tidak terlepas dari kerja keras Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam menyusun laporan keuangan di masing-masing unit kerja. Perolehan opini pada tahun 2016 merupakan suatu prestasi yang diraih Pemerintah Aceh, dimana pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Aceh hanya mampu memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Good Governance* dan *Clean Government*, Pemerintah Aceh juga telah berkomitmen untuk terus mempertahankan hasil perolehan opini yang telah diberikan oleh BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh.



Gambar 3.1

Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah menandatangani berita acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2015. Pemerintah Aceh meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2015

Pada Tahun 2012, Opini BPK terhadap Pemerintah Aceh masih berada pada tataran WDP, demikian juga pada tahun 2013 dan 2014, perolehan WDP juga masih diberikan BPK terhadap Pemerintah Aceh atas pengelolaan keuangan.

Sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Aceh menargetkan perolehan tersebut agar mendapat WTP, akan tetapi masih mendapatkan predikat WDP. Namun, di tahun 2016 telah memperoleh hasil yang menggembirakan terhadap opini hasil pemeriksaan BPK. Berikut perkembangan Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK periode tahun 2012-2016 :

Tabel 3.5
Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Perolehan Opini Hasil Pemeriksaan BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, Januari 2017

➤ **Indikator Kinerja “Perolehan Nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh”.**

Nilai SAKIP Pemerintah Aceh dari tahun 2012-2015 mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2012, nilai SAKIP Pemerintah Aceh adalah 50,19 dengan rating CC, Tahun 2013 adalah 53,27 dengan skor CC, dan tahun 2014 adalah 56,04. Sedangkan pada tahun 2015 nilai SAKIP Pemerintah Aceh kembali naik hingga menempati angka 58,25.

Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh hingga akhir Desember 2016 masih menempati angka 58,26. Nilai ini merupakan nilai terbaru terhadap perolehan SAKIP Pemerintah Aceh. Namun demikian Pemerintah Aceh tetap

optimis dan terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Aceh tahun 2016.

Tren penilaian SAKIP ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal itu dikarenakan adanya komitmen seluruh kepala SKPA di Lingkungan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan akuntabilitas di jajarannya. Selain itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah penguatan Akuntabilitas Kinerja melalui berbagai kegiatan diantaranya fasilitasi penyusunan dokumen SAKIP, pelaksanaan evaluasi internal secara berkala, serta penetapan berbagai kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun capaian perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh tahun 2012-2016 disajikan dalam tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6
Perkembangan Perolehan Nilai Sistem AKIP
Pemerintah Aceh

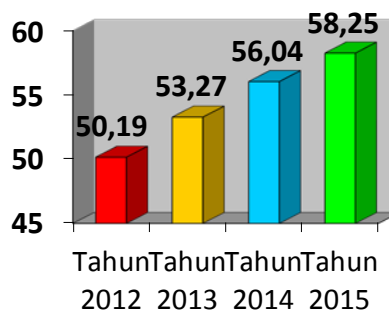
Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Capaian
Perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh	50,19	53,27	56,04	58,25	60,5	-

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh, Januari 2017

Dari tabel di atas, terlihat perkembangan nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Peningkatan ini terus diupayakan Pemerintah Aceh dengan melaksanakan penguatan komitmen di tingkat pimpinan di lingkungan Pemerintah Aceh.

Secara grafik, perkembangan perolehan nilai SAKIP Pemerintah Aceh sebagaimana tertera pada Grafik 3.2 di bawah ini :

Grafik 3.2
Perkembangan Nilai SAKIP Pemerintah Aceh
Tahun 2012-2015

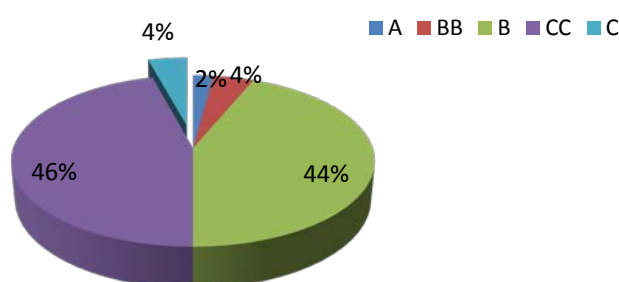


Perolehan nilai AKIP Pemerintah Aceh pada tahun 2016 juga tidak terlepas dari implementasi SAKIP pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, dimana pada tahun 2016, terdapat 1 (satu) SKPA memperoleh predikat rating **“A”** (memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel), 2 (dua) SKPA memperoleh rating **“BB”** (Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal), 21 SKPA memperoleh nilai rating **“B”** (Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan), 22 SKPA memperoleh nilai rating **“CC”** (Cukup/memadai, Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar), dan hanya 2 (dua) SKPA yang memperoleh predikat nilai **“C”** (Kurang, Sistem dan Tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk

manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar).

Perolehan peringkat rating implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2016 dari 46 SKPA secara grafik sebagaimana tergambar di bawah ini :

Grafik 3.3
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan
Pemerintah Aceh Tahun 2016



- **Indikator Kinerja "Peringkat LPPD Pemerintah Aceh" yang ditargetkan sebesar 2,35 (Predikat Tinggi) mampu direalisasikan sebesar 2,34 (Predikat Tinggi), dengan persentase tingkat capaiannya sebesar 99,57% atau dengan kategori Baik.**

Capaian hasil evaluasi LPPD Pemerintah Aceh Tahun 2014 yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-35 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peringkat dan Status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2014, Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Aceh berada di peringkat 21 nasional dari 33 Provinsi dengan nilai 2,3467 dengan prestasi Tinggi (T). Capaian peringkat LPPD Pemerintah Aceh tahun 2014

sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013. Pencapaian ini merupakan prestasi tertinggi Pemerintah Aceh dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Sedangkan hasil evaluasi dokumen LPPD Pemerintah Aceh Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Kepmendagri Nomor 120-251 Tahun 2014 Tanggal 24 Maret 2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional tahun 2012, Pemerintah Aceh mendapat nilai sebesar 1.7867 atau dengan Predikat Sedang. Begitu juga hasil evaluasi LPPD Pemerintah Aceh Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Kepmendagri nomor 120-2818 Tahun 2013 Tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional tahun 2011, Pemerintah Aceh memperoleh nilai sebesar 1.8100 atau dengan Predikat Sedang.

Perbandingan perolehan nilai LPPD Pemerintah Aceh Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebagaimana tertera dalam tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7
Nilai LPPD Pemerintah Aceh

Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Nilai LPPD Pemerintah Aceh	1,81	1,78	2,31	2,34

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh, Desember 2016 (diolah)

- **Indikator Kinerja “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik”** merupakan salah satu indikator yang digunakan Pemerintah Aceh untuk mengukur pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Nilai IKM Pemerintah Aceh merupakan akumulasi dari pencapaian nilai IKM pada 4 (empat) unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Aceh dengan uraian dan analisis sebagai berikut :

- 1) Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin menargetkan IKM sebesar 95,00 hingga akhir tahun dapat di realisasikan sebesar 99,30 dengan presentase tingkat capaian sebesar 104,53% atau dengan kategori *Sangat Baik*.

Perolehan IKM pada RSUZA di tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 99,30. Nilai ini merupakan capaian tertinggi yang diperoleh RSUZA selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, nilai Survey Kepuasan Masyarakat secara mandiri pada Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin mencapai 93,30, Skor Nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,75 dibanding dengan tahun 2014 yang mencapai 91,55 dan mengalami kenaikan sebesar 6,64 dari tahun 2013 yang hanya mencapai 86,66.

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin berdasarkan hasil IKM empat tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan tata kelola Pemerintahan yang amanah telah optimal, walaupun masih menyisakan berbagai masalah lainnya.

- 2) Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) menargetkan IKM sebesar 79,6 dapat di realisasikan sebesar 75,75 dengan presentase tingkat capaian sebesar 95,16% atau dengan kategori *Baik*.

Capaian nilai indeks kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Ibu dan Anak pada tahun 2016 cenderung mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 nilai indeks kepuasan masyarakat hanya mencapai 75,54, dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan yang signifikan hingga mencapai 91,55. Namun, di tahun 2015 nilai indeks kepuasan masyarakat pada Rumah Sakit Ibu dan Anak mengalami penurunan hingga menyentuh angka 74,00. Dengan upaya dan langkah strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, perolehan nilai indeks kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan menjadi 75,75.

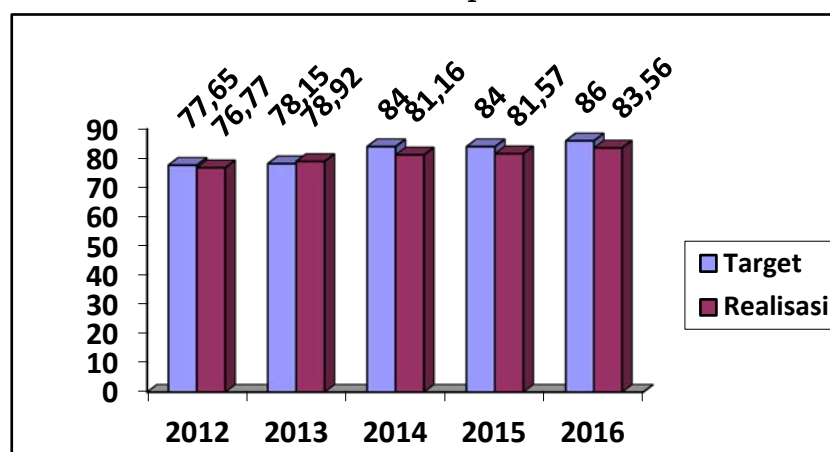
- 3) Rumah Sakit Jiwa (RSJ) menargetkan IKM sebesar 76,5 dapat di realisasikan sebesar 69,00 dengan presentase tingkat capaian sebesar 90,20% atau dengan kategori *Baik*. Perolehan nilai survey kepuasan masyarakat pada unit Rumah Sakit Jiwa Aceh tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu dengan perolehan nilai sebesar 81,57.
- 4) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) yang di targetkan 86,00 dapat direalisasikan sebesar 83,56 dengan presentase tingkat capaian sebesar 97,16% atau dengan kategori *Baik*.

Perolehan nilai survey kepuasan masyarakat pada unit pelayanan BP2T Aceh tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015 dengan

perolehan nilai sebesar 81,57. Namun, bila dibandingkan dengan capaian nilai survey indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2014 dan tahun 2013, nilai survey kepuasan masyarakat cenderung mengalami peningkatan yang signifikan.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada BP2T dari tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.4
Nilai IKM BP2T Aceh periode 2012-2016



Perkembangan IKM pada 4 (empat) unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Aceh dari tahun 2013-2016, sebagaimana tertera pada tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
pada Unit Pelayanan Publik periode 2012-2016

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik				
a. RSUZA	86,66	91,55	93,30	99,30
b. RSIA	75,54	91,55	74,00	75,75
c. RSJ	76,00	74,40	75,25	69,00
d. BP2T	78,92	81,99	81,57	83,56

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh, Desember 2016 (diolah)

- **Indikator Kinerja “Persentase Penurunan Temuan Kerugian Daerah dibandingkan dengan Anggaran yang diperiksa” yang ditargetkan sebesar 0,2% hanya mampu terealisasi sebesar 0,08% dengan persentase tingkat capaiannya sebesar 42,00% atau dengan kategori Kurang.**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, Pemerintah Aceh juga telah melaksanakan upaya penurunan temuan kerugian daerah. Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh telah berhasil menurunkan temuan kerugian daerah sebesar 0,08%. Capaian tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang mencapai 0,35% dan tahun 2014 yang hanya mencapai 0,14%.

Upaya penurunan temuan kerugian daerah dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui Program Pelaksanaan Pengawasan Internal, Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan, Inventarisasi Temuan Pengawasan dan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif.

Berikut, perkembangan temuan kerugian daerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa sebagaimana tabel 3.9 di bawah ini :

Tabel 3.9
Perkembangan Temuan Kerugian Daerah
Dibandingkan dengan Anggaran yang diperiksa.

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Capaian
Persentase Penurunan Temuan Kerugian Daerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa	1,91%	0,17%	0,14%	0,35%	0,2 %	0,08%

Sumber : Inspektorat Aceh, Desember 2016

Untuk terus mengoptimalkan penurunan temuan kerugian daerah, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya Program Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala dengan alokasi anggaran mencapai Rp.6.535.025.000,-, Program Inventarisasi Temuan Pengawasan dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 411.000.000,-, dan Program Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 287.000.000,-.

- **Indikator Kinerja "Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan" yang ditargetkan sebesar 5% dapat terealisasi 6,05% dengan persentase tingkat capaiannya sebesar 121% atau dengan kategori *Sangat Baik*.**

Optimalnya capaian kinerja tersebut disebabkan adanya komitmen yang kuat dari Kepala SKPA/PA/KPA untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh, BPK-RI dan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pencapaian kinerja tahun 2016 sedikit mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 5,89%.

Perkembangan persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 secara rinci dapat dijelaskan pada tabel 3.10 di berikut ini :

Tabel 3.10
Persentase Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut
Pengawasan.

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Capaian
Persentase peningkatan Penyelesaian tindak lanjut pengawasan	9,43%	2%	5,89%	5%	6,05%

Sumber : Inspektorat Aceh, Desember 2016

Untuk terus mengoptimalkan peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya Program Tindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan dengan alokasi anggaran mencapai Rp.1.146.090.000,-, dan Program Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 245.900.000,-.

- **Indikator Kinerja "Persentase Informasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang terintegrasi pada website Pemerintah Aceh" yang ditargetkan sebesar 96% dapat terealisasi 96% dengan persentase tingkat capaiannya sebesar 100% atau dengan kategori Baik.**

Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik telah dilaksanakan Pemerintah Aceh secara optimal, termasuk penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas serta partisipasi. Tuntutan reformasi birokrasi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dianggap mampu mendorong tingkat kepuasan masyarakat dan partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan yang salah satu diantaranya ialah keterbukaan informasi publik.



Hal ini terbukti dari hasil penilaian terkait keterbukaan informasi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Pemerintah Aceh tahun 2016 berhasil memperoleh **peringkat II kategori Pemerintah Provinsi Se-Indonesia.**

Tentunya salah satu penghargaan dari Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Aceh telah membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh telah menerapkan asas transparansi dan partisitif, dimana semua kegiatan serta upaya dan langkah strategis yang dilaksanakan Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan Pembangunan telah diinformasikan seluruhnya kepada publik.



Sasaran Strategis-3

Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.11 di bawah ini :

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Penurunan pelanggaran Qanun Syariat, dan Gangguan Trantibum	4%	3%	75,00	Cukup
2	Jumlah Fatwa, Himbauan, Seruan dan Taushiah yang ditetapkan*	7 dokumen	7 dokumen	100,00	Baik
3	Jumlah sertifikasi produk halal*	30 sertifikat	60 sertifikat	200,00	Sangat Baik
4	Jumlah Qari/Qariah, Hafidh/Hafidhah, Mufassir/Mufassirah yang berprestasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	10 orang	12 orang	120,00	Sangat Baik
5	Jumlah Dayah Berakreditasi	471 dayah	1.015 dayah	215,50	Sangat Baik
6	Jumlah Penerimaan Infaq/sadaqah*	28,45 M	22,45 M	78,90	Baik
7	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Aceh	30%	25,46%	84,87	Baik
Rata-rata tingkat capaian				124,90	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis “*Meningkatnya penyelenggaraan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya Aceh yang sejalan dengan nilai-nilai Dinul Islam*” diperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **124,90%** atau dengan kategori **Sangat Baik**. Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengukuran 7(tujuh) indikator dengan uraian sebagai berikut :

- **Indikator kinerja "Persentase Penurunan Pelanggaran Qanun Syariat, dan Gangguan Trantibum" yang ditargetkan 4% dapat direalisasikan sebanyak 3% dengan persentase tingkat capaian sebesar 75,00% atau dengan kategori *Cukup*.**

Belum optimalnya tingkat capaian ini antara lain disebabkan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun syariat belum semuanya dipatuhi. Pada tahun 2016, jumlah temuan pelanggaran sebanyak 1.659 kasus yang meliputi kasus/pelanggaran Perda Nomor 5 Tahun 2000, Qanun Nomor 7 Tahun 2002 tentang Syariat di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Perda Nomor 5 Tahun 2000 sebanyak 8 Kasus
- b. Pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2002 sebanyak 634 kasus
- c. Pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebanyak 533 kasus
- d. Penertiban PNS sebanyak 80 kasus
- e. Penertiban anak sekolah sebanyak 121 kasus
- f. Pelanggaran trantibum sebanyak 234 kasus

Pelanggaran terbanyak tahun 2016 terjadi dengan jenis pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Pembinaan kasus terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut ditangani secara pembinaan ditempat, pembinaan di kantor sampai ke tahap jaksa.

Jumlah kasus pada tahun 2016 turun signifikan bila dibandingkan dengan jumlah kasus ada tahun 2015 yang mencapai 3.555 kasus. Jumlah kasus pelanggaran yang menempati urutan terbanyak dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah pelanggaran terhadap implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam.

Perkembangan jumlah penemuan kasus pelanggaran yang ditemukan pada tahun 2013-2016 sebagaimana tertera pada tabel 3.12 di bawah ini:

Tabel 3.12
Perkembangan jumlah kasus Pelanggaran Qanun Syariat dan Gangguan Trantibum di Aceh

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
jumlah kasus Pelanggaran Qanun Syariat dan Gangguan Trantibum di Aceh	2.654 kasus	2.825 kasus	3.555 kasus	1.659 kasus

Sumber : Satpol PP dan WH Aceh, Januari 2017

Untuk terus mengoptimalkan penurunan kasus pelanggaran Qanun Syariat dan Gangguan Trantibum, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan alokasi anggaran mencapai Rp.28.481.642.540,-.

- **Indikator kinerja "Jumlah Fatwa, Hibauan, Seruan dan Tausiah yang ditetapkan" yang ditargetkan 7 Dokumen dapat direalisasikan sebanyak 7 Dokumen dengan persentase tingkat capaian sebesar 100,00% atau dengan kategori Baik.**

Status Otonomi Khusus untuk Daerah Aceh sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah memberikan kekhususan dan pengaturan yang berbeda terhadap pengaturan pemerintahan jika ditinjau dari sistem ketatanegaraan, salah satunya adalah eksistensi, peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan kedudukannya sebagai lembaga yang bermitra bersama Pemerintah Aceh dalam perumusan berbagai bentuk kebijakan.

Di dalam Pasal 139 ayat (1) UUPA, ditegaskan bahwa peran "MPU berfungsi untuk menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi".

Eksistensi dan peran MPU Aceh dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan bagi Pemerintah Aceh telah lama dilakukan, salah satunya melalui penetapan fatwa, hibauan serta tausiah. Adapun fatwa, keputusan, hibauan, tausiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam MPU Aceh adalah sebagaimana dalam tabel 3.13 di bawah ini:

Tabel 3.13

Jumlah fatwa, keputusan, himbauan, taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam

No.	Uraian
1.	Fatwa No. 1 TAHUN 2016 Tentang Judi On Line
2.	Fatwa No. 2 Tahun 2016 tentang Hukum Wakilah Akad Nikah Melalui Media Komunikasi
3.	Fatwa No. 3 Tahun 2016 tentang Gadi Dalam Pandangan Islam mamfaat & Mudharatnya
4.	Fatwa No. 4 Tahun 2016 tentang Mawah
5.	Fatwa No. 5 Tahun 2016 tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh
6.	Fatwa No. 6 Tahun 2016 tentang Hak Atas Kekayaan Inteletual Menurut Fiqh Islam
7.	Tausyiah tentang memperkokoh peran Ulama dalam pembangunan Aceh

Sumber : Sekretariat MPU Aceh, Januari 2017

Jumlah fatwa, himbauan, taushiah, pertimbangan kebijakan dan sertifikasi produk halal yang dilaksanakan Sekretariat MPU mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana Jumlah fatwa, keputusan, himbauan, taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam pada Tahun 2012 sebanyak 15 dokumen, pada Tahun 2013 sebanyak 13 dokumen, Tahun 2014 sebanyak 19 dokumen pada Tahun 2015 sebanyak 30 dokumen serta pada tahun Tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan, dimana jumlah tersebut berjumlah 7 dokumen.

Fatwa, keputusan, himbauan dan taushiah telah di keluarkan oleh MPU Aceh guna menjaga, memberi petunjuk, arahan dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh. Berikut perkembangan jumlah fatwa, himbauan, taushiah, yang telah dikeluarkan MPU Aceh Tahun 2012-2016 :

Tabel 3.14
Perkembangan Jumlah Fatwa, Himbauan, Seruan dan Tausiah yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2015
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Jumlah Fatwa, Himbauan, Seruan dan Tausiah yang ditetapkan	15 dokumen	13 dokumen	19 dokumen	30 dokumen	7 dokumen

Sumber : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Desember 2015

- **Indikator kinerja “Jumlah Sertifikasi Produk Halal” yang ditargetkan 30 Sertifikat dapat direalisasikan sebanyak 60 Sertifikat dengan persentase tingkat capaian sebesar 200,00% atau dengan kategori *Sangat Baik*.**

Pencapaian ini menunjukkan bahwa kesungguhan Pemerintah Aceh melalui MPU dalam melegalisasi berbagai produk makanan yang layak konsumsi dan bersertifikat halal yang beredar di Aceh terus ditingkatkan serta didukung oleh adanya peningkatan jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal. Sertifikat produk halal yang telah ditetapkan pada tahun 2016 sebagaimana tertera pada tabel 3.15 di bawah ini :

Tabel 3.15
Daftar Sertifikat Halal yang ditetapkan MPU Aceh Tahun 2016

NO	NO. SERTIFIKAT	JENIS PRODUK	NAMA PRODUK	MASA BERLAKU
1	14030001040216	1. Abon Ikan 2. Snack Ikan 3. Bilis Krisppi 4. Kerupuk Tiram 5. Rengginang Ikan 6. Bakso Ikan 7. Nungget Ikan 8. Otak-Otak Ikan 9. Ekado 10. Kaki Naga 11. Sosis Ikan	Aroma Food	28-Feb-18
2	14100001050216	kerupuk kulit	Kerupuk kulit Aceh PO	28-Feb-18
3	14160001060216	Katering	Katering	28-Feb-18
4	14060001070316	Bumbu Masak	Cirasa	28-Mar-18
5	14200001080316	Donat	Latela	28-Mar-18

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



NO	NO. SERTIFIKAT	JENIS PRODUK	NAMA PRODUK	MASA BERLAKU
6	14200001090316	Nagasari	Cipuga Baru Kak Ramlah	28-Mar-18
7	14200001100316	Nagasari	Nagasari Cahaya	28-Mar-18
8	14030001110416	Ikan Kayu	Kapal Tsunami	29-Apr-18
9	14100001120416	Peyek Kacang dan Udang	Maneh	29-Apr-18
10	14190001130416	Pisang Sale Goreng	Bungong Jeumpa	29-Apr-18
11	14200000010516	Bakery	Moris Bakery	17-May-18
12	14110000010516	Coklat Batang	Sweet Sachie	17-May-18
13	14120000010516	Bubuk Kopi Arabika	ASA Coffee	17-May-18
14	14020000010516	Usaha Pematongan	UP. Ayam Segar	17-May-18
15	14120000330314	Juice	Nozy Juice	19-Jun-18
16	14120000350314	Air minum dalam kemasan	Mount Drink	19-Jun-18
17	14030000010616	Dendeng Ikan	PO Teumeurah	15-Jun-18
18	14060000010616	Bumbu Rujak Kawista	Burak	29-Jun-18
19	14120000020616	Biji dan Bubuk Kopi Arabika, Robusta, dan Luwak	1. Kopi Goyang 2. Kopi Cerdas	29-Jun-18
20	14140000010616	Pil Majakani	Razie	19-Jun-18
21	14200000020516	1. Pancake 2. Mochi	Ratu Pancake	29-Jun-18
22	14290000010616	Es Kristal	Es Kristal	29-Jun-18
23	14120000030716	Air Minum Dalam Kemasan	ALA	17-Jul-18
24	14120000040716	Air Minum Dalam Kemasan	Be Rych 21	27-Jul-18
25	14010000010916	Dendeng Daging	Dendeng Sapi Blang Raya	9-Sep-18
26	14100000010816	Dodol	1. Dodol durian Sabang 2. Dodol Nangka Sabang 3. Dodol Coklat Sabang 4. Dodol Jahe Sabang	4-Aug-18
27	14120000050916	Jus Dalam Kemasan	My Juice	9-Sep-18
28	14160000010916	Restoran	Restoran Canai Mamak KL	9-Sep-18
29	14160000010916	Restoran	Restoran Hotel Rasamala	9-Sep-18
30	14160000030916	Restoran	Restoran Oasis Atjeh Hotel	9-Sep-18
31	14190000010916	Bubuk Kacang Kedelai	Zuhrah	9-Sep-18
32	14330000010916	Kerupuk Nasi	Kerupuk Nasi Barokah	9-Sep-18
33	14030000020916	Dendeng Ikan	Dendeng Ikan Tenggiri	9-Sep-18
34	14100000020916	Keripik	1. Keripik Singkong 2. Keripik Talas 3. Keripik Pisang 4. Keripik Ubi Jalar	9-Sep-18
35	14120000061016	Biji dan Bubuk Kopi Arabika, Robusta, dan Luwak	Tiara Global Coffee	14-Oct-18
36	14120000071016	Biji dan Bubuk Kopi Arabika dan Robusta.	Kiswah Gayo	14-Oct-18
37	14120000081016	Air Minum Dalam Kemasan	Lawe-Q	14-Oct-18
38	14030000031016	Terasi Udang	WSM	14-Oct-18
39	14030000041016	Ikan Keumamah	Keumamah Chip Cap Ikan Segar	24-Oct-18
40	14120000091016	Biji dan Bubuk Kopi	Kenred Coffee	24-Oct-18

NO	NO. SERTIFIKAT	JENIS PRODUK	NAMA PRODUK	MASA BERLAKU
41	14060000021016	Bubuk Kunyit	Aslam	24-Oct-18
42	14020000021116	Usaha Pematongan Ayam	BM	13-Nov-18
43	14120000101116	Air Isi Ulang	Arra Water	13-Nov-18
44	14120000111116	Biji dan Bubuk Kopi	Kupi Bies	13-Nov-18
45	14250000011116	Jelly	Pujell Dessert	13-Nov-18
46	14060000031116	Garam Dalam Kemasan	1. Garam Ibu Pintar 2. Garam AMB 3. Garam Cap Ikan Lele	13-Nov-18
47	14070000011116	1. Detergen Cair 2. Sabun Cuci Piring 3. Shampo Mobil 3. Pembersih Lantai	Floral	21-Nov-18
48	14120000121116	Bubuk Kopi Arabika dan Luwak	Horas Kopi Gayo	21-Nov-18
49	14060000041116	1. Kecap Asin 2. Tauco	Cap Singa, Cap Merak, Cap Ayam, Cap Bunga	21-Nov-18
50	14120000131116	Gula Tebu	Gula Tebu	21-Nov-18
51	14120000141116	Biji dan Bubuk Kopi Arabika, Robusta	Bener Meriah Coffee	21-Nov-18
52	14190000501214	Olahan Pisang	Pisang Raket Rahma Aceh Jaya	29-Dec-18
53	14100000031216	Peyek	EIYU	13-Dec-18
54	14100000041216	Peyek	TOTIK	13-Dec-18
55	14100000051216	Kue Kering	Usaha Mandiri	13-Dec-18
56	14120000151216	Minuman Herbal	1. Nutrsisi Jus 2. Minuman Rempah 3. Ramuan Jantung	13-Dec-18
57	14120000161216	Air Minum Dalam Kemasan	Afiat	13-Dec-18
58	14100000061216	Kue Akar Kelapa	Nafgam	13-Dec-18
59	14120000171216	Air Minum Isi Ulang	Anugrah RO	29-Dec-18
60	14020000031116	Usaha Pematongan Ayam	Usaha Ayam Potong "DAVID"	29-Dec-18

Sumber : Sekretariat MPU Aceh, Januari 2017

Dalam penerapan Syariat Islam secara kaffah, Pemerintah Aceh terus mengupayakan perlindungan pada barang konsumsi yang beredar di Aceh dengan legalisasi terhadap kehalalan suatu produk. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah sertifikasi terhadap produk halal di aceh sebagaimana tertera pada tabel 3.16 di bawah ini :

Tabel 3.16
Perkembangan Jumlah Sertifikasi Produk Halal.

Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Capaian
Jumlah sertifikasi produk halal	6 Sertifikat	23 Sertifikat	20 Sertifikat	41 Sertifikat	30 Sertifikat	60 Sertifikat

Sumber : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Januari 2017

- **Indikator kinerja "Jumlah Qari/Qariah, Hafizh/Hafidhah/Mufassir/Mufassirah yang Berprestasi pada STQ dan MTQ Nasional/Internasional" yang ditargetkan 10 Orang mampu direalisasikan sebanyak 12 Orang dengan persentase tingkat capaian sebesar 120,00% atau dengan kategori *Sangat Baik*.**

Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh telah mengikuti MTQ tingkat nasional ke XXVI yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada event tersebut, sebanyak 12 orang khalifah Provinsi Aceh berhasil meraih juara, sekaligus menempatkan Provinsi Aceh pada peringkat ke delapan pada ajang tersebut.



Gambar 3.2 Seorang santri Dayah Insan Qur'ani (IQ) Aceh Besar yang menjadi salah satu wakil Aceh di MTQ Nasional, Mataram 2016, Muhammad Khadafi, berhasil menjadi juara di cabang Tahfidz Qur'an 1 Juz.

Adapun Khalifah Provinsi Aceh yang berhasil menjadi juara pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXVI di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung pada tanggal 28 Juli - 7 Agustus 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.17

Khafilah Provinsi Aceh yang berhasil menjadi juara pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXVI di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) :

No.	Nama Khalifah Aceh	Perolehan Juara
1.	Yusniar, S.Pd	Juara I, cabang Tafsir Al Qur'an golongan Bahasa Inggris
2.	Muhammad Khadafi	Juara I Hafidz 1 Juz dan Tilawah golongan Hifzh Al Al-Qur'an
3.	Syeh Marzawi	Juara II Khaththath Golongan Hiasan Mushaf
4.	Muhammad Rajul Fuzary	Juara III Hafidz 5 Juz dan Tilawah golongan Hifzh Al Al-Qur'an
5.	Yasarah	Juara III Qariah golongan Remaja
6.	Fachrul Radji HS, Agus Lijar dan Aulia Rizki	Juara II Fahmil Al Qur'an (Group)
7.	Aslim	Juara Harapan, cabang Tafsir Al Qur'an golongan Bahasa Indonesia
8.	Nanda Anni Safitri	Juara Harapan, cabang Tafsir Al Qur'an golongan Bahasa Arab
9.	Wahyu Ridzha	Juara Harapan Hafidz 20 Juz golongan Hifzh Al Al-Qur'an
10.	Ika Fikrika	Juara Harapan Qariah golongan Qiraat
11.	Thantawi	Juara Harapan Qari golongan Cacat Tuna Netra
12.	Shahidul Aulia	Juara Harapan Murattil golongan Tartil

Sumber : Dinas Syariat Islam, Desember 2016

Perolehan prestasi tersebut telah membuktikan bahwa Pemerintah Aceh terus berupaya memajukan pencapaian kinerja di bidang Dinul Islam. Keberhasilan kinerja bidang Dinul Islam di capai Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan program pembinaan syariat Islam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 569.366.000, program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalam Al-Qur'an dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.070.631.500,-.

Perkembangan perolehan prestasi pada MTQ dan STQ nasional/Internasional tahun 2014-2016 sebagaimana tertera dalam tabel 3.18 di bawah ini :

Tabel 3.18
Jumlah Qari/Qariah, Hafid/
Hafidhah/Mufassir/Mufassirah yang Berprestasi
pada STQ dan MTQ Nasional/Internasional.

Indikator Kinerja	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Capaian	Capaian	Target	Capaian
Jumlah Qari/Qariah, Hafidh/Hafidhah/Mufassir/ Mufassirah yang Berprestasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	8 orang	3 orang	10 orang	12 orang

Sumber : Dinas Syariat Islam, Desember 2016

- **Indikator kinerja "Jumlah Dayah Berakreditasi" yang ditargetkan 471 Dayah dapat direalisasikan sebanyak 1.015 Dayah dengan persentase tingkat capaian sebesar 215,50% atau dengan kategori Baik.**

Pemerintah Aceh telah melaksanakan pembinaan terhadap seluruh dayah yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh agar semua Dayah mendapat akreditasi sesuai dengan tingkatannya. Upaya pembinaan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh terhadap seluruh Dayah (Pesantren) tersebut merupakan langkah penyetaraan kelulusan Dayah dan merupakan langkah preventif terhadap upaya-upaya pendangkalan aqidah di bumi Serambi Mekkah.

Salah satu pembinaan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan akreditasi dayah serta penguatan dayah-dayah yang terletak di daerah perbatasan. Adapun Dayah daerah perbatasan dimaksud yaitu ; Dayah Manarul Islam di Kabupaten Aceh Tamiang, Dayah Darul Amin di Kabupaten Aceh Tenggara, Dayah Safinatussalamah di Kabupaten Aceh Singkil dan Dayah Minhajussalamah di Kota Subulussalam.

Jumlah persebaran dayah di Aceh berdasarkan akreditasi beserta jumlah santri sebagaimana tertera pada tabel 3.19 di bawah ini :

Tabel 3.19
Persebaran Dayah di Aceh
Berdasarkan Akreditasi tahun 2016

No.	Kab/Kota	Jumlah dayah Tipe					Jumlah Dayah
		A+	A	B	C	D	
1	Sabang	0	0	1	4	0	5
2	Banda Aceh	3	1	1	2	2	9
3	Aceh Besar	1	13	19	46	48	127
4	Pidie	0	1	12	38	76	127
5	Pidie Jaya	0	4	2	26	9	41
6	Bireuen	3	5	14	35	21	78
7	Lhokseumawe	0	3	5	18	4	30
8	Aceh Utara	1	8	13	45	106	173
9	Aceh Timur	0	5	9	27	76	117
10	Langsa	0	2	2	5	7	16
11	Aceh Tamiang	0	2	5	5	6	18
12	Bener Meriah	0	4	3	7	2	16
13	Aceh Tengah	0	0	7	10	4	21
14	Gayo Lues	0	2	2	9	7	20
15	Aceh Tenggara	0	5	9	7	12	33
16	Aceh Jaya	0	2	3	7	4	16
17	Aceh Barat	0	1	6	11	8	26
18	Nagan Raya	0	0	0	8	15	23
19	Aceh Barat Daya	0	5	12	7	3	27
20	Aceh Selatan	1	3	6	33	14	57
21	Subulussalam	0	0	7	6	4	17
22	Aceh Singkil	0	3	1	4	8	16
23	Simeulue	0	0	2	0	0	2
		9	69	141	360	436	1.015

Sumber : BPPD Aceh, Januari 2017 (data diolah)

Untuk terus meningkatkan jumlah dayah berakreditasi, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya Program Pendidikan Dayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.912.090.000,-, Program Peningkatan Dayah dan Prasarana Dayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 172.341.133.613,-, Program Mutu Tenaga Kependidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.894.994.225,-, Program Pembinaan Manajemen Dayah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 340.971.708,-, dan Program

Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 5.134.192.265,-.

- **Indikator kinerja “Jumlah Penerimaan Infaq/Sadaqah” yang ditargetkan Rp. 28.458.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 22,452,878,469,- dengan persentase tingkat capaian sebesar 78,90% atau dengan kategori *Baik*.**

Pemerintah Aceh sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-Undang dimaksud Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat melalui; pembentukan Badan Baitul Mal yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Mustahiq dan Muzakki, pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Lembaga Baitul Mal Aceh dimaksud salah satu tugas pokok dan fungsinya memungut zakat, infaq dan sadaqah sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam, termasuk terhadap para pengusaha yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Aceh, dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2005 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, dimana Pasal 3 ayat (2) menetapkan: “Perusahaan yang mendapat pekerjaan dari pemerintah provinsi dikenakan infak wajib 0,5% dari pekerjaan bernilai Rp 20 juta keatas.

Jumlah penerimaan Infaq/sadaqah di Aceh dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami tren fluktuatif sebagaimana tertera dalam tabel 3.20 berikut ini :

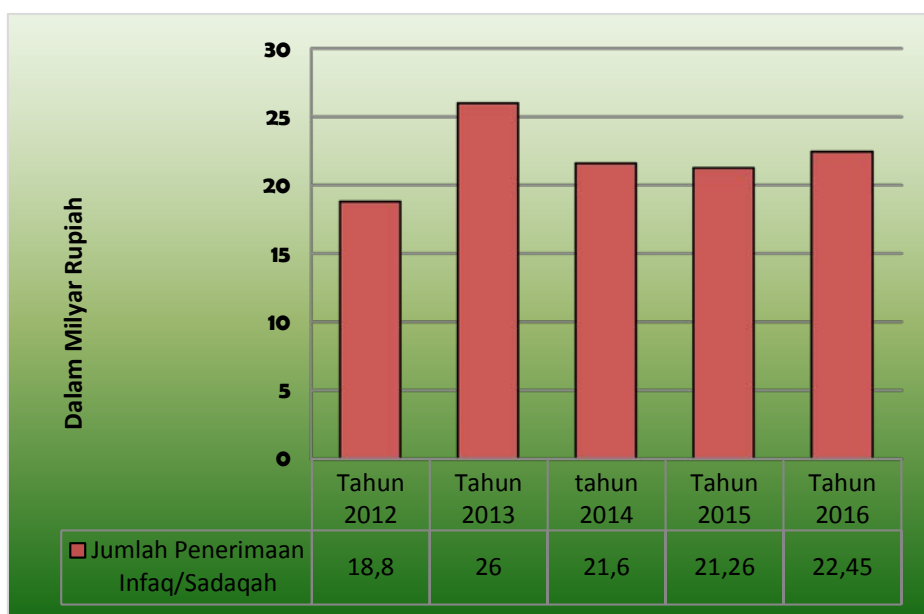
Tabel 3.20
Jumlah Penerimaan Infaq/Sadaqah.

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Capaian (Rp)	Capaian (Rp)	Capaian (Rp)	Capaian (Rp)	Target (Rp)	Capaian (Rp)
Jumlah Penerimaan Infaq/ Sadaqah	18.8 M	26 M	21.6 M	21.6 M	28.45 M	22.45 M

Sumber : Sekretariat Baitul Mal Aceh, Desember 2016

Secara grafik, penerimaan infaq/sadaqah dapat gambarkan pada grafik 3.5 di bawah ini :

Grafik 3.5
Jumlah Penerimaan Infaq/Sadaqah Tahun 2012-2016



- **Indikator kinerja "Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Aceh" yang ditargetkan sebesar 30% hanya mampu direalisasikan sebesar 25,46% dengan persentase tingkat capaian sebesar 84,87% atau dengan kategori Baik.**

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat Aceh. Banyaknya obyek dan daya tarik wisata di Aceh telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Keanekaragaman budaya didukung oleh kreatifitas seni dan keramahtamahan masyarakat, membuat Aceh mampu menciptakan produk-produk budaya dan pariwisata yang menjanjikan.

Tingkat capaian kinerja indikator ini merupakan akumulasi dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang berkunjung ke Aceh. Jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh pada tahun 2016 meningkat signifikan bila dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 1.717.116 orang, terjadi kenaikan sekitar 25,46% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 kebijakan nasional yang memicu kunjungan wisatawan ke Indonesia seperti ; pembebaan visa bagi sejumlah negara dan kemudahan izin singgah kapal pesiar dan yacht juga membawa dampak bagi peningkatan kunjungan wisatawan ke Aceh khususnya wisatawan asing. Sedangkan bagi wisatawan nusantara sangat dipengaruhi oleh kegiatan Aceh Internasional Rapai Festival, Promosi wisata ke dalam dan luar negeri, serta

musibah Gempa Pidie Jaya yang mengundang banyak volunteer masuk ke Aceh.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga telah melaksanakan beberapa event berskala nasional seperti Peringatan 12 tahun Tsunami Aceh dan Peringatan 11 Tahun MoU Helsinki.

Gambar 3.3

Hari Peringatan 11 Tahun MoU Helsinki, merupakan salah satu event internasional yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Aceh



Hal lainnya adalah penambahan rute penerbangan langsung Kuala Namu (Medan)-Sabang yang saat ini telah dilayani oleh 39 (tiga) maskapai nasional yaitu Garuda, Lion Air dan Wings Air, sehingga mempermudah konektivitas wisatawan langsung ke daya Tarik terbesar provinsi Aceh yaitu, Sabang.

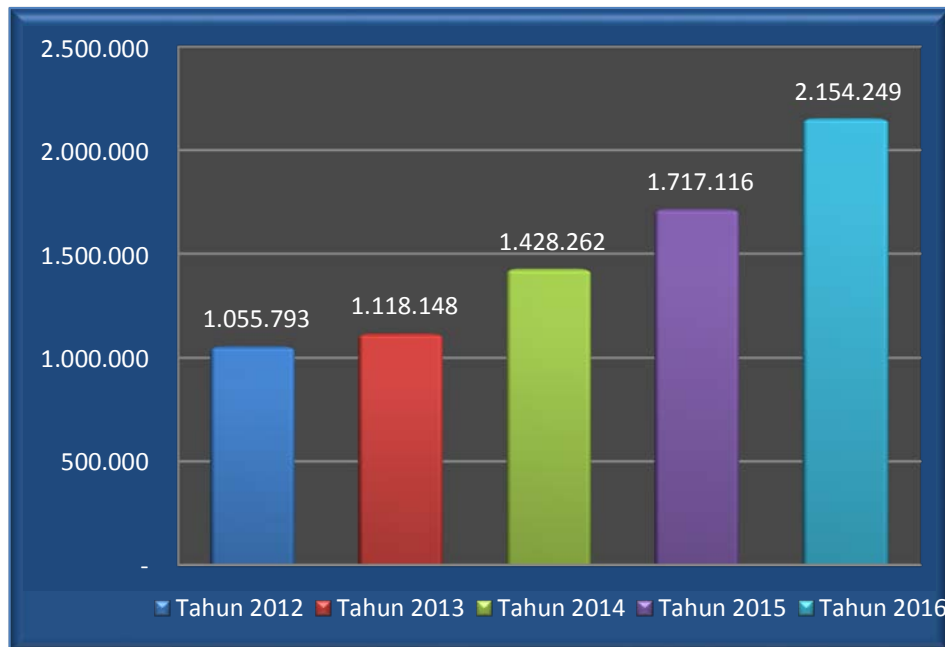
Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh baik wisatawan Mancanegara maupun wisatawan domestik periode Tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, sebagaimana tertera dalam tabel 3.21 di bawah ini :

Tabel 3.21
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Aceh
periode 2012-2016 .

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Aceh	1.055.793 Orang	1.118.148 Orang	1.428.262 Orang	1.717.116 Orang	2.154.249 Orang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Januari 2017

Grafik 3.6
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Aceh
tahun 2012-2016



Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh juga dipengaruhi oleh adanya pengembangan sejumlah objek daya tarik wisata. Pada tahun 2016, pengembangan objek daya tarik wisata yang dikembangkan Pemerintah Aceh mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, jumlah objek wisata yang dikembangkan berjumlah 12 objek, pada tahun 2015 sebanyak 14 objek dan pada tahun 2016 jumlah objek wisata yang dikembangkan sebanyak 7 objek.

Berikut perkembangan objek daya tarik wisata yang dikembangkan Pemerintah Aceh :

Tabel 3.22
Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata yang dikembangkan Pemerintah Aceh tahun 2014-2016.

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Capaian	Capaian	Capaian
Jumlah Objek Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	12 ODTW	14 ODTW	7 ODTW

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Januari 2017

Pada tahun 2016 Pemerintah Aceh juga telah menerima penghargaan Internasional sebagai Destinasi Wisata Budaya Halal Dunia Tahun 2016 dalam World Halal Tourism Competitions. Aceh juga menerima Sertifikat Penetapan “Warisan Budaya Tak Benda Indonesia” untuk 8 jenis kesenian Aceh yaitu : Menatakhken Hinei, Mak Meugang, Tari Guel, Pacu Kude, Nandong, Likok Pulo, Canang Kayu dan Meracu, sehingga sampai dengan Tahun 2016 telah ditetapkan 20 jenis kesenian/budaya Aceh yang mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda nasional/internasional. Hal ini membuktikan bahwa pengembangan sektor pariwisata di Aceh terus digalakkan oleh Pemerintah Aceh.

Untuk menggalakkan peningkatan bidang pariwisata, Pemerintah Aceh telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, diantaranya Program Pengembangan Nilai Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.022.983.778,-, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.135.287.848,-, Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 710.000.000,-, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.108.736.000 dan Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.133.310.000,-.



Sasaran Strategis-4

Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada semua sektor dan peningkatan investasi

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.23 di bawah ini :

Tabel 3.23
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Pertumbuhan PDRB	6,9%	3,31%	47,97	Kurang
2	Laju inflasi Aceh	5%	3,86 %	122,80	Sangat Baik
3	Ekspor non migas	US \$ 100 juta	US \$ 68,7 juta	68,70	Cukup
4	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)	3,041 T	4,973 T	163,53	Sangat Baik
5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1 : 160	1 : 74	46,25	Kurang
Rata-rata tingkat capaian				89,85	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis *"Meningkatnya struktur perekonomian yang mantap berlandaskan keunggulan kompetitif wilayah pada semua sektor dan peningkatan investasi"* dapat diperoleh capaian sebesar **89,85%** dengan kategori **Baik**.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu sasaran utama pembangunan Aceh yang menargetkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,8-6,5% dan inflasi sebesar 3-5%. Hasil pencapaian sasaran ini sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2016.

Hasil pengukuran dan analisis setiap indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Indikator kinerja "Pertumbuhan PDRB" yang ditargetkan 6,9% dapat direalisasikan sebesar 3,31% dengan persentase tingkat capaian sebesar 47,97% atau dengan kategori Kurang.**

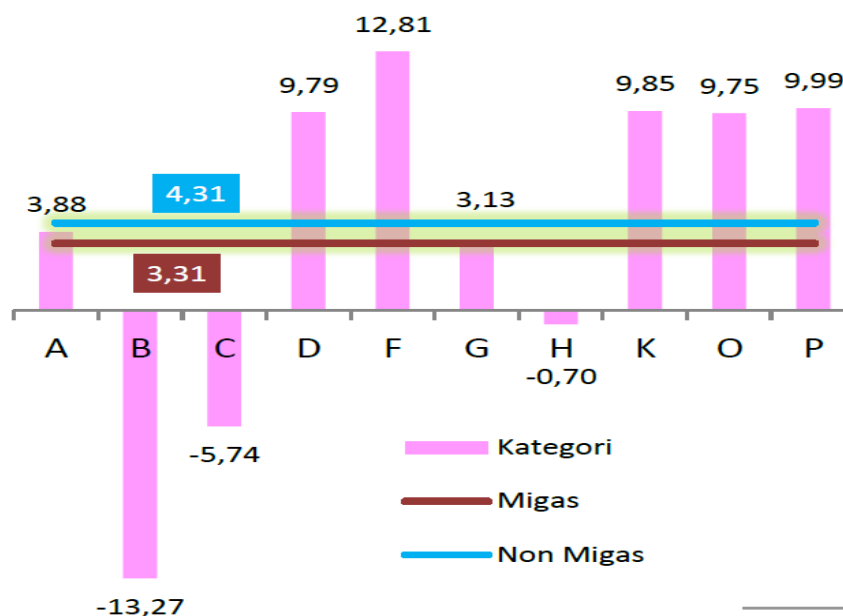
Perekonomian Aceh Tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp137,3 triliun atau sebesar US\$10,32 milyar. Sementara itu PDRB tanpa migas adalah sebesar Rp133,2 triliun atau sebesar US\$10,01 milyar.

Menurut lapangan usaha ekonomi Aceh secara kumulatif hingga Triwulan IV-2016 dengan migas tumbuh 3,31 persen (*c-to-c*). Dengan mengeluarkan migas, pertumbuhan ekonomi Aceh secara kumulatif adalah sebesar 4,31 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian (B), Industri Pengolahan (C), dan Transportasi dan Pergudangan (H). Kategori Konstruksi (F) merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 12,81 persen, berturut-turut diikuti Jasa Pendidikan (P) sebesar 9,99 persen, dan Jasa Keuangan (K) sebesar 9,85 persen di urutan ketiga.

Pertumbuhan Konstruksi tertinggi didukung dengan masih berjalannya proyek *multiyears fly over* Simpang Surabaya dan Masjid Raya Baiturrahman serta berbagai proyek pembangunan lainnya yang sedang berjalan di Provinsi Aceh. Kategori Jasa Pendidikan juga meningkat selama tahun 2016 karena meningkatnya anggaran pendidikan dan adanya gaji ke-14. Pertambangan dan

Penggalian (B) masih mengalami kontraksi sehingga menghambat pertumbuhan, sektor yang paling berpengaruh adalah pertambangan batubara, berdasarkan fenomena yang terjadi menurunnya produksi pertambangan batubara disebabkan karena cuaca buruk dan permintaan harga yang tidak stabil. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (H) juga masih mengalami penurunan karena turunnya jumlah penumpang angkutan darat di beberapa terminal besar, meskipun jumlah penumpang angkutan laut dan udara terus tumbuh. Secara umum, bencana banjir dan cuaca buruk yang terjadi di sepanjang tahun 2016 merupakan salah satu faktor melambatnya pertumbuhan pada beberapa Lapangan Usaha khususnya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A).

Grafik 3.7
Pertumbuhan Kumulatif beberapa lapangan Usaha
Tahun 2016 c-to-c



Ekonomi Aceh menurut Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) selama tahun 2016 tumbuh sebesar 3,31 persen dibanding tahun 2015. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didorong oleh tumbuhnya beberapa komponen yang cukup signifikan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) tumbuh sebesar 3,32 persen dan masih menjadi komponen utama dalam perekonomian Aceh dengan kontribusi sebesar 62,38 persen. Penginapan dan Hotel serta Transportasi/ Angkutan merupakan sub-komponen yang tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 7,03 persen dan 5,23 persen.

Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) tumbuh cukup signifikan di tahun 2016 yaitu sebesar 8,13 persen. Meningkatnya kegiatan dari partai politik dan lembaga politik yang sudah memasuki masa kampanye pilkada 2017 serta banyaknya bantuan sosial dari lembaga sosial, ormas dan LSM terkait bencana gempa di Pidie Jaya, mampu mendorong pengeluaran konsumsi LNPRT. Meskipun demikian, kontribusi dari konsumsi LNPRT masih relatif rendah yaitu sebesar 2,03 persen.

Sejalan dengan konsumsi LNPRT, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga tumbuh cukup signifikan di tahun 2016 yaitu sebesar 6,92 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya nilai PMTB bangunan yaitu sebesar 9,14 persen. Banyaknya proyek pembangunan *multiyears* yang dikerjakan di Aceh selama tahun 2016 seperti pembangunan jalan, jembatan, *landscape* masjid, pasar, tugu, hotel, taman dan sarana umum lainnya, serta

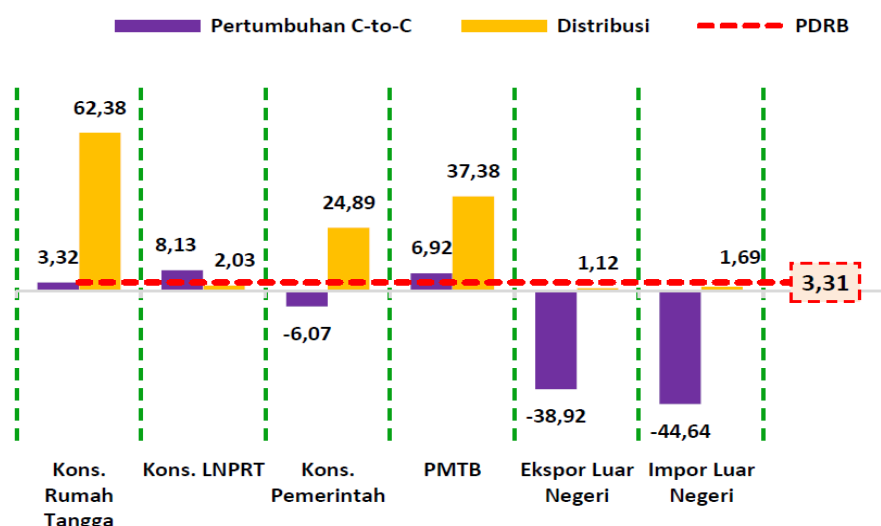
penambahan bus transkutaraja dan sarana pendukungnya mampu meningkatkan nilai PMTB. Komponen PMTB juga memiliki kontribusi terbesar kedua setelah PKRT yaitu sebesar 37,38 persen.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) di tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar minus 6,07 persen. Penurunan tersebut terjadi baik pada konsumsi kolektif maupun konsumsi individu. Penghematan anggaran yang diberlakukan baik pada APBN maupun APBD menjadi penyebab turunnya konsumsi pemerintah di 2016. Konsumsi pemerintah berkontribusi pada perekonomian Aceh sebesar 24,89 persen.

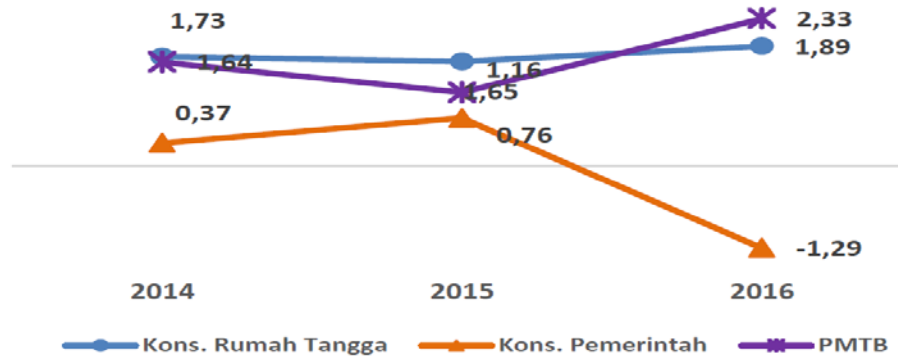
Pertumbuhan kumulatif PDRB c-to-c dan distribusi PDRB menurut pengeluaran dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 3.8

Pertumbuhan PDRB c-to-c dan distribusi PDRB menurut pengeluaran

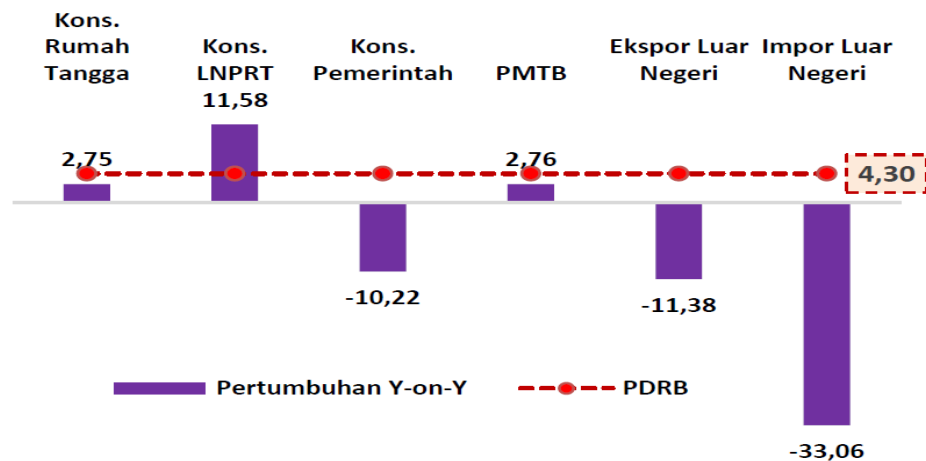


Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran

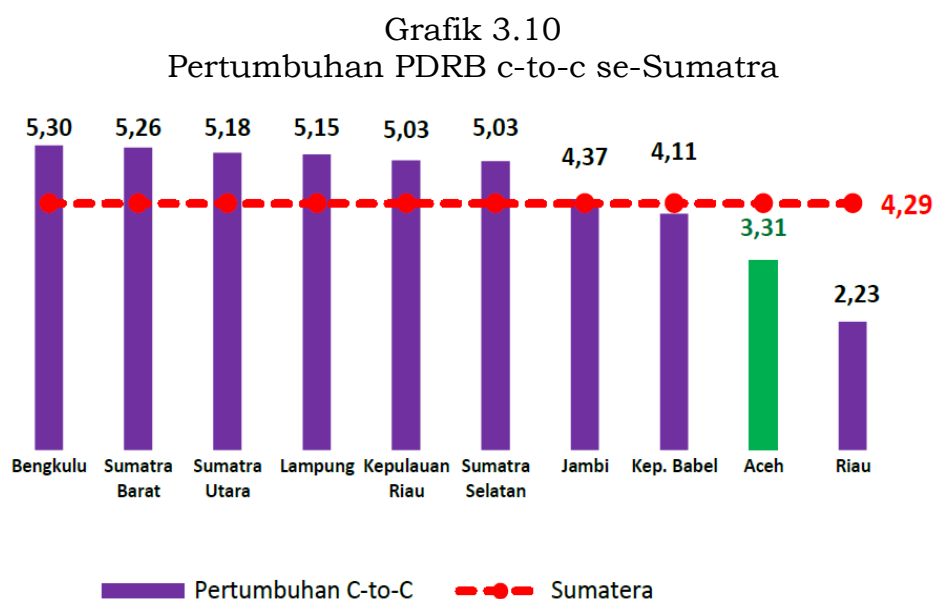


Pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV-2016 dibandingkan triwulan IV-2015 (*y-on-y*) juga mampu tumbuh sebesar 4,30 persen. Seperti halnya pada pertumbuhan kumulatif, pertumbuhan secara *year on year* didorong oleh tumbuhnya komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan PMTB yang masing-masing tumbuh sebesar 2,75 persen, 11,58 persen dan 2,76 persen. Pertumbuhan tertinggi pada konsumsi rumah tangga terjadi di sub-komponen rekreasi dan budaya serta penginapan dan hotel.

Grafik 3.9
Pertumbuhan PDRB y-on-y Menurut Pengeluaran



Jika dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi regional se-Sumatera, secara kumulatif (*c-to-c*) pertumbuhan ekonomi Sumatera tahun 2016 tumbuh sebesar 4,29 persen. Bengkulu merupakan Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera selama tahun 2016 yaitu sebesar 5,30 persen, diikuti oleh provinsi Sumatera Barat sebesar 5,26 persen. Riau menjadi Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi terendah selama tahun 2016 yaitu sebesar 2,23 persen. Aceh sendiri berada pada urutan ke-dua terendah setelah Riau dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,31 persen selama tahun 2016. Pertumbuhan PDRB *c-to-c* se-Sumatra dapat dijelaskan seperti grafik berikut :

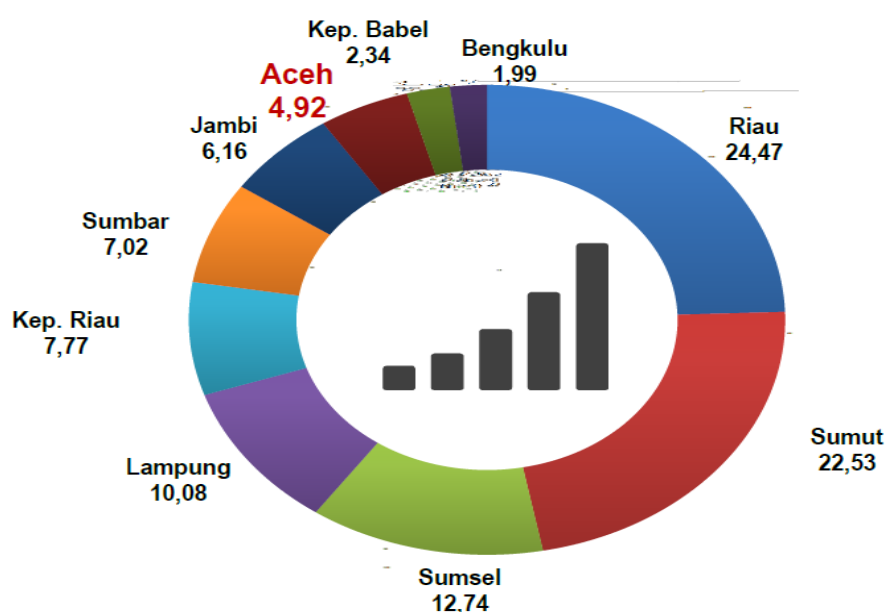


Jika ditinjau berdasarkan kontribusi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing Provinsi di wilayah regional Sumatera terhadap PDRB total se-Sumatera, Riau dan Sumatera Utara merupakan Provinsi dengan kontribusi tertinggi yaitu masing-masing sebesar

24,47 persen dan 22,53 persen. Kontribusi terkecil terhadap PDRB Sumatera adalah Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 1,99 persen. PDRB Aceh sendiri memiliki kontribusi sebesar 4,92 persen terhadap PDRB Sumatera selama tahun 2016. Distribusi PDRB se-Sumatra 2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.11

Distribusi PDRB se-Sumatra 2016



Pertumbuhan PDRB Aceh dalam beberapa tahun terakhir dapat di lihat pada tabel 3.24 di bawah ini :

Tabel 3.24

Pertumbuhan PDRB tahun 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Pertumbuhan PDRB	5,20%	5,36%	5,78%	5,33%	3,31

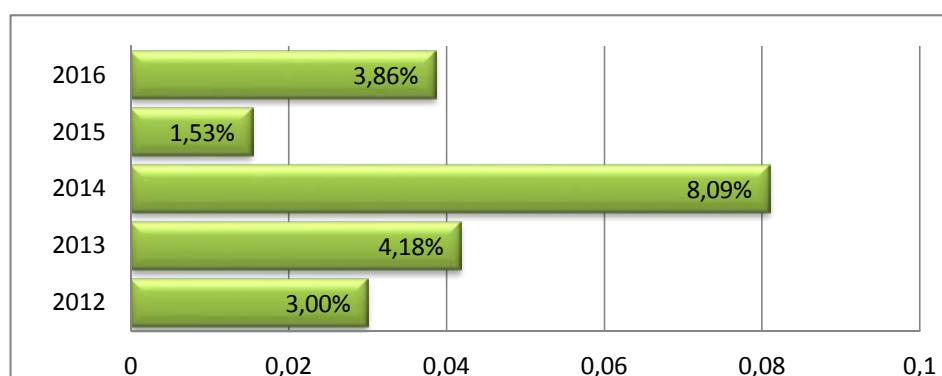
Sumber : BPS Aceh, Januari 2017

- **Indikator kinerja "Laju Inflasi Aceh" yang ditargetkan 5% dapat direalisasikan sebesar 3,86% dengan persentase tingkat capaian sebesar 122,80% atau dengan kategori *Sangat Baik*.**

Laju inflasi menjadi tolak ukur kestabilan perekonomian di suatu daerah. Laju inflasi Aceh tahun 2016 lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang laju inflasinya sebesar 1,53%. Namun demikian perkembangan laju inflasi selama empat tahun terakhir menunjukkan besaran yang fluktuatif, untuk lebih jelasnya, perkembangan laju inflasi di Aceh dalam beberapa tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik 3.12 di bawah ini :

Grafik 3.12

Perkembangan Laju Inflasi Aceh tahun 2012-2016



Sumber : BPS Aceh, Januari 2017

Perkembangan Laju Inflasi di Aceh dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 sebagaimana tertera pada tabel 3.25 di bawah ini :

Tabel 3.25
Laju Inflasi Aceh Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Capaian
Laju Inflasi Aceh	3%	4,18%	8,09 %	1,53	5 %	3,86

Sumber : BPS Aceh, Januari 2017

- **Indikator kinerja "Ekspor Non Migas" yang ditargetkan 100.000.000,00 US\$ mampu terealisasi sebesar 68.704.560,58 US\$ dengan persentase tingkat capaian sebesar 68,70% atau dengan kategori Cukup.**

Pencapaian ini merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Aceh untuk terus menaikkan nilai ekspor non migas. Bila dilihat dari tingkat capaian nilai ekspor non migas belum menunjukkan hasil yang optimal.

Nilai ekspor non migas Aceh mencapai US\$ 68.704.560,58 pada tahun 2016. Pencapaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang mencapai US\$ 99.067.546,23. Namun nilai ekspor non migas Aceh tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar US\$ 15,09 juta atau setara dengan peningkatan sebesar 28,15%.

Perkembangan nilai ekspor non migas Aceh sebagaimana tertera pada tabel 3.26 di bawah ini :

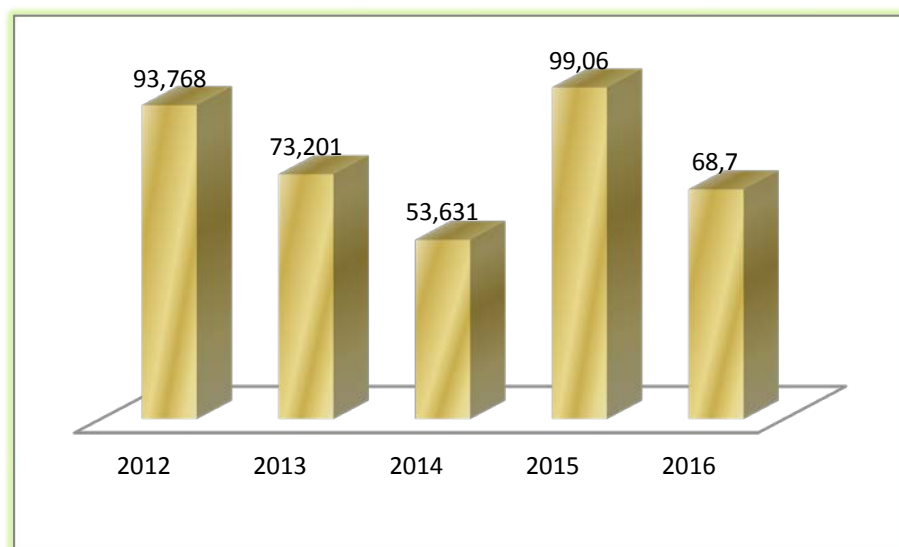
Tabel 3.26
Nilai Ekspor Non Migas di Aceh
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Nilai Ekspor Non Migas	Us \$ 93,768	Us \$ 73,201	Us \$ 53,631	Us \$ 99,06 juta	Us \$ 68,70 juta

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Desember 2016

Berdasarkan perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Di Aceh, perkembangan setiap tahun secara grafik sebagaimana tergambar sebagai berikut :

Grafik 3.13
Perkembangan nilai ekspor non migas Aceh
periode 2012-2016 (dalam Us \$)



Untuk terus mengoptimalkan nilai ekspor non migas, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 2.153.874.880,-.

- **Indikator kinerja "Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA)" yang ditargetkan sebesar Rp. 3,041 Triliun, dapat direalisasikan sebesar Rp. 4,973 triliun dengan persentase tingkat capaian 163,50% dan kategori Sangat Baik.**

Komitmen Penanaman Modal Asing (PMA) baru di tahun 2016 dapat diketahui dari Izin Prinsip (IP) yang telah dikeluarkan melalui BKPM untuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat. Kondisi bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp 26,08 Triliun

(dengan asumsi 1 USD= Rp 13.400) untuk 17 proyek/perusahaan. Sementara untuk kondisi bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2015 hanya sebesar Rp 19,9 Triliun untuk 24 proyek. Komitmen investor baru pada tahun 2016 untuk PMA yaitu bergerak antara lain pada sektor hotel dan restoran, industri air minum di Kota Sabang; industri minyak mentah kelapa di Kabupaten Simeulue; industri makanan di Kabupaten Aceh Tenggara; pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Tenggara; serta transportasi gudang dan telekomunikasi di Kota Banda Aceh.

Sementara itu, PMDN juga mengalami peningkatan sebesar 74,27% dalam membukukan komitmen barunya di Aceh. IP yang telah dikeluarkan oleh BKPM RI, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) provinsi Aceh, dan PTSP Kabupaten/Kota se-Aceh yang tercatat melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dapat menjadi rujukan pengukuran kinerja. Untuk kondisi bulan Januari sampai dengan Desember 2016 rencana investasi PMDN adalah sebesar Rp 7,58 Triliun yang tersebar dalam 120 proyek/perusahaan. Ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi Desember 2015, yaitu sebesar Rp 1,95 Triliun. Komitmen investor baru dalam negeri baru bergerak antara lain pada sektor perdagangan sebanyak 40 proyek; jasa lainnya sebanyak 21 proyek; transportasi gudang dan telekomunikasi sebanyak 14 proyek; listrik gas dan air sebanyak 10 proyek; industri semen sebanyak 1 proyek.

Secara kumulatif, perkembangan yang terjadi pada tahun 2016 dibandingkan dengan enam tahun sebelumnya serta posisi relatif pencapaian target lima tahunan Rencana Strategis 2012-2017 pada tahun keempat ini. Capaian realisasi investasi menurut kondisi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2016 adalah sebesar Rp 4,97 Triliun. Ini berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh 346 proyek PMDN dan 42 proyek PMA (pencatatan manual/offline).

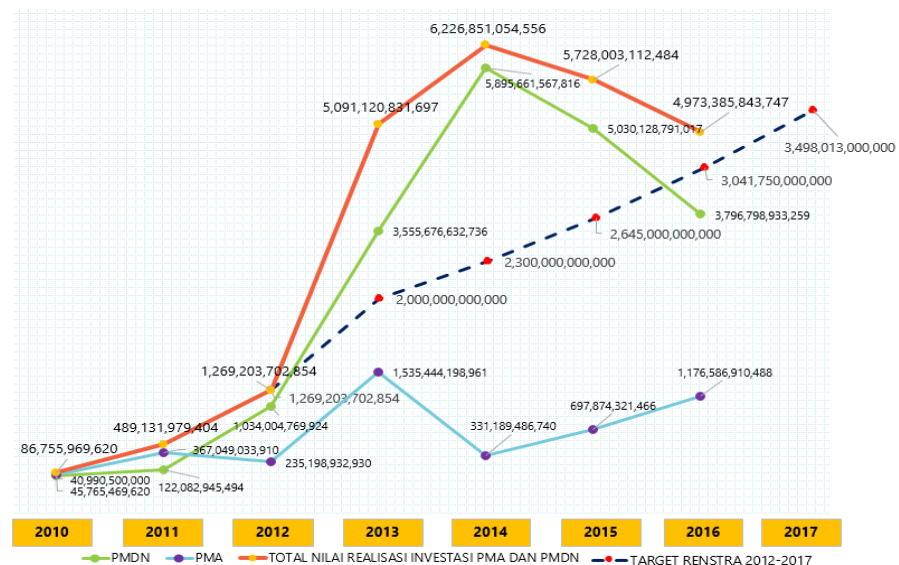
Sedangkan realisasi investasi menurut pencatatan SPIPISE (secara online) adalah sebesar Rp 2,53 Triliun. Kondisi ini menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan realisasi terbesar peringkat 18 untuk PMDN dan 29 untuk PMA. Sementara target realisasi investasi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Investasi dan Promosi Aceh pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 3,04 Triliun. Realisasi investasi sampai dengan triwulan IV tahun 2016 telah melampaui sebesar 163,50 persen dari target tahun ini.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi porsi realisasi investasi Provinsi Aceh tahun 2016 yang ditetapkan Badan Investasi dan Promosi Aceh mencapai 124,82 persen dengan nilai Rp 3.796.798.933.259,- dari target jumlah nilai realisasi investasi yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar Rp 3.041.750.000.000,-. Penanaman Modal Asing (PMA) pencapaian nilai target realisasi investasi tercatat diangka Rp 1.176.586.910.488,- atau mengisi capaian target realisasi investasi Aceh tahun 2016 sebesar 38,68 persen.

Capaian realisasi investasi tiap tahun diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh.

Perkembangan yang terjadi pada tahun 2015 dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya serta posisi relatif pencapaian target lima tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 pada tahun keempat tertera sebagaimana grafik 3.14 berikut.

Grafik 3.14
Perkembangan Realisasi Investasi di Aceh
Tahun 2010-2016 dibandingkan dengan Target RPJMA
2012-2017



Realisasi investasi yang terus mengalami peningkatan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Untuk terus meningkatkan nilai realisasi investasi, Pemerintah Aceh

telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.874.243.100,-, dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 438.680.000,-.

- **Indikator kinerja "Rasio Daya Serap Tenaga Kerja" yang ditargetkan 1:160 dapat direalisasikan 1:74 dengan persentase capaian 46,25% dengan Kategori Kurang.**

Seiring dengan adanya peningkatan nilai investasi, telah membawa dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa terjadi serapan tenaga sebanyak 28.693 orang untuk serapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 61 orang, pada perusahaan/proyek PMA maupun PMDN yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

Rasio tenaga kerja tahun 2016 adalah sebesar 1:74. Capaian realisasi ini hanya 46,25% dari target yang direncanakan dalam RPJMA tahun 2012-2017 untuk tahun yang sama. Begitu pula, terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang memiliki rasio 1:151. Secara keseluruhan, capaian tahun 2016 telah mampu memenuhi 78,72% target akhir RPJMA 2012-2017.

Tabel 3.27
Jumlah serapan tenaga kerja yang bekerja pada sektor
penanaman modal periode 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
PMA	6.418 org	5.441 org	6.333 org	5.232 org	28.693 org
PMDN	17.364 org	16.376 org	14.705 org	26.493 org	61 org
Jumlah	23.782 org	21.817 org	21.038 org	31.725 org	28.754 org

Sumber : Badan Investasi dan Promosi Aceh, Desember 2016

Dari tabel di atas, dapat dilihat tenaga kerja yang terserap pada perusahaan/proyek PMA maupun PMDN mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2016.

Tenaga kerja yang terserap pada perusahaan/Proyek PMA pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga mencapai 28.754 orang dari tahun 2015 yang mencapai 31.725 orang. Hal ini disebabkan antara lain oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu tinggi, dipengaruhi banyaknya tenaga kerja yang lebih memilih pindah kerja ke perusahaan/Proyek PMDN karena dinilai memiliki tekanan kerja yang lebih rendah, serta adanya peralihan teknologi.

Serapan tenaga kerja pada sektor penanaman modal di Aceh terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2012, jumlah serapan tenaga kerja sebanyak 23.782 orang, jumlah ini meningkat pada tahun 2016 hingga mencapai 28.754 orang. Peningkatan ini tidak terlepas dari upaya dilakukan Pemerintah Aceh untuk menciptakan iklim investasi yang menarik minat investor dibarengi dengan peningkatan penyaluran kredit juga menjadi alasan meningkatnya serapan tenaga kerja pada Perusahaan/Proyek PMDN.



Sasaran Strategis-5 : Meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.28 di bawah ini :

Tabel 3.28
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Kontribusi Pajak Aceh terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA)*	60%	61,65%	102,75	Sangat Baik
2	Persentase Kontribusi Zakat terhadap PAA	1,5%	1,77%	118,00	Sangat Baik
3	Persentase Kontribusi PAA terhadap APBA	15%	16,77%	111,80	Sangat Baik
Rata-rata tingkat capaian				110,85	Sangat Baik

Berdasarkan sasaran strategis "*Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh (PAA)*" diperoleh tingkat capaian rata-rata sebesar **110,85%** atau tergolong **Sangat Baik**. Perolehan kategori sangat baik tersebut didukung oleh tingkat capaian setiap indikator, yaitu;

- **Indikator Kinerja "*Persentase Kontribusi Pajak Aceh terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA)*" yang ditargetkan sebesar 60% mampu direalisasikan sebesar 61,65% dengan persentase capaian 102,75% dan kategori Sangat Baik.**

Jumlah Pendapatan Asli Aceh pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 1,92 triliun. Pada akhir tahun 2016, realisasi atas pencapaian Pendapatan Asli Aceh telah mencapai sebesar Rp. 2.031.997.964.906,73 atau mengalami peningkatan

sebesar 5,73% bila dibandingkan dengan capaian realisasi Pendapatan Asli Aceh pada tahun 2015 yang mencapai sebesar Rp. 1.921.849.656.785,74.

Jumlah penerimaan pajak Aceh tahun 2016 mencapai Rp. 1.252.745.084.804, jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 1.172.602.775.787,00 atau meningkat sebesar 6,83%. Berikut perbandingan Peningkatan Pendapatan Asli Aceh tahun 2012-2016 :

Tabel 3.29
Kontribusi Pajak Aceh Terhadap Pendapatan Asli Aceh
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pajak Aceh	687 Milyar	752 Milyar	1.03 Triliun	1.17 Triliun	1,25 Triliun
Jumlah PAA	901 Milyar	1,32 Triliun	1,24 Triliun	1,92 Triliun	2,03 Triliun
Persentase kontribusi	76,24%	56,80%	83,16%	61,62%	61,65%

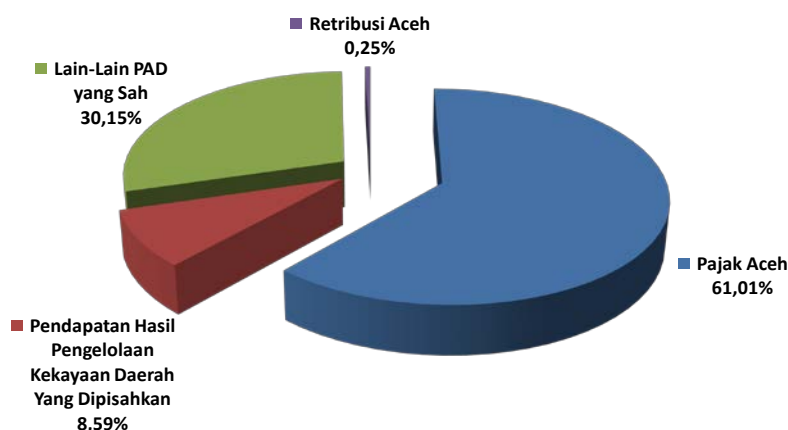
Sumber : Dinas Keuangan Aceh, Januari 2017 (data diolah)

Dalam kurun waktu 2012 sampai 2016, persentase kontribusi Pajak Aceh mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 kontribusi pajak Aceh mengalami penurunan sebesar 19,44%, pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan terbesar dalam periode tersebut yaitu sebesar 26,36% hingga menyentuh angka 83,16%, pada tahun 2015 kembali menurun sebesar 14,84%. Namun, pada tahun 2016 kembali mengalami sedikit kenaikan hingga mencapai 61,65%.

Namun demikian, dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, sejak tahun 2012 sampai 2016 Pemerintah Aceh telah berhasil meningkatkan PAA-nya dari sekitar Rp. 900 miliar menjadi Rp2,03 Triliun. Hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi Pemerintah Aceh yang telah mampu mengelola potensi PAA secara optimal. Pada tahun-tahun

mendatang Pemerintah Aceh akan terus berusaha untuk meningkatkan PAA dengan menggali potensi-potensi yang ada melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAA agar secara bertahap mampu meningkatkan kontribusi PAA terhadap APBA. Pencapaian kinerja ini dicapai Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.526.005.400,-.

Grafik 3.15
Kontribusi Setiap Komponen Terhadap PAA Tahun 2016



- **Indikator Kinerja "Persentase kontribusi Zakat terhadap PAA" yang ditargetkan sebesar 1,5% mampu direalisasikan sebesar 1,77% dengan persentase tingkat capaian sebesar 118% dan kategori *Sangat Baik*.**

Sebagai salah satu daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki kewenangan yang tidak dimiliki daerah lain. Salah satunya dalam hal pengelolaan zakat yang merupakan salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Aceh.

Optimalisasi peningkatan penerimaan Zakat pada Tahun 2016 antara lain melalui upaya peningkatan kesadaran muzakki, serta pemberlakuan sistem pemotongan langsung terhadap seluruh pendapatan PNS di lingkungan Pemerintah Aceh dan PNS lembaga vertikal yang berada di Aceh, selain adanya peningkatan muzakki untuk membayar zakatnya ke Baitul Mal Aceh.

Berdasarkan upaya dan langkah strategis di atas, penerimaan zakat setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan terutama dalam empat tahun terakhir, pada tahun 2012, sebesar Rp. 10.277.631.819,82, tahun 2013 sebesar Rp. 11.385.431.670,29, dan pada tahun 2014 penerimaan zakat mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 25.176.003.088,25, pada tahun 2015 penerimaan Zakat di Aceh mencapai Rp 27.312.498.281,50 serta di tahun 2016 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga menyentuh angka Rp.35.970.836.357,00.

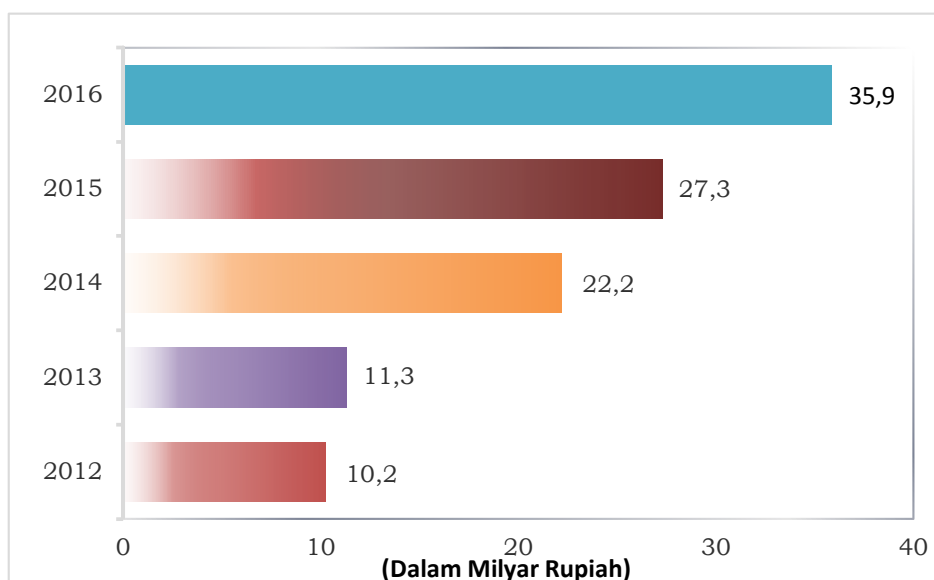
Berikut jumlah penerimaan zakat di Aceh periode 2012-2016 :

Tabel 3.30
Jumlah Penerimaan Zakat di Aceh
periode tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penerimaan Zakat	10,2 Milyar	11,3 Milyar	25,2 Milyar	27,3 Milyar	35,97 Milyar

Sumber : Baitul Mal Aceh, Januari 2017

Grafik 3.16
Jumlah Penerimaan Zakat di Aceh
Tahun 2012-2016



Perbandingan penerimaan zakat dan Pendapatan Asli Aceh periode tahun 2012-2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.31
Kontribusi Zakat Terhadap Pendapatan Asli Aceh
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Zakat	10.28 M	11.38 M	25.18 M	27.31M	35,9 M
Jumlah PAA	901 M	1.32 T	1.24 T	1.92 T	2,03 T
Persentase kontribusi	1,14%	0,86%	2,03%	1,42%	1,77%

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, Januari 2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Kontribusi Zakat terhadap PAA di Aceh menunjukkan kenaikan yang signifikan, hingga tahun 2016 mencapai 1,77% dari jumlah penerimaan Pendapatan Asli Aceh.

- **Indikator Kinerja Persentase Kontribusi PAA terhadap APBA yang ditargetkan 15%, dapat terealisasi sebesar 16,77% dengan persentase Capaian sebesar 158,20% kategori Sangat Baik.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan daerah dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam 4 (empat) tahun terakhir, kontribusi Pendapat Asli Aceh (PAA) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mengalami dinamika fluktuatif. Pada Tahun 2013, kontribusi PAA terhadap APBA mencapai 11,82%. Nilai persentase tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 yang hanya mencapai 10,29%. Pada tahun 2015 persentase kontribusi PAA terhadap APBA kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 15,82% dan sampai dengan akhir desember tahun 2016, kontribusi PAA terhadap APBA kembali naik hingga mencapai 16,77%.

Perkembangan kontribusi PAA terhadap APBA dari tahun 2012-2016 sebagaimana tertera dalam tabel 3.32 di berikut ini :

Tabel 3.32
Perkembangan Kontribusi PAA terhadap APBA
tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah PAA	Jumlah APBA	Persentase Kontribusi PAA terhadap APBA
2012	901.720.376.620,63	8.757.321.935.052,00	10,32%
2013	1.325.435.091.289,19	11.217.741.311.905,40	11,82%
2014	1.239.436.768.042,34	12.045.847.341.692,80	10,29%
2015	1.921.849.656.785,74	12.149.422.255.379,70	15,82%
2016	2.031.997.964.906,73	12.119.713.196.647,10	16,77%

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, Januari 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel 3.32, persentase Kontribusi PAA terhadap APBA secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.17
persentase Kontribusi PAA terhadap APBA
Tahun 2012-2016 :

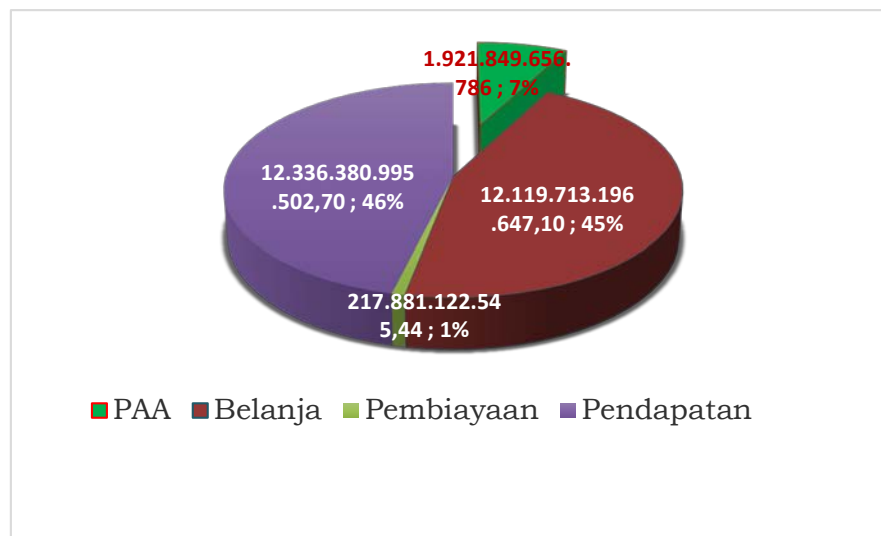


Untuk meningkatkan penerimaan PAA dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBA, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa langkah di antaranya peningkatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMA, penerimaan dari Badan/dinas-dinas

dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan bagi hasil bukan pajak yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Kontribusi PAA dari APBA secara grafik 3.18 dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.18
Kontribusi PAA terhadap APBA





Sasaran Strategis-6

Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka Aceh dan Angka Kemiskinan dengan Perbaikan Pendapatan dan Pemberdayaan Kemandirian melalui Perluasan Lapangan Usaha

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.33 di bawah ini :

Tabel 3.33
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Persentase angka pengangguran terbuka*	6,8%	7,57%	88,68	Baik
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,83%	64,26%	89,46	Baik
3	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	11,5%	16,43%	57,13	Cukup
4	Persentase Penanganan PMKS	60%	36,69%	61,15	Cukup
5	Persentase Koperasi Aktif	57,79%	67,33 %	116,51	Sangat Baik
6	Jumlah Penyaluran Kredit untuk UMKM	22,66 T	11,34 T	50,04	Kurang
Rata-rata tingkat capaian				77,16	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 6 (enam) indikator kinerja dari sasaran strategis "Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka Aceh dan Angka Kemiskinan dengan Perbaikan Pendapatan dan Pemberdayaan Kemandirian melalui Perluasan Lapangan Usaha" diperoleh rata-rata capaian sebesar **77,16%** atau tergolong **Baik**. Hasil pencapaian sasaran strategis menjadi acuan Pemerintah Aceh dalam menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 14,9-11,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka diturunkan menjadi sekitar 8,2-6,8 persen, yang merupakan salah satu sasaran utama pembangunan Aceh tahun 2015.

Hasil pengukuran serta Analisis pencapaian kinerja setiap indikator, dalam mengukur keberhasilan Pemerintah Aceh untuk terus menekan angka pengangguran dapat dijelaskan sebagai berikut :

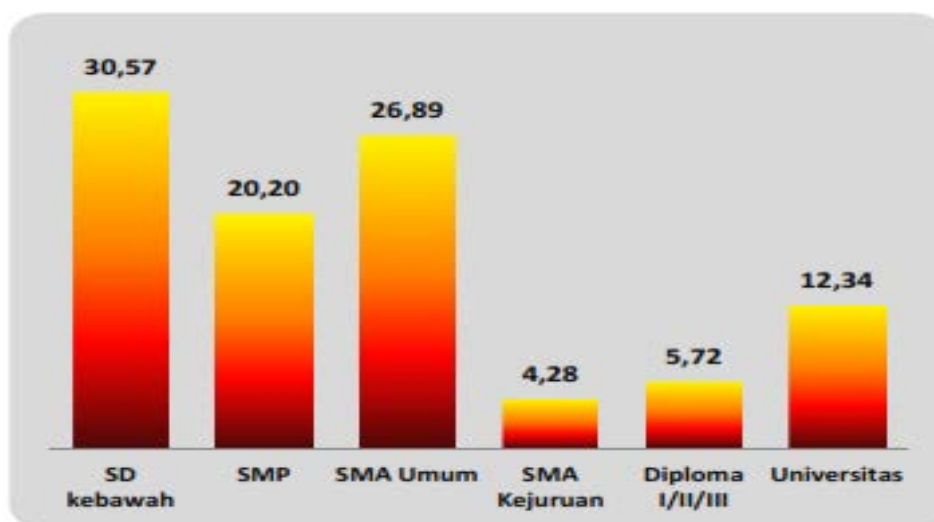
- **Indikator kinerja "Persentase Angka Pengangguran Terbuka" yang ditargetkan 6,8% hingga agustus 2016 hanya mampu ditekan pada angka 7,57% dengan persentase tingkat capaian sebesar 88,68% atau dengan kategori Baik.**

Perkembangan ketenagakerjaan saat ini ditandai dengan tingginya jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Tingkat pengangguran Aceh pada agustus 2016 mencapai 7,57%, lebih rendah 0,56 persen dari TPT bulan Februari 2016 (8,13 persen) dan juga lebih rendah 2,36 persen dari TPT bulan Agustus 2015 (9,93 persen).

Pada Agustus 2016, jumlah penduduk yang bekerja menurut pendidikan tertinggi setingkat SD ke bawah merupakan yang paling banyak dibandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebanyak 638 ribu orang (30,57 persen) diikuti tingkat pendidikan SMA Umum sebanyak 561 ribu orang (26,89 persen), kemudian tingkat pendidikan SMP sebanyak 422 ribu orang (20,20 persen), lalu tingkat universitas 20,20 sebanyak 258 (12,34 persen), diploma sebanyak 119 ribu orang (5,72 persen) dan terakhir tingkat pendidikan SMA Kejuruan sebanyak 89 ribu orang (4,28 persen). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Aceh masih didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah yaitu setingkat SD ke bawah.

Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar tenaga kerja di Aceh masih didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah yaitu setingkat SD ke bawah, hal ini dapat dilihat dari grafik 3.19 di bawah ini :

Grafik 3.19
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan
Provinsi Aceh, Agustus 2016



Hal ini disebabkan antara lain tingginya arus urbanisasi, terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, dan masih rendahnya keahlian dan keterampilan pencari kerja sehingga sangat menyulitkan dalam mendapatkan kesempatan kerja serta masih minimnya investasi di Aceh.

Perbandingan Persentase Angka Pengangguran Terbuka dalam 5 (lima) tahun terakhir di Aceh sebagaimana tertera dalam tabel 3.34 di bawah ini :

Tabel 3.34
Persentase Angka Pengangguran Terbuka.

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
Persentase Angka Pengangguran Terbuka	9,10%	10,30%	9,02%	9,93%	7,57%

Sumber data : BPS Aceh, Januari 2017

Dari tabel 3.34, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Aceh cenderung bertahan pada angka 9,1%. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 10,30%. Tingginya pengangguran pada tahun 2013 lebih disebabkan belum seimbangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dan banyaknya masyarakat yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan, sehingga penduduk di kota meningkat dan menimbulkan banyak tenaga kerja yang tidak terserap lapangan pekerjaan serta tingginya pengangguran terdidik yang bergelar sarjana.

Dari berbagai langkah dan upaya strategis yang dilaksanakan Pemerintah Aceh, pada tahun 2014 angka pengangguran dapat ditekan menjadi 9,02% dan pada tahun 2015, angka tersebut sedikit mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 9,93% dan pada tahun 2016, angka pengangguran di Aceh berhasil diturunkan hingga mencapai angka 7,57%.

- **Indikator kinerja “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja” yang ditargetkan sebesar 71,83% dapat direalisasikan sebesar 64,26% dengan persentase tingkat capaian sebesar 89,46% atau dengan kategori Baik.**

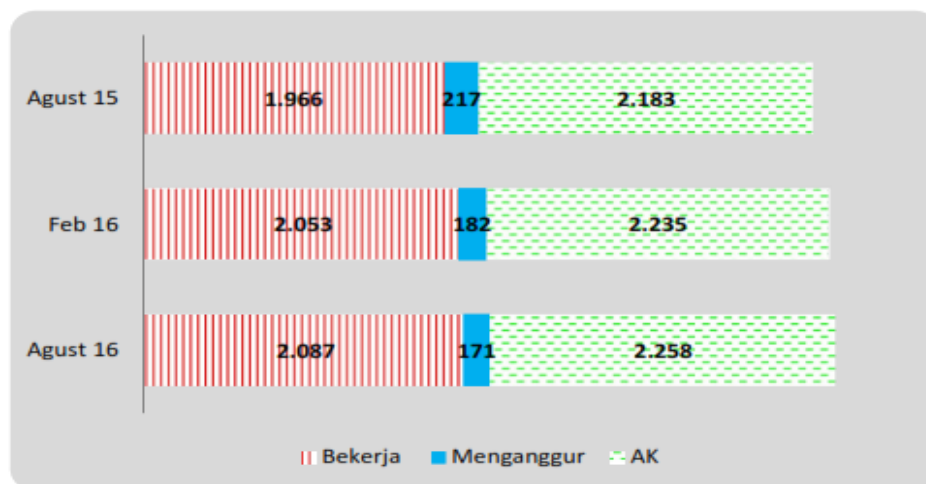
Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh pada Agustus 2016 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh pada Agustus 2016 mencapai 2,258 juta orang, bertambah sekitar 75 ribu orang dibanding Agustus 2015 sebesar 2,183 juta orang. Penduduk yang bekerja di Provinsi Aceh pada Agustus 2016 mencapai 2,087 juta orang, bertambah

sekitar 121 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2015 sebesar 1,966 juta orang.

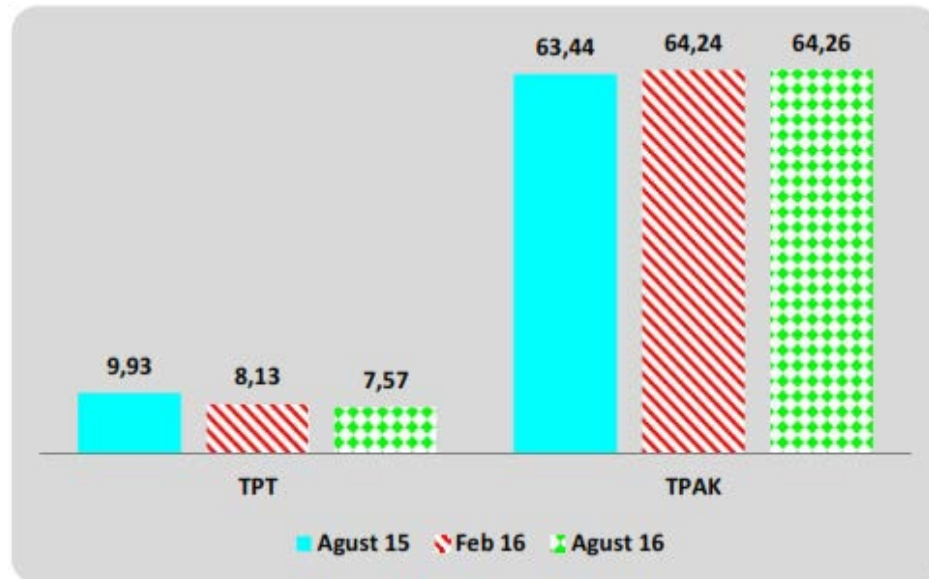
Penganggur pada Agustus 2016 sebanyak 171 ribu mengalami penurunan sekitar 46 ribu orang dibandingkan keadaan Agustus 2015 sebesar 217 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Agustus 2016 mencapai 7,57 persen, lebih rendah 2,36 persen dari TPT bulan Agustus 2015 sebesar 9,93 persen.

Selama periode tahun 2015 sampai 2016 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah angkatan kerja yang meningkat dapat diserap dengan baik oleh pasar tenaga kerja sehingga terjadi peningkatan penduduk yang bekerja, sebaliknya jumlah penduduk yang menganggur menurun. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2016 lebih rendah jika dibandingkan dengan Agustus 2015.

Gambar 3.4
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja
dan Pengangguran Provinsi Aceh, 2015-2016
(dalam ribuan)

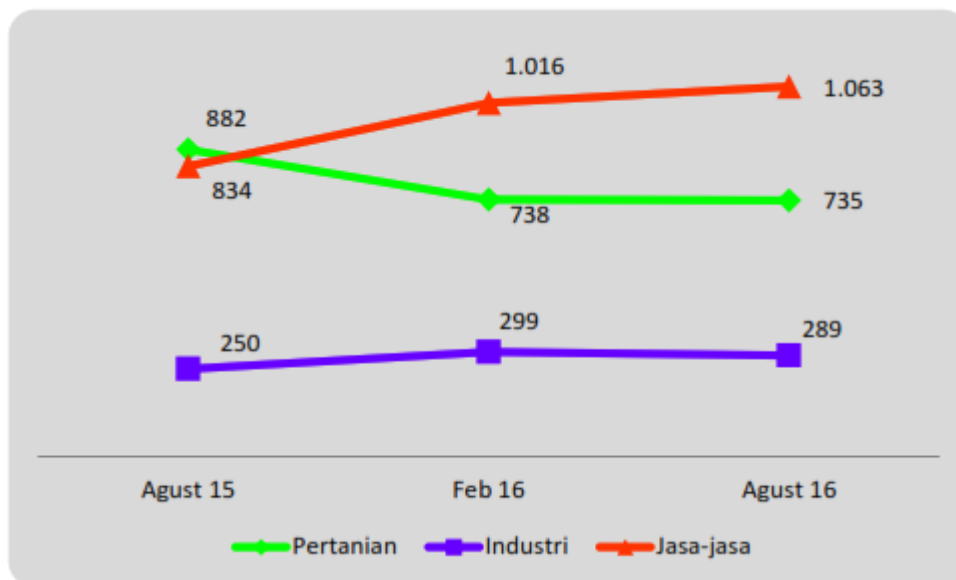


Gambar 3.5
Perkembangan TPT dan TPAK Provinsi Aceh 2015-2016



Keadaan penduduk yang bekerja pada Agustus 2016 menurut lapangan pekerjaan utama sedikit berbeda dibanding keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Penduduk yang bekerja di sektor Jasa-jasa mencapai 1,063 juta orang atau sekitar 50,93 persen, jumlah tersebut paling besar dibanding dua sektor lainnya. Sektor industri juga menunjukkan tren meningkat, dari sebanyak 250 orang pada Agustus 2015, menjadi sebanyak 289 ribu orang pada Agustus 2016. Sedangkan sektor pertanian yang biasanya menyerap tenaga kerja terbanyak mengalami penurunan sebanyak 147 ribu orang, dari 882 ribu orang Agustus 2015, menjadi hanya 735 ribu orang pada Agustus 2016.

Gambar 3.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Provinsi Aceh Tahun 2015-2016



Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja di Aceh dari tahun 2012 s.d 2016 sebagaimana tabel 3.35 di bawah ini :

Tabel 3.35
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Capaian
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,86%	62,07%	63,06%	63,44%	71,83%	64,26%

Sumber data : BPS Aceh , Januari 2017

- **Indikator kinerja “Persentase Penduduk di bawah garis Kemiskinan” yang ditargetkan sebesar 11,50% dapat direalisasikan sebesar 16,43% dengan persentase tingkat capaian sebesar 57,13% atau dengan kategori Cukup.**

Angkat kemiskinan Aceh tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015. Jumlah penduduk miskin di Aceh pada 2016 mencapai 841,31 ribu orang,

atau 16,43 persen dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 17,11 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada Maret 2016, selama periode tersebut terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 7,13 ribu orang. Sementara apabila dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, penurunan jumlah penduduk miskin yaitu sebanyak 18,10 ribu orang. Namun kemiskinan di Aceh pada tahun 2016 masih jauh lebih tinggi bila dibandingkan angka kemiskinan secara nasional yang sebesar 10,70 persen.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2016 sampai dengan September 2016, persentase penduduk miskin mengalami penurunan di daerah perkotaan sebesar 0,03 persen, dan 0,35 persen di daerah perdesaan.

Tabel 3.36

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Menurut Daerah, 2014 - 2016

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2014	161,94	11,76
September 2014	158,04	11,36
Maret 2015	157,57	11,13
September 2015	155,81	10,92
Maret 2016	159,50	10,82
September 2016	163,02	10,79
Perdesaan		
Maret 2014	719,31	20,52
September 2014	679,38	19,19
Maret 2015	694,01	19,44
September 2015	703,60	19,56
Maret 2016	688,94	19,11
September 2016	678,29	18,80
Kota+Desa		
Maret 2014	881,25	18,05
September 2014	837,42	16,98
Maret 2015	851,59	17,08
September 2015	859,41	17,11
Maret 2016	848,44	16,73
September 2016	841,31	16,43

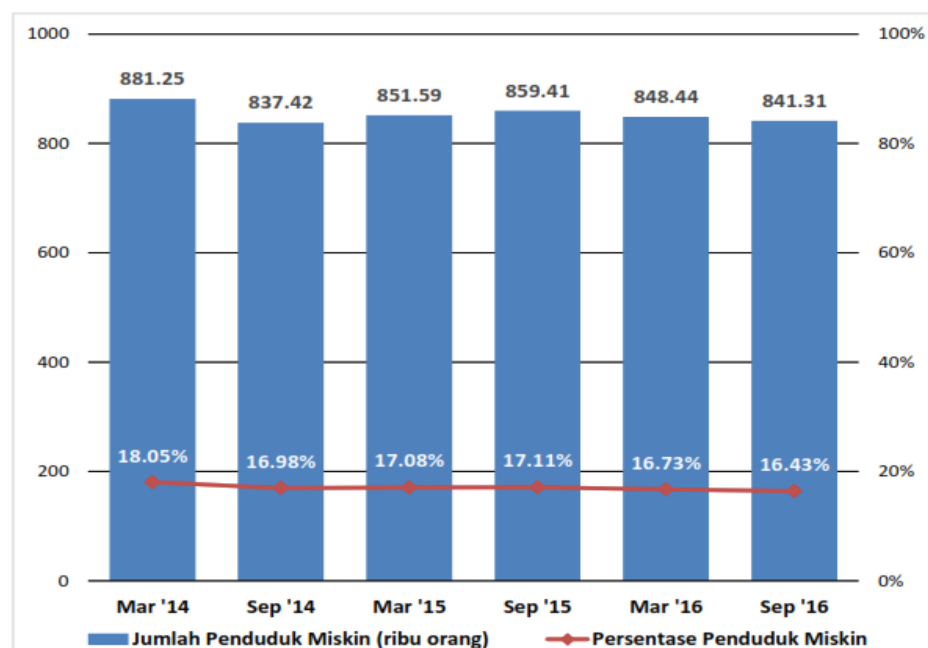
Sumber: Susenas 2014-2016

Selama periode tahun 2014 sampai dengan 2016, persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan. Pada Maret 2014 persentase penduduk miskin sebesar 18,05 persen atau sebanyak 881,25 ribu orang, kemudian pada September 2014 berkurang menjadi 16,98 persen.

Pada periode berikutnya persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 17,08 persen di Maret 2015, dan 17,11 persen di September 2015. Selanjutnya persentase tersebut menurun pada Maret 2016 menjadi 16,73 persen, dan September 2016 menjadi 16,43 persen atau 841,31 ribu orang.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh periode 2014 sampai dengan 2016 dapat diuraikan pada Grafik di bawah ini:

Grafik 3.20
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, 2014-2016



Selama periode tahun 2013 sampai dengan 2016 jumlah penduduk miskin di Aceh berfluktuasi. Pada Maret 2013 jumlah penduduk miskin mencapai 842,42 ribu orang (17,60%) kemudian naik hingga 881,26 ribu orang (18,05%) pada Maret 2014 dan mencapai level terendah pada September 2014 yaitu sebanyak 837,42 ribu orang (16,98%) tetapi pada bulan Maret 2015 jumlah itu kembali meningkat menjadi 851,59 ribu orang (17,08%) dan 859,41 ribu orang (17,11%) September 2015. Pada September 2016, persentase penduduk miskin kembali mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 16,43% atau 841,31 ribu orang.

Kondisi tingginya angka kemiskinan ini merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh yang masih terjerat dengan persoalan kemiskinan.

- **Indikator kinerja “Persentase Penanganan PMKS” yang ditargetkan sebesar 60% dapat direalisasikan sebesar 39,69% dengan persentase tingkat capaian sebesar 61,15% atau dengan kategori *Cukup*.**

Permasalahan sosial yang terjadi di Provinsi Aceh semakin hari semakin kompleks, keadaan ini terjadi karena akumulasi dari pertumbuhan alamiah, akibat krisis ekonomi berkepanjangan dan adanya dampak dari peristiwa-peristiwa lainnya termasuk konflik bersenjata dan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami. Kompleksitas permasalahan sosial tersebut menuntut program penanganan yang luas (terpadu) dan beragam (multi sektor) sehingga menuntut adanya pelayanan publik

yang prima dari Pemerintah Aceh dalam menangani permasalahan sosial yang ada sesuai dengan tuntutan berkembangannya sosial kemanusiaan yang semakin transparan dewasa ini.

Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan Pemerintah Aceh mencakup dua jenis pelayanan yaitu :

1. Sistem Panti Sosial; dalam rangka memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial warga binaan sosial ditampung di panti sosial (warga binaan sosial berpisah dengan keluarga) ditampung dan diasramakan.
2. Sistem Non Panti Sosial; dalam rangka memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial warga binaan sosial tetap tinggal dalam keluarga.

Hingga tahun 2016, jumlah PMKS di Aceh mencapai 647.178 jiwa. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka tersebut, antara lain melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.513.906.092,-, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.563.135.562,-, Program Pembinaan Anak Terlantar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.780.374.000,-, Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma dengan alokasi anggaran sebesar RP.1.307.110.000,-, Program Panti Asuhan/Panti Jompo dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.011.673.597,- Program

Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba, Dan Penyakit Sosial lainnya) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.616.970.000,- dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran Rp. 16.641.400.000,-.

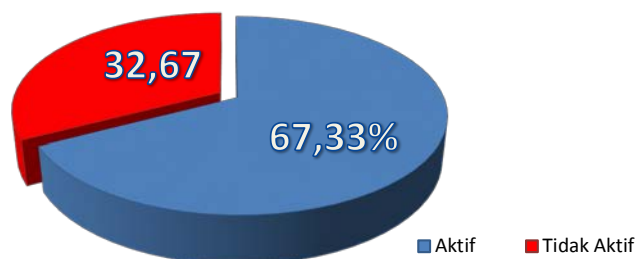
- **Indikator kinerja “Persentase Koperasi Aktif” yang ditargetkan sebesar 57,79% dapat direalisasikan sebesar 67,33% dengan persentase tingkat capaian sebesar 116,10% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Hingga tahun 2015, jumlah koperasi di Aceh sebanyak 6.883 unit, di mana yang Aktif sebesar 63,29 persen, sementara sisanya 36,71 persen tidak aktif. Di tahun 2016 angka ini mengalami peningkatan sebanyak 7.184 unit, dengan persentase koperasi aktif sebesar 67,33 persen dan 32,67 persen tidak aktif.

Optimalnya tingkat capaian ini merupakan bukti kongkret Pemerintah Aceh dalam membina koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat. hingga tahun 2015, jumlah koperasi di Aceh sebanyak 6.883 unit, di mana yang Aktif sebesar 63,29 persen, sementara sisanya 36,71 persen tidak aktif. Di tahun 2016 angka ini mengalami peningkatan sebanyak 7.184, dengan persentase koperasi aktif sebesar 67,33 persen dan 32,67 persen tidak aktif.

Grafik 3.21

Persentase Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Desember 2016



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Aceh (diolah)

Untuk terus meningkatkan jumlah koperasi aktif di Aceh, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa langkah strategis melalui berbagai program dan kegiatan, diantaranya program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 79.255.896.193,-.

- **Indikator kinerja “Jumlah Penyaluran Kredit untuk UMKM” yang ditargetkan sebesar 22,66 Triliun dapat direalisasikan sebesar 11,34 Triliun dengan persentase tingkat capaian sebesar 50,05% atau dengan kategori Kurang.**

Pada tahun 2015 penyaluran kredit sebesar 27,227 triliun bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 58,35 % hal ini disebabkan oleh banyaknya para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang beralih ke kredit usaha rakyat (KUR) karena suku bunga cuma 9% karena adanya subsidi dari pemerintah, sehingga pada indikator ini tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan. sehingga sasaran

terwujudnya Akses Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM tidak memperlihatkan kinerja yang maksimal.

Penyaluran kredit paling besar terjadi pada tahun 2012. Sementara tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah penyaluran kredit kepada UMKM cenderung lebih sedikit.

Jumlah penyaluran kredit untuk UMKM pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 27,2 T dan tahun 2014 yang mencapai 22,83 Triliun. Berikut Perkembangan penyaluran kredit UMKM di Aceh periode 2014-2016, sebagaimana tertera pada tabel 3.37 berikut ini :

Tabel 3.37
Perkembangan penyaluran kredit UMKM di Aceh
periode 2014-2016

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Jumlah Penyaluran Kredit untuk UMKM	22,8 Triliun	27,2 Triliun	11,34 Triliun

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Desember 2016



**Sasaran
Strategis-7**

***Tercapainya Tujuan Pembangunan
Milenium (MDGs) Bidang Pendidikan
pada tahun 2015.***

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.38 di bawah ini :

Tabel 3.38

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Angka partisipasi murni: *				
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,60%	95,55%	96,91	Baik
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80,50%	82,21%	102,12	Sangat Baik
	c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/ Paket C	74,50%	67,22%	90,23	Baik
2	Angka pendidikan yang ditamatkan*				
	a. Tamat SD/ sederajat	21%	20,85%	99,29	Baik
	b. Tamat SMP/ sederajat	17%	24,29%	142,88	Sangat Baik
	c. SMA/ sederajat	32%	35,52%	111,00	Sangat Baik
3	Angka melek huruf dewasa *	97,8%	97,63%	99,83	Baik
Rata-rata tingkat capaian				106,04	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran sasaran strategis ”Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Pendidikan pada tahun 2015” yang diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dapat diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **106,04%** atau dengan kategori **Sangat Baik**.

Tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini diukur berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja dan 6 (enam) sub indikator kinerja yang analisis setiap indikator tersebut sebagai berikut :

- **Indikator kinerja "Angka Partisipasi Murni" yang ditargetkan 84,53% dapat direalisasikan sebesar 81,66% dengan persentase tingkat capaian sebesar 96,60% atau dengan kategori Baik.**

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun.

Tingkat capaian kinerja indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua tingkatan pendidikan di Aceh sebagai berikut :

- a) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A yang ditargetkan sebesar 98,60% dapat direalisasikan sebesar 95,55% dengan persentase tingkat capaian sebesar 96,91 atau predikat Baik. Capaian Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI/Paket A tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang hanya mencapai 92,50%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A tahun 2016 yang mencapai 95,55% masih berada jauh dari target yang ditetapkan pada akhir pembangunan jangka menengah Aceh yaitu sebesar 99,08%.
- b) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yang ditargetkan sebesar 80,50% dapat direalisasikan sebesar 82,21% dengan persentase tingkat capaian sebesar 102,12% atau kategori Sangat Baik. Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B tahun 2016

mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 80,90%.

Capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 82,21% tahun 2016 masih belum mencapai target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMA 2012-2017 yaitu sebesar 90,02%.

- c) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C yang ditargetkan sebesar 74,50 mampu direalisasikan sebesar 67,22% dengan persentase tingkat capaian sebesar 90,23% atau kategori Baik. Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2016 juga mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 62,22%.

Capaian kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 67,22% tahun 2016 masih berada jauh dari target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMA 2012-2017 yaitu sebesar 77,5%.

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Selain jumlah penduduk yang besar, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan adalah relatif besarnya disparitas ketersediaan sarana pendidikan. Di satu pihak, di wilayah perkotaan umumnya memiliki sekolah yang berkualitas dengan biaya pendidikan yang relatif mahal dan dikelola secara mandiri. Dipihak lain, beberapa daerah masih terfokus pada peningkatan cakupan, atau masih berkuat pada peningkatan kualitas.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Aceh dari Tahun 2012 – 2016 sebagaimana tertera dalam tabel 3.39 di bawah ini :

Tabel 3.39
Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Aceh
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka Partisipasi Murni :					
a. SD/MI/Paket A	91,66%	90,54%	97,09%	92,50%	95,55%
b. SMP/MTs/Paket B	71,11 %	72,43%	82,57%	80,06%	82,21%
c. SMA/SMK/MA Paket C	58,34%	59,50%	63,43%	62,06%	67,22%

Sumber : Dinas Pendidikan Aceh, Desember 2016

- **Indikator kinerja "Angka Pendidikan yang ditamatkan" yang ditargetkan 23,33% dapat direalisasikan sebesar 23,28% dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,79% atau dengan kategori Baik.**

Perolehan tingkat capaian dengan kategori baik terhadap Angka Pendidikan Yang Ditamatkan merupakan akumulasi dari hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) tingkatan pendidikan, dengan uraian sebagai berikut :

- Tamat SD/Sederajat yang ditargetkan sebesar 21% mampu direalisasikan sebesar 20,85% dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,29%. Pencapaian angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SD/ sederajat pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 26,5%.
- Tamat SMP/Sederajat yang ditargetkan sebesar 17% dapat direalisasikan sebesar 24,29% dengan tingkat capaian sebesar 142,88% dan berkategori Sangat Baik. Pencapaian atas angka pendidikan yang ditamatkan tingkat SMP/ sederajat pada tahun 2016 ini mengalami

kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang hanya mencapai 20,43%.

- c) Tamat SMA/Sederajat yang ditargetkan sebesar 32% mampu direalisasikan sebesar 35,52% dengan persentase tingkat capaian sebesar 111,00% dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian angka pendidikan yang ditamatkan pada tingkat SMA/ sederajat tahun 2016 juga mengalami peningkatan yang signifikan bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 yang hanya mencapai 26,15%.

Pencapaian atas indikator angka pendidikan yang ditamatkan di Aceh pada tahun 2016 telah menunjukkan hasil yang optimal. Ini merupakan bukti nyata Pemerintah Aceh dalam memajukan pendidikan pada semua jenjang pendidikan di Aceh.

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan di Aceh menurut jenjang pendidikan dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 sebagaimana tertera pada tabel 3.40 di bawah ini :

Tabel 3.40
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka Pendidikan yang ditamatkan :					
a. Tamat SD/ sederajat	27,55	24,27	27,73	26,5	20,85
b. Tamat SMP/ sederajat	21,32	22,50	20,10	20,43	24,29
c. Tamat SMA	23,8	27,97	25,34	26,15	35,52

Sumber : Dinas Pendidikan Aceh, Desember 2016

- **Indikator kinerja "Angka Melek Huruf Dewasa" yang ditargetkan 97,8% dapat direalisasikan sebesar 97,63% dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,83% atau dengan kategori Baik.**

Literasi atau melek huruf merupakan modal penduduk dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dengan kemampuan membacanya. Penduduk yang memiliki literasi usia 15 tahun keatas. Aceh memiliki tingkat melek huruf tinggi pada tahun 2016 yang mencapai 97,63%, sedangkan sisanya 2,37% masih dalam kategori buta huruf. Persentase angka buta huruf Aceh ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang berada pada posisi 1,75%. Penduduk dalam kategori buta huruf diperkirakan merupakan usia tua yang kurang mendapatkan pelayanan pendidikan dimasa lampau.

Capaian kinerja angka melek huruf pada tahun 2016 yang mencapai 97,63% masih berada dibawah target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMA 2012-2017 yaitu sebesar 98,00%. Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa di Aceh tahun 2012-2016 mengalami tren yang fluktuatif sebagaimana tertera pada tabel 3.41 di bawah ini:

Tabel 3.41
Angka Melek Huruf Dewasa di Aceh
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka melek huruf usia 15-24 tahun	96,06	96,04	96,66	98,25	97,63

Sumber : Dinas Pendidikan, Desember 2016

Berdasarkan tabel 3.41 di atas, angka melek huruf dewasa di Aceh periode 2012-2016 cenderung mengalami tren yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2012 angka melek huruf dewasa mencapai 96,06%. Angka tersebut kembali

turun sebesar 0,02% di tahun 2013. Pada tahun 2014, angka melek huruf dewasa di Aceh kembali mengalami peningkatan sebesar 0,62% hingga mencapai 96,66%. Angka melek huruf pada tahun 2015 kembali menunjukkan kenaikan yang signifikan yang menempati angka 98,25%. Namun, pada tahun 2016 Angka melek huruf di Aceh sedikit mengalami penurunan hingga menempati angka 97,63%.

Kondisi ini merupakan suatu pencapaian atas usaha Pemerintah Aceh dalam memajukan sektor pendidikan baik formal maupun non formal. Pemerintah Aceh akan terus meningkatkan pencapaian ini dengan memfokuskan pada program-program peningkatan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan memberikan jaminan kemudahan akses pendidikan bagi semua lapisan penduduk.



Sasaran Strategis-8

Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.42 di bawah ini :

Tabel 3.42
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Angka rata-rata lama sekolah	11,5 Tahun	13,37 Tahun	116,26	Sangat Baik
2	Angka Partisipasi Kasar :				
	a. SD/MI/Paket A	105%	105,77%	99,27	Baik
	b. SMP/MTS/Paket B	100%	103,39%	96,61	Baik
	c. SMA/MA/Paket C	91%	86,19%	94,71	Baik
3	Angka Putus Sekolah :				
	a. SD/MI	4%	5%	75,00	Cukup
	b. SMP/MTs	12%	12%	100,00	Baik
	c. SMA/SMK/MA	0,10%	0,37%	370,00	Sangat Baik
4	Angka Kelulusan* :				
	a. SD/MI	96%	99%	103,13	Baik
	b. SMP/MTs	96%	98%	102,08	Sangat Baik
	c. SMA/SMK/MA	97%	99%	102,06	Baik
Rata-rata tingkat capaian				125,91	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran dari 4 (empat) indikator kinerja dari sasaran "Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan", diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **125,91%** atau dengan kategori **Sangat Baik**.

- **Indikator kinerja "Angka rata-rata lama sekolah" yang ditargetkan 11,5 Tahun dapat direalisasikan sebesar 13,37 Tahun dengan persentase tingkat capaian sebesar 116,26% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Angka rata-rata lama sekolah di Aceh dalam 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan motivasi masyarakat untuk melanjutkan

sekolah semakin baik. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2016 mencapai 13,37 tahun. Pencapaian angka rata-rata lama sekolah di Aceh pada tahun 2016 sudah mencapai hasil yang menggembirakan, dimana pada tahun 2015 hanya mencapai 11,9 tahun, demikian juga pada tahun 2013, ini angka rata-rata lama sekolah di Aceh hanya berkisar pada 11,9 tahun.

Bila dibandingkan dengan target akhir pembangunan jangka menengah Aceh tahun 2012-2017, angka rata-rata lama sekolah di Aceh pada tahun ini sudah melampaui sebesar 1,87%. Ini merupakan prestasi bagi Pemerintah Aceh dalam memajukan pendidikan di Aceh.

Angka rata-rata lama sekolah di Aceh mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2016. Perkembangan tersebut sebagaimana tertera dalam tabel 3.43 di bawah ini :

Tabel 3.43
Angka rata-rata lama sekolah

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka rata-rata lama sekolah	8,9 tahun	11,99 tahun	12,28 Tahun	11,98 tahun	13,37 tahun

Sumber : Dinas Pendidikan Aceh, Januari 2017

➤ **Indikator kinerja "Angka Partisipasi Kasar" yang ditargetkan 98,67% dapat direalisasikan sebesar 98,45% dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,78% atau dengan kategori Baik.** Baiknya tingkat capaian ini merupakan akumulasi dari 3 (tiga) sub indikator dengan uraian sebagai berikut :

a. Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI yang ditargetkan sebesar 105 % mampu direalisasikan sebesar 105,77% dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,27% atau kategori Baik. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI di Aceh tahun 2016 mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sudah mencapai 102,53%.

Perolehan tingkat capaian angka partisipasi kasar tingkat SD/MI di Aceh sebesar 105,77% pada tahun 2016 masih berada di bawah target pembanguna jangka mengah Aceh tahun 2012-2017 yaitu sebesar 105%. Hingga tahun 2016, angka partisipasi kasar tingkat SD/MI di Aceh telah menempati urutan 9 dari APK SD/MI secara nasional.

- b. Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs yang ditargetkan sebesar 100 % mampu direalisasikan sebesar 103,39% dengan persentase tingkat capaian 96,61 atau kategori Baik. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs di Aceh tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sudah mencapai 101%.

Perolehan Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs di Aceh pada tahun 2016 ini masih berada di bawah target akhir RPJMA 2012-2017 yaitu sebsar 100%. Hingga tahun 2016, angka partisipasi kasar tingkat SMP/MTs di Aceh telah menempati urutan 4 dari APK SMP/MTs secara nasional.

- c. Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMA/SMK/MA yang ditargetkan sebesar 91% mampu direalisasikan sebesar 86,19% dengan persentase tingkat capaian sebesar 94,71% atau kategori Baik. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMA/MA/Paket C di Aceh tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai angka 79,26%.

Perolehan tingkat capaian Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMA/MA/Paket C di Aceh tahun 2016 masih berada di bawah target pembangunan Aceh tahun 2012-2017 yaitu sebesar 93%. Hingga tahun 2016, angka partisipasi kasar tingkat SMA/MA/Paket C di Aceh telah menempati urutan 13 dari APK SMA/MA/Paket C secara nasional.

Perkembangan angka partisipasi kasar di Aceh selama periode 2012-2016 sebagaimana tertera dalam tabel 3.44 di bawah ini :

Tabel 3.44
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar pada semua jenjang Pendidikan di Aceh tahun 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka partisipasi kasar					
a. SD/MI/Paket A	109,20%	108,55%	101,06%	102,53%	105,77%
b. SMP/MTs/Paket B	103,89%	102,55%	101,38%	101%	103,39%
c. SMA/MA/Paket C	84,67%	83,80%	80,03%	79,26%	86,19%

Sumber : Dinas Pendidikan Aceh, Januari 2017

- Indikator kinerja "Angka Putus Sekolah" terdiri dari sub indikator sebagai berikut :
 - a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI ditargetkan 4% mampu terealisasi sebesar 5% dengan persentase tingkat capaian sebesar 75,00%. Pencapaian Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI di Aceh tahun 2016 sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 6%.
Perolehan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI di Aceh pada tahun 2016 ini masih berada di bawah target akhir RPJMA 2012-2017 yaitu sebesar 3%.
 - b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs ditargetkan sebesar 14% dapat direalisasikan sebesar 12% dengan

persentase tingkat capaian sebesar 100%. Pencapaian Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs di Aceh tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 13%.

Perolehan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs di Aceh pada tahun 2016 ini masih berada di bawah target akhir RPJMA 2012-2017 yaitu sebesar 10%.

- c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA ditargetkan sebesar 0,10% dapat direalisasikan sebesar 0,37% dengan persentase tingkat capaian sebesar 370%. Pencapaian Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA tahun 2016 di Aceh mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 0,38%.

Perkembangan angka putus sekolah di Aceh setiap tahun mengalami penurunan, hal ini sebagaimana tertera dalam tabel 3.45 di bawah ini :

Tabel 3.45
Perkembangan Angka Putus Sekolah di Aceh
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka Putus Sekolah					
a. SD/MI	8%	7,80%	6,30%	6%	5%
b. SMP/MTs	17%	16,67%	15,84%	13%	12%
c. SMA/MA	14%	12,07%	11,74%	38%	0,37

Sumber : Dinas Pendidikan Aceh, Januari 2016

- Indikator kinerja "Angka Kelulusan" dengan Sub Indikator yaitu :
- a. Angka Kelulusan SD/MI yang ditargetkan 96% dapat direalisasikan sebesar 99% dengan tingkat capaian sebesar 103,13% dan berkategori Baik. Pencapaian Angka Kelulusan SD/MI pada tahun ini sedikit

- mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 yang mencapai 99,96%.
- b. Angka Kelulusan SMP/MTs yang ditargetkan 96%, mampu direalisasikan sebesar 98% dengan tingkat capaian sebesar 102,08% dan kategori Sangat Baik. Pencapaian Angka Kelulusan SMP/MTs pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 99,95%.
 - c. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA yang ditargetkan 97% mampu direalisasikan sebesar 99% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100% dan berkategori Baik. Pencapaian Angka Kelulusan SMA/SMK/MA pada tahun 2016 juga mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 yang mencapai 102,06%.

Perbandingan angka kelulusan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA di Aceh dalam empat tahun terakhir sebagaimana tertera dalam tabel 3.46 di bawah ini :

Tabel 3.46
Angka Kelulusan Tahun 2012-2016

Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Angka Kelulusan						
a. SD/MI	80,90%	100%	100%	99,96%	96%	99%
b. SMP/MTs	82,88%	98,22%	99,63%	99,95%	96%	98%
c. SMA/MA	83,03%	97,95%	98,62%	99,91%	97%	99%

Sumber : Dinas Pendidikan Aceh, Januari 2015



Sasaran Strategis-9 : ***Tercapainya tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan pada tahun 2015.***

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.47 di bawah ini :

Tabel 3.47
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesembilan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Umur harapan hidup	71,6 tahun	69,9 tahun	97,63	Baik
2	Angka kematian ibu melahirkan*	100/100.000 LH	144/100.000 LH	56,00	Cukup
3	Angka kematian bayi*	12/1000 LH	10/1000 LH	116,67	Sangat Baik
4	Angka kematian anak balita*	25/1000 LH	10/1000 LH	160,00	Sangat Baik
5	Prevalensi gizi kurang dan buruk	14%	16,2%	84,29	Baik
Rata-rata tingkat capaian				102,92	Sangat Baik

Hasil Pengukuran Sasaran Strategis kesembilan sebagaimana pada Tabel 3.47 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tujuan pembangunan milenium (MDGs) bidang kesehatan di Aceh sudah menunjukkan pencapaian yang lebih baik, dengan presentase tingkat capaian rata-rata sebesar 102,92% atau kategori **Sangat Baik**.

Optimalnya tingkat capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh beberapa indikator dengan analisis sebagai berikut :

- **Indikator kinerja "Umur Harapan Hidup" yang ditargetkan 71,6 Tahun dapat direalisasikan 69,9 Tahun dengan persentase tingkat capaian sebesar 97,63% atau dengan kategori Baik.**

Pencapaian umur harapan hidup menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan

kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor kesehatan. Gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu.

Umur Harapan hidup di Aceh pada tahun 2016 mencapai 69,9 Tahun dari target 71,6 tahun. Peningkatan umur harapan hidup penduduk Aceh yang relatif menunjukkan kearah yang lebih baik, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, budaya dan pendidikan masyarakat yang terus membaik. Namun demikian secara nasional, umur harapan hidup penduduk Aceh masih berada di bawah standar nasional yang mencapai 72 tahun.

Umur Harapan Hidup masyarakat Aceh periode 2012-2016 terus menunjukkan peningkatan, sebagaimana tertera pada tabel 3.48 di bawah ini :

Tabel 3.48
Perkembangan Umur Harapan Hidup Penduduk Aceh
periode 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Umur Harapan Hidup	68,8 tahun	68,9 tahun	69,2 tahun	69 tahun	71,6 tahun	69,9 tahun

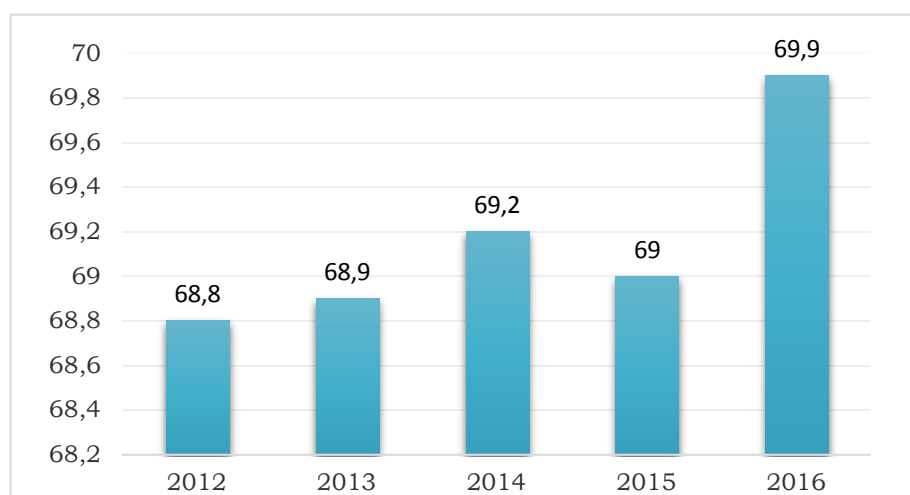
Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2017

Berdasarkan tabel 3.48 di atas, umur harapan hidup penduduk Aceh mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2012, umur harapan hidup penduduk Aceh mencapai 68,8 tahun. Pada tahun 2013, umur harapan hidup kembali naik pada 68,9 tahun. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2014, dimana umur harapan hidup penduduk Aceh naik hingga menyentuh

angka 69,2 tahun. Pada tahun 2015, umur harapan hidup penduduk Aceh kembali mengalami penurunan menjadi 69 tahun. Namun, pada tahun 2016, umur harapan hidup penduduk Aceh kembali naik hingga menyentuh angka 69,9 tahun.

Berikut Grafik Umur Harapan Hidup masyarakat Aceh tahun 2012-2016 :

Grafik 3.22
Umur Harapan Hidup Masyarakat Aceh
Tahun 2012-2016



- **Indikator kinerja "Angka Kematian Ibu melahirkan" yang ditargetkan 100/100.000 LH hanya mampu ditekan menjadi 144/100.000 LH dengan persentase tingkat capaian sebesar 56,00% atau dengan kategori *Cukup*.**

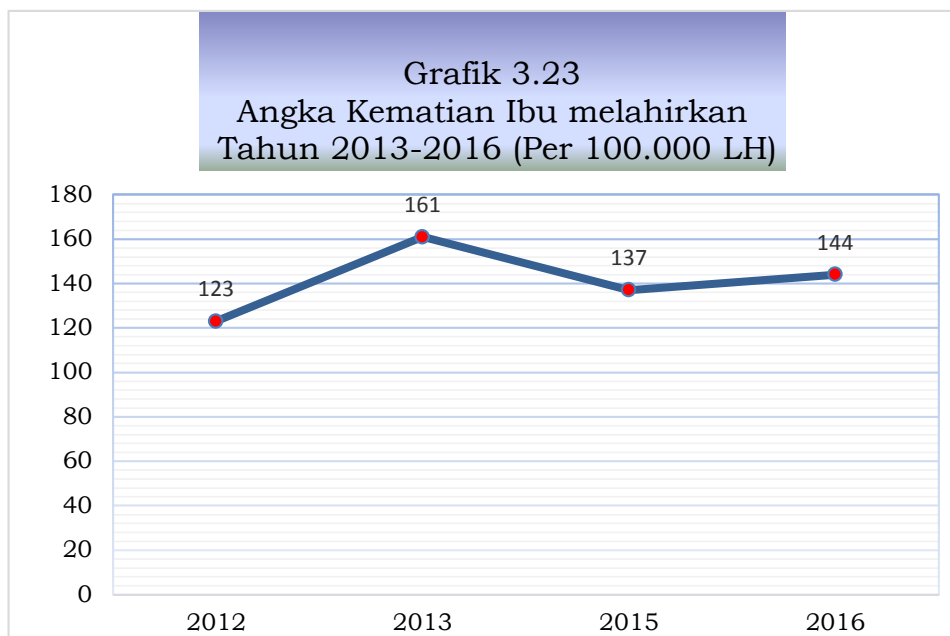
Angka kematian ibu melahirkan di Aceh terus menunjukkan tren yang fluktuatif. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2012, naik menjadi 123 ditahun 2013 dan kembali naik pada tahun 2014 yang mencapai 161. Pada tahun 2015 Angka kematian ibu melahirkan di Aceh menunjukkan hasil yang

menggembirakan hingga menempati angka 137, namun tahun 2016 kembali menurun hingga menempati angka 100/100.000 kelahiran hidup.

Berbagai program kesehatan telah dilaksanakan Pemerintah Aceh untuk terus menekan angka kematian ibu melahirkan, namun kecenderungan penurunan belum membuahkan hasil yang optimal. Keadaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kematian ibu sangat kompleks bila ditinjau dari faktor penyebab maupun faktor risiko. Faktor yang sangat mempengaruhi terhadap capaian kinerja ini antara lain usia produktif ibu serta keadaan sosial ekonomi, dimana penduduk Aceh masih didominasi kemiskinan dan masih dominannya pengaruh adat budaya terhadap ibu hamil.

Adapun program yang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh untuk terus menekan angka kematian ibu melahirkan diantaranya; Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak serta Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis.

Berikut tren Angka Kematian Ibu melahirkan di Aceh periode 2013-2016 :



Pencapaian angka kematian ibu melahirkan di Aceh periode 2013-2016 mengalami tren fluktuatif, hal ini sebagaimana tertera dalam tabel 3.49 di bawah ini :

Tabel 3.49
Angka Kematian Ibu melahirkan

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	123	161	137	100	144

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2017

Berdasarkan tabel 3.49, capaian indikator Kinerja Angka Kematian Ibu melahirkan di Aceh dalam 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami fluktuasi, dari 123/100.000 LH pada tahun 2013, turun menjadi 161/100.000 LH di tahun 2014. Pada tahun 2015 angka tersebut kembali dapat ditekan hingga mencapai 137/100.000 LH pada tahun 2015, namun pada tahun

2016 angka kematian ibu melahirkan kembali naik hingga 144/100.000 LH dari yang ditargetkan sebesar 100/100.000 LH.

- **Indikator kinerja "Angka kematian Bayi" yang ditargetkan 12/1000 LH dapat direalisasikan sebesar 10/1000 LH dengan persentase tingkat capaian sebesar 116,67% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Angka kematian bayi di Aceh sampai dengan akhir tahun 2016 telah mencapai 10 per 1000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) secara nasional pada tahun 2016 yang mencapai 32/1000 LH, maka Aceh sudah berada jauh diatas nasional dan dapat dikatakan bahwa angka kematian bayi di Aceh sudah tergolong baik. Pencapaian di tahun 2016 menunjukkan peningkatan terhadap penurunan angka kematian bayi dari tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian target yang sangat optimal tersebut merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah Aceh dalam bidang kesehatan. Keberhasilan ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas bidan di desa dalam tata laksana bayi baru lahir dan sosialisasi untuk masyarakat semakin membaik. Sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan berupa terus dilakukan peningkatan kapasitas bidan di desa (Bidides) dalam tata laksana bayi baru lahir dan sosialisasi untuk masyarakat untuk melakukan penggunaan ASI secara optimal.

Pencapaian angka kematian bayi sampai dengan tahun 2016 merupakan penurunan tersebar kedua setelah tahun 2012 yang menempati angka 9/1000 LH. Berikut

tren pencapaian angka kematian bayi di Aceh periode 2012-2016 :

Tabel 3.50
Rasio Angka Kematian Bayi di Aceh Tahun 2012-2016

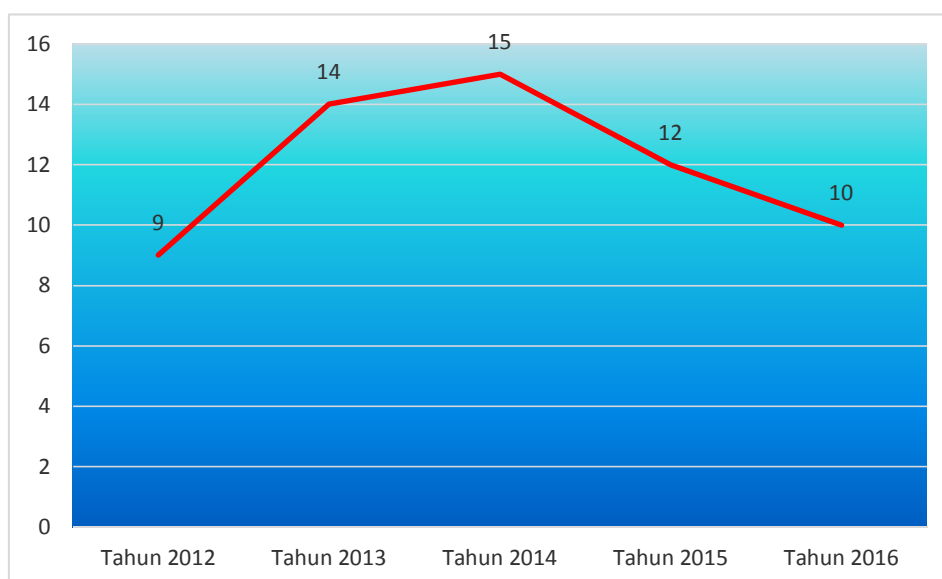
Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka Kematian Bayi	9/1000 LH	14/1000 LH	15/1000 LH	12/1000 LH	10/1000 LH

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2017

Angka Kematian Bayi di Aceh dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami tren fluktuatif, dari 9/1000 LH pada tahun 2012 menjadi 14/1000 LH pada tahun 2013 dan kembali naik di tahun 2014 menjadi 15/1000 LH. Pada tahun 2015 Angka Kematian Bayi di Aceh kembali turun signifikan hingga menempati angka 12/1000 LH, dan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka 10/1000 kelahiran hidup.

Berikut grafik perkembangan Angka Kematian Bayi di Aceh periode 2012-2016 :

Grafik 3.24
Angka Kematian Bayi di Aceh (per 1000 LH)
Tahun 2012-2016



Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Angka Kematian Bayi (AKB) diantaranya telah tersedianya berbagai fasilitas, aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan. Namun demikian masih dijumpai kurangnya kesadaran para ibu hamil dalam menjaga kesehatan yang mengakibatkan berat badan bayi waktu lahir rendah pada masa persalinan, rendahnya informasi mengenai pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) dan makanan, serta pemberian imunisasi.

- **Indikator kinerja “Angka kematian anak balita” yang ditargetkan 25/1000 LH mampu direalisasikan hingga mencapai 10/1000 LH dengan persentase tingkat capaian sebesar 160,00% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Angka kematian anak balita di Aceh pada tahun 2015 cenderung menunjukkan angka penurunan dari tahun 2014 yang mencapai 17/1000 LH, menjadi 10/1000 LH pada tahun 2016. Keberhasilan pencapaian ini dipengaruhi oleh semakin membaiknya penerapan pola Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditingkat rumah tangga dan penguatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Sedangkan terobosan yang telah dilakukan berupa pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan secara berkesinambungan dan terus menerus di seluruh Kabupaten/kota.

Perkembangan angka kematian anak balita sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana terlihat dalam tabel 3.51 di bawah ini :

Tabel 3.51
Angka Kematian anak balita Tahun 2012-2016

Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Angka kematian anak balita per 1000 LH	45	15	17	13	10

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Desember 2016

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan angka kematian balita di Aceh cenderung fluktuatif. Hal ini ditandai dengan terjadinya penurunan yang sangat signifikan pada Tahun 2013 yang mencapai 15/1000 LH dari Tahun 2012 sebesar 45/1000LH, tingkat capaian yang dimaksud mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 17/1000 LH, menurun kembali pada tahun 2015 menjadi 13/1000 LH. Pada tahun 2016, angka kematian anak balita menunjukkan hasil yang optimal, dimana pencapaian ini menyentuh angka terendah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 10/1000 kelahiran hidup.

Keberhasilan dalam menekan angka Kematian Anak Balita antara lain sangat didukung oleh jumlah tenaga kesehatan yang terus mengalami penambahan dari tahun-tahun khususnya dokter umum dan dokter spesialis disetiap Kabupaten/Kota. Adapun jumlah tenaga dokter umum dan spesialis pada setiap Kabupaten/Kota di Aceh sebagaimana tertera pada tabel 3.52 di bawah ini:

Tabel 3.52

Jumlah Tenaga Dokter Umum dan Dokter Spesialis pada Setiap Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2014-2016

No	Kab/Kota	Dokter Umum			Dokter Spesialis		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Simeulue	20	20	19	7	7	8
2	Aceh Singkil	38	24	51	7	7	6
3	Aceh Selatan	29	47	63	10	11	18
4	Aceh Tenggara	36	34	35	14	19	17
5	Aceh Timur	56	52	72	29	31	31
6	Aceh Tengah	36	27	51	28	29	31
7	Aceh Barat	30	26	37	15	15	24
8	Aceh Besar	75	82	86	15	17	14
9	Pidie	64	29	80	28	30	35
10	Bireuen	80	53	82	36	39	37
11	Aceh Utara	82	93	74	33	36	44
12	Aceh Barat Daya	51	24	39	11	11	15
13	Gayo Lues	33	25	49	1	1	5
14	Aceh Tamiang	42	27	62	14	15	23
15	Nagan Raya	26	29	30	6	7	9
16	Aceh Jaya	23	23	48	2	2	13
17	Bener Meriah	33	41	57	9	10	11
18	Pidie Jaya	36	22	31	4	5	6
19	Banda Aceh	46	26	49	39	39	52
20	Sabang	25	13	19	9	9	8
21	Langsa	21	17	35	27	29	33
22	Lhokseumawe	11	17	45	0	0	1
23	Subulussalam	20	7	23	5	5	5
JUMLAH		913	758	1.137	349	374	446

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2017

- **Indikator kinerja "Prevalensi Gizi kurang dan buruk" yang ditargetkan 14% dapat direalisasikan sebesar 16,2% dengan persentase tingkat capaian sebesar 84,29% atau dengan kategori Baik.**

Gizi memegang peranan penting dalam siklus hidup manusia. Bayi dan Balita merupakan salah satu kelompok rawan gizi yang paling dominan di Aceh. Gizi kurang dan gizi buruk di Aceh terjadi hampir di semua Kabupaten dan Kota dengan prevalensi di atas 15%. Kondisi gizi buruk berpotensi terhadap angka kematian. Berikut kasus status gizi buruk balita pada setiap Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2014-2016 :

Tabel 3.53
Kasus Status Gizi Buruk Balita
Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2014-2016

No	Kab/Kota	Jumlah Balita Gizi Buruk		
		2014	2015	2016
1	Simeulue	11	8	4
2	Aceh Singkil	13	6	1
3	Aceh Selatan	24	15	23
4	Aceh Tenggara	9	3	19
5	Aceh Timur	28	19	20
6	Aceh Tengah	7	4	1
7	Aceh Barat	19	14	16
8	Aceh Besar	59	21	26
9	Pidie	47	15	22
10	Bireuen	19	27	16
11	Aceh Utara	13	104	49
12	Aceh Barat Daya	6	5	3
13	Gayo Lues	8	0	3
14	Aceh Tamiang	26	9	6
15	Nagan Raya	11	12	9
16	Aceh jaya	18	1	10
17	Bener Meriah	6	8	11
18	Pidie Jaya	6	7	5
19	Banda Aceh	3	5	5
20	Sabang	1	4	2
21	Langsa	3	1	2
22	Lhokseumawe	16	10	10
23	Subulussalam	13	10	5
	JUMLAH	366	308	268

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2017

Dari tabel di atas, kasus status gizi buruk tahun 2016 di Aceh cenderung mengalami penurunan yang signifikan jika dibanding tahun 2015. Pencapaian prevalensi Gizi kurang dan buruk di Aceh tahun 2016 mencapai 16,2%. Prevalensi gizi kurang dan buruk tahun 2016 jauh mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang mencapai 22,6% dan tahun 2014 yang mencapai 26,3%.

Kasus Status Gizi kurang dan buruk yang terendah di Aceh terdapat di Kabupaten Aceh singkil dan Aceh Tengah dan tertinggi berada di Kabupaten Aceh Utara.



Sasaran Strategis-10 : *Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.*

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.54 di bawah ini :

Tabel 3.54
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Angka kesuksesan pengobatan TB	93%	86%	92,47	Baik
2	Cakupan prevalensi penyakit kusta <1	1/10.000	0,99/10.000	101,00	Sangat Baik
3	Cakupan kabupaten/kota yang memasuki tahap eliminasi malaria*	23 Kab/Kota	16 Kab/Kota	69,57	Cukup
4	Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan JKMA	1,76 juta jiwa	1,97 juta jiwa	111,93	Sangat Baik
5	Prevalensi ODMK	2%	6,6%*	30,30	Kurang
Rata-rata tingkat capaian				81,05	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran 5 (lima) indikator kinerja dari sasaran strategis "Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular" memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **81,05%** atau kategori **Baik**. Hasil pengukuran serta analisis dari masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Indikator kinerja "Angka Kesuksesan Pengobatan TB" yang ditargetkan 93% dapat direalisasikan sebesar 86% dengan persentase tingkat capaian sebesar 92,50% atau dengan kategori Baik.**

Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian terhadap angka kesuksesan pengobatan TB di Aceh antara lain perilaku penderita dalam menjalankan pengobatan, tingkat pendidikan, dan kemampuan ekonomi. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Aceh dalam menekan penyakit TB adalah mengoptimalkan program Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS) di RSUD.

Strategi ini merupakan program yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam mengontrol dan mencegah penyakit TB yang dapat memberikan angka kesembuhan yang tinggi serta paling *cost effective*.

Namun demikian, dibandingkan dengan kesuksesan pengobatan TB di Aceh tahun 2013, yang tingkat capaiannya 97,70%, mengalami penurunan pada tahun 2014 yang tingkat capaiannya 86,77%, capaian ini mengalami penurunan menjadi 81,08% pada tahun 2015. Hingga akhir tahun 2016, angka kesuksesan pengobatan TB di Aceh kembali mengalami penurunan hingga menempati angka 86%. Perkembangan kesuksesan pengobatan TB di Aceh dalam kurun waktu 2013 s.d 2016 dapat dilihat pada tabel 3.55 di bawah ini :

Tabel 3.55
Perkembangan Angka Kesuksesan Pengobatan TB di Aceh
Tahun 2013-2016

Indikator Kinerja	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Angka kesuksesan pengobatan TB	97,70%	86,77%	81,08%	93%	86%

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2017

- **Indikator kinerja "Cakupan prevalensi penyakit kusta <1" yang ditargetkan 1% dapat direalisasikan sebesar 0,97% dengan persentase tingkat capaian sebesar 101,00% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Kasus kusta (penyakit disebabkan kuman *Mycobacterium lepra*) yang terjadi di Aceh menempati angka kejadian tertinggi di Sumatera. Secara nasional prevalensi kusta di Aceh termasuk dalam 14 provinsi tertinggi di Indonesia.

Kasus kusta yang terjadi di Aceh, berkisar 400-500 kasus yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Aceh,

mengalami penurunan dibanding tahun 2015. Prevalensi tertinggi tahun 2016 terjadi di Kabupaten Gayo Lues dan Pidie Jaya, sedangkan prevalensi terendah terdapat di Kota Subulussalam dan Kota Sabang. Secara rinci, sebagaimana pada tabel 3.56 di berikut ini :

Tabel 3.56
Cakupan Prevalensi Penyakit Kusta
berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh
Tahun 2014-2016

No	Kab/Kota	2014	2015	2016
1	Simeulue	0,0	0,2	0,22
2	Aceh Singkil	0,2	0,4	0,60
3	Aceh Selatan	3,2	1,6	1,79
4	Aceh Tenggara	1,2	0,6	0,44
5	Aceh Timur	1,0	1,1	0,51
6	Aceh Tengah	0,2	0,1	0,25
7	Aceh Barat	4,2	1,8	0,76
8	Aceh Besar	0,5	0,5	1,02
9	Pidie	1,8	2,0	1,24
10	Bireuen	0,8	1,0	1,04
11	Aceh Utara	0,9	0,7	0,93
12	Aceh Barat Daya	4,8	2,3	1,95
13	Gayo Lues	2,2	2,2	2,57
14	Aceh Tamiang	0,4	0,1	0,53
15	Nagan Raya	1,6	1,8	0,88
16	Aceh jaya	2,0	2,2	1,37
17	Bener Meriah	0,1	0,1	0,14
18	Pidie Jaya	1,3	0,9	2,57
19	Banda Aceh	1,6	1,6	1,57
20	Sabang	0,3	0,0	-
21	Langsa	0,7	0,4	0,24
22	Lhokseumawe	1,1	0,7	1,18
23	Subulussalam	0,0	0,0	-
Agregat		1,31	0,96	0,97

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2017

Bila dilihat dari prevalensi penyakit kusta di Aceh dalam 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami penurunan, walaupun di beberapa daerah masih menyisakan kasus kusta yang belum tertangani. Keadaan ini lebih disebabkan kepedulian dan pemahaman masyarakat masih rendah serta masih tingginya stigma

dan diskriminasi terhadap penderita kusta, rendahnya advokasi dan sosialisasi pengetahuan keluarga pasien dan masyarakat tentang penyakit Kusta dan geografis Aceh yang dominan dengan daerah pesisir.

Perkembangan cakupan prevelensi penyakit kusta di Aceh dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tertera pada tabel 3.57 di bawah ini :

Tabel 3.57
Cakupan prevalensi penyakit kusta <1

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2015	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Cakupan prevalensi penyakit kusta <1	1,20%	1,20%	1,31%	0,96%	1%	0,99%

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2017

- **Indikator kinerja "Cakupan Kabupaten/Kota yang Memasuki Tahapan Eliminasi Malaria" yang ditargetkan 23 Kabupaten/Kota dapat direalisasikan sebesar 16 Kabupaten/Kota dengan persentase tingkat capaian sebesar 69,57% atau dengan kategori Cukup.**

Belum optimalnya persentase tingkat capaian indikator kinerja ini lebih disebabkan belum sinerginya program penanggulangan endemik malaria yang sistematis serta langkah koordinasi terpadu lintas wilayah yang merupakan endemis malaria. Namun demikian, upaya pemberantasan penyakit endemis malaria di Aceh telah menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Berikut perkembangan jumlah Kabupaten/Kota di Aceh yang memasuki tahapan eliminasi malaria :

Tabel 3.58
Cakupan Kabupaten/Kota yang memasuki Tahapan
Eliminasi Malaria Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	realisasi	realisasi	realisasi	realisasi	Realisasi
Cakupan Kabupaten/Kota yang memasuki Tahapan Eliminasi Malaria	1 Kota	7 Kab/Kota	12 Kab/Kota	14 Kab/Kota	16 Kab/Kota

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2017

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Kabupaten/Kota di Aceh yang memasuki tahap eliminasi malaria. Pada tahun 2012, hanya 1 Kota di Aceh yang telah berhasil memberantas malaria, jumlah tersebut terus naik pada tahun 2013, dimana terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Aceh yang juga telah berhasil memberantas malaria.

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2014 cukup signifikan bila dibandingkan dalam 2 (dua) tahun terakhir, terdapat 12 Kabupaten/Kota yang telah berhasil menekan kasus kematian akibat malaria (eliminasi malaria). Sampai dengan tahun 2015, telah terdapat 14 Kabupaten/Kota di Aceh yang telah berhasil menekan angka malaria. Hingga akhir tahun 2016, jumlah kabupaten/kota yang berhasil menekan angka malaria bertambah menjadi 16 Kabupaten/Kota.

Jumlah temuan kasus malaria di Provinsi Aceh dalam periode 2012-2016 juga terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Aceh telah berkomitmen untuk terus memberantas endemik malaria.

- **Indikator kinerja "Jumlah Penduduk yang Mendapat Pelayanan JKMA" yang ditargetkan 1,76 juta jiwa, dapat direalisasikan sebanyak 1,97 juta jiwa dengan persentase tingkat capaian sebesar 111,93% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Pencapaian jumlah penduduk yang mendapat pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Aceh (JKMA) pada tahun 2016 mencakup 1,97 juta jiwa. Jumlah ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2015 yang mencakup 2,04 juta jiwa, namun terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencakup sebanyak 1,76 juta jiwa.

Penambahan jumlah cakupan penduduk yang mendapat fasilitas pelayanan JKMA pada tahun 2016 berbanding lurus dengan laju pertumbuhan penduduk di Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan melalui penyedia sarana dan prasarana kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 3.59
Perkembangan Jumlah Penduduk yang Mendapat Pelayanan JKMA dari Tahun 2013-2016

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan JKMA	1.76 juta jiwa	1.69 juta jiwa	2,04 juta jiwa	1.76 juta jiwa	1,97 juta jiwa

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Januari 2017

Berdasarkan tabel 3.59 di atas, jumlah penduduk Aceh yang mendapat pelayanan JKMA pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2015, namun jika dilihat dari beberapa tahun sebelumnya,

cakupan penduduk yang mendapat pelayanan JKMA tahun 2016 mengalami tren peningkatan yang signifikan. Hal ini membuktikan komitmen Pemerintah Aceh dibidang kesehatan dalam hal jaminan/asuransi kesehatan untuk semua penduduk Aceh dapat ditingkatkan secara optimal.

- **Indikator kinerja "Prevalensi ODMK" yang ditargetkan 2% terealisasi sebesar 6,6% dengan persentase tingkat capaian sebesar 30,30% atau dengan kategori Kurang.**

Persentase Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)/Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Aceh terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sampai dengan tahun 2016 prevalensi ODMK/ODGJ berdasarkan RISKESDAS, Aceh berada di angka 6,6%. Tahun 2016 tercatat sebanyak 18.647 pasien gangguan jiwa di Aceh dengan pasien mandiri sebanyak 9.577 orang.

Kasus gangguan jiwa (ODMK) banyak ditemukan di daerah pesisir timur Aceh, seperti Bireuen, Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Besar yang memiliki kepadatan penduduk dengan persaingan ekonomi yang dominan lebih tinggi. Jumlah Kasus ODMK tertinggi terdapat di Kabupaten Pidie dengan 2.820 pasien disusul oleh Kabupaten Bireuen dengan 2.585 Pasien serta Kabupaten Aceh Besar dengan 2.455 pasien. Besarnya kasus ODMK di ketiga daerah tersebut salah satunya karena daerah tersebut dahulu merupakan pusat konflik di Aceh yang menyisakan banyak korban konflik. Hal lain yang juga memicu tingginya persentase ODMK di Daerah Pantai timur Aceh tersebut karena masih banyaknya masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan serta pengangguran yang tinggi karena

jumlah lapangan kerja yang sangat terbatas serta keadaan ekonomi keluarga.

Sebaran jumlah ODMK dan pasien mandiri di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2016 tertera dalam tabel 3.59 berikut ini :

Tabel 3.60

Sebaran jumlah pasien jiwa dan pasien jiwa mandiri di Aceh seluruh Kabupaten/Kota di Aceh pada tahun 2016

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah ODMK	Jumlah Pasien Mandiri
1	Simeulue	324 jiwa	173 jiwa
2	Aceh Singkil	479 jiwa	315 jiwa
3	Aceh Selatan	1.026 jiwa	487 jiwa
4	Aceh Tenggara	142 jiwa	41 jiwa
5	Aceh Timur	977 jiwa	464 jiwa
6	Aceh Tengah	697 jiwa	311 jiwa
7	Aceh Barat	900 jiwa	398 jiwa
8	Aceh Besar	2.455 jiwa	1.043 jiwa
9	Pidie	2.820 jiwa	1.639 jiwa
10	Bireuen	2.585 jiwa	1.180 jiwa
11	Aceh Utara	2.399 jiwa	1.150 jiwa
12	Aceh Barat Daya	566 jiwa	366 jiwa
13	Gayo Lues	241 jiwa	108 jiwa
14	Aceh Tamiang	552 jiwa	265 jiwa
15	Nagan Raya	514 jiwa	219 jiwa
16	Aceh Jaya	393 jiwa	276 jiwa
17	Bener Meriah	434 jiwa	191 jiwa
18	Pidie Jaya	686 jiwa	372 jiwa
19	Banda Aceh	997 jiwa	520 jiwa
20	Sabang	122 jiwa	92 jiwa
21	Langsa	425 jiwa	255 jiwa
22	Lhokseumawe	521 jiwa	329 jiwa
23	Subulussalam	1.777 jiwa	651 jiwa
Agregat Aceh		22.033 jiwa	10.845 jiwa

Sumber : Dinas Kesehatan Aceh, Desember 2016

Dalam upaya menurunkan prevalensi ODMK, Pemerintah Aceh telah mempunyai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 8 (delapan) Pukesmas yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota dan 2 (dua) RSUD yaitu RSUD Jantho dan RSUD Aceh Barat. Hal ini dilakukan sebagai

upaya preventif bagi masyarakat untuk melaporkan, apabila ada Pasien gangguan jiwa di wilayahnya.



Sasaran Strategis-11

Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.61 di bawah ini :

Tabel 3.61

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik *	61,52%	61,15%	99,40	Baik
2	Rasio Jaringan Irigasi*	69,74%	72,67%	104,20	Sangat Baik
3	Persentase penurunan lingkungan pemukiman kumuh	4,5%	4,57	101,56	Sangat Baik
4	Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum /tahun	50%	39%	78,00	Baik
Rata-rata tingkat capaian				95,79	Baik

Dari hasil pengukuran 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis "*Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah*" mampu memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **95,79%** atau kategori **Baik**.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Aceh untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Keberhasilan rata-rata tingkat capaian sasaran strategis ini merupakan akumulasi dari tingkat capaian kinerja setiap indikator dengan uraian sebagai berikut :

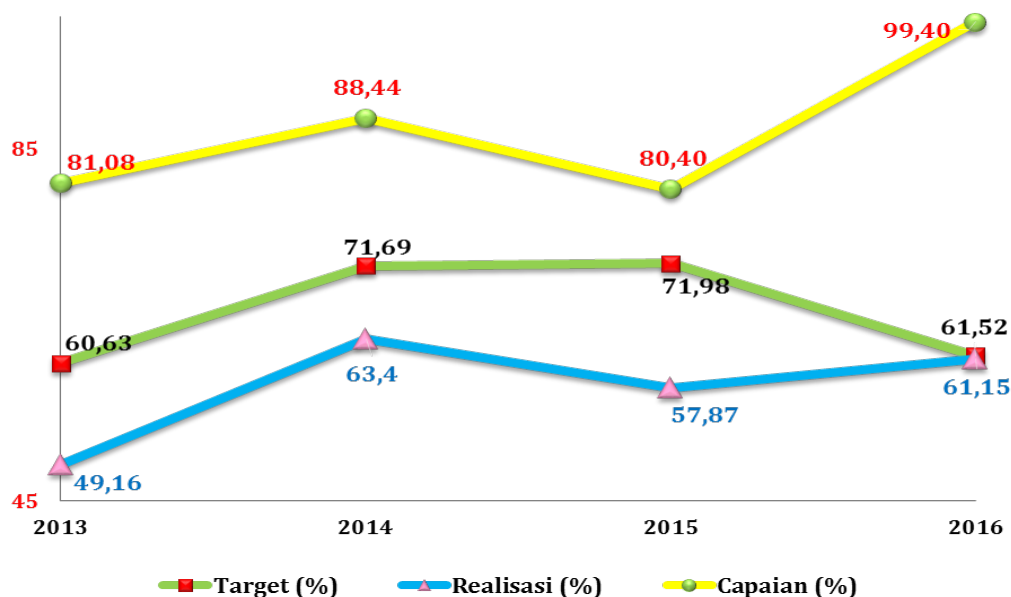
- **Indikator Kinerja “Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik” yang ditargetkan sebesar 61,52% mampu terealisasi sebesar 61,15% dengan tingkat capaian sebesar 99,40% atau kategori baik.**

Belum optimalnya tingkat capaian indikator ini salah satunya disebabkan seiring dengan disahkannya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015 tertanggal 23 April 2015 yang mencantumkan peralihan status beberapa ruas jalan provinsi menjadi ruas jalan nasional, dan kemudian disusul dengan diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Aceh No. 620/1243/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 yang juga merubah status beberapa ruas jalan kabupaten/kota menjadi ruas jalan provinsi.

Dampak dari diberlakukannya kedua surat keputusan tersebut adalah berubahnya panjang jalan provinsi yang semula sepanjang 1.580,42 Km pada tahun 2014, panjangnya bertambah menjadi 1.781,72 Km sejak tahun 2015. Akibatnya, di tahun 2016 dilakukan revisi terhadap target dari indikator ini guna merespon perubahan dan perkembangan yang terjadi akibat diberlakukannya kedua surat keputusan tersebut.

Perkembangan target, realisasi dan capaian kinerja proporsi panjang jalan provinsi di Aceh tahun 2013-2016 sebagaimana tertera dalam grafik 3.25 berikut ini :

Grafik 3.25
Perkembangan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Proporsi Panjang Jalan Provinsi di Aceh Tahun 2013-2016



Gambar grafik 3.25 di atas menunjukkan nilai dari target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator proporsi panjang jalan provinsi selama 4 tahun terakhir. Sepanjang 4 tahun terakhir, dapat dikatakan realisasi indikator proporsi panjang jalan provinsi belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Dimana capaian pada tahun 2013, dapat direalisasikan sebesar 49,16%, di tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 63,40%, pada tahun 2015 sedikit mengalami penurunan hingga pada angka 57,87%, namun di tahun 2016 kembali mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 61,15%.

Bila dibandingkan dengan target dalam RPJMA tahun 2012-2017 yang sebesar 82,65%, nilai capaian kinerja indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi

baik tahun 2016 yang sebesar 61,15% masih berada jauh di bawah target jangka menengah. Persentase tingkat capaian ini dengan target jangka menengah sebagaimana tertera dalam tabel 3.62 di bawah ini :

Tabel 3.62
Target Sasaran Jangka Menengah dan Realisasi Kinerja
dari Indikator Proporsi Panjang Jalan Provinsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Target dalam RPJMA
Meningkatnya pembangunan infrastruktur antara wilayah dan daerah yang seimbang dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	82,65%	61,15%	73,99

Sumber : Dinas Bina Marga Aceh, Januari 2017

Tabel 3.62 di atas memperlihatkan hasil pengukuran realisasi kinerja indikator proporsi panjang jalan provinsi tahun 2016 jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan di dalam sasaran jangka menengah. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa nilai target yang ditetapkan dalam sasaran jangka menengah (82,65%) jauh lebih besar dari nilai realisasinya (61,15%), dengan nilai capaian kinerjanya adalah sebesar 73,99%. Capaian kinerja indikator ini sudah cukup baik walaupun nilainya belum mampu memenuhi target yang diharapkan.

Di bidang kebinamargaan, nilai SPM dari jenis pelayanan dasar yang dapat disajikan adalah persentase jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat, yang bermakna persentase ketersediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dan mampu melayani kebutuhan masyarakat. Target dari nilai SPM di tahun 2016 ini yaitu sebesar 58%. Dibandingkan realisasi indikator proporsi panjang jalan provinsi yang

sebesar 61,15%, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 105,43%. Dengan nilai capaian melebihi 100% ini dapat disimpulkan berarti Dinas Bina Marga Aceh di tahun 2016 ini sudah mampu melampaui nilai SPM yang telah ditetapkan. Tabel 3.63 di bawah menunjukkan hasil perbandingan antara target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan realisasi proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi baik.

Tabel 3.63
Target SPM dan Realisasi Kinerja
Proporsi Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi baik

Uraian	Tahun 2016		
	Target	Realisasi	Target SPM
Persentase jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat (proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi baik)	82,65%	61,15%	58,00%

Sumber : Dinas Bina Marga Aceh, Januari 2017

Dengan semakin meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik maka akan lebih memberikan dampak positif terhadap masyarakat dengan mewujudkan prasarana jalan dan jembatan yang mampu memberikan pelayanan bagi transportasi barang, orang dan jasa yang baik dan lancar, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian wilayah dan pendapatan masyarakat.

- **Indikator Kinerja “Rasio jaringan irigasi” tahun 2016 ditargetkan sebesar 69,74% mampu direalisasikan sebesar 72,67% dengan tingkat capaian sebesar 104,20% atau katagori Sangat Baik.**

Luasan daerah irigasi yang digunakan Pemerintah Aceh dalam perhitungan areal irigasi telah sesuai dengan Permen PU Nomor 14/PRT/M/2015, daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi telah menjadi 38

Daerah Irigasi dan luasnya mencapai 65.409 ha/65,41 km².

Pada tahun 2012 rasio jaringan irigasi adalah 52,63% dan pada tahun 2013 ditargetkan naik 3,93% menjadi 56,56%, namun hanya 2,82% yang dapat direalisasikan sehingga rasio jaringan irigasi tahun 2013 hanya 55,45%. Pada tahun 2014 ditargetkan 3,69% sehingga rasio jaringan irigasi menjadi 59,14% dan terealisasi meningkat menjadi 61,32%. Pada tahun 2015 ditargetkan meningkat 4% sehingga rasio jaringan irigasi yang menjadi 66,34%, terealisasi pada tahun 2015 meningkat menjadi 5,02% sehingga rasio jaringan irigasi menjadi 66,34%. Pada tahun 2016 dari hasil kegiatan pembangunan jaringan irigasi, peningkatan jaringan irigasi yang telah dibangun telah meningkatkan jaringan irigasi sepanjang 48.570,12 meter menjadi 557.020 meter atau 557,02 Km, maka rasio jaringan irigasi pada tahun 2016 yang ditargetkan 5,83% dan rasio jaringan irigasi menjadi 69,74%.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa pada tahun 2016 peningkatan rasio jaringan irigasi lebih besar dari target yaitu sebesar 5,83% dan yang dicapai adalah 6,33%, sehingga rasio jaringan irigasi menjadi 72,67% dari 66,34% yang diharapkan dan rasio yang dicapai telah melebihi target RPJM pada tahun 2016 yaitu 69,74%. Walaupun demikian dapat disimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan jaringan irigasi di Aceh belum maksimal dengan rasio 72,67% dan untuk meningkatkannya masih memerlukan penyediaan jaringan sebesar 27,33% lagi dimasa yang akan datang.

Peningkatan rasio jaringan irigasi melebihi dari target dikarenakan kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi lebih diprioritaskan pada peningkatan/pembangunan jaringan/saluran irigasi sehingga panjang saluran bertambah melebihi yang ditargetkan, ditambah lagi dengan adanya anggaran yang lebih fokus pada kegiatan peningkatan saluran sesuai dengan visi Gubernur Aceh tentang ketahanan pangan dan mendukung program pemerintah dalam upaya pencapaian kedaulatan pangan Nasional.

Peningkatan rasio jaringan irigasi di Aceh terus dilakukan Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.795.455.095,- dan Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.882.461.000. Rasio jaringan irigasi di Aceh terus mengalami peningkatan dalam 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini sebagaimana tertera pada tabel 3.64 di bawah ini :

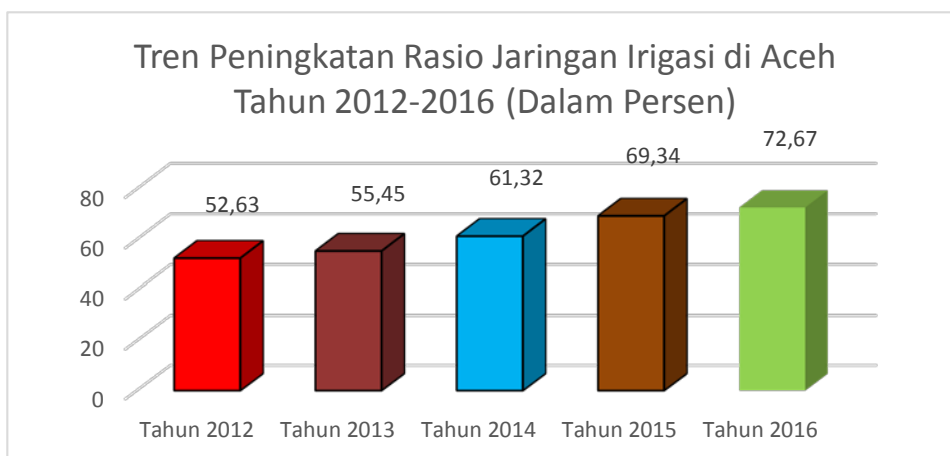
Tabel 3.64
Tren Peningkatan Rasio jaringan irigasi di Aceh
tahun 2012-2016

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Rasio jaringan irigasi	52,63%	55,45%	61,32%	66,34%	72,67%

Sumber : Dinas Pengairan Aceh, Januari 2017

Secara grafik peningkatan rasio jaringan irigasi di Aceh dari tahun 2012-2016 sebagaimana tertera pada grafik 3.26 di bawah ini :

Grafik 3.26



- **Indikator kinerja “Persentase penurunan lingkungan permukiman kumuh” yang ditargetkan 4,5% dapat direalisasikan sebesar 4,57% dengan persentase tingkat capaian sebesar 101,56% atau dengan kategori *Sangat Baik*.**

Lingkungan permukiman kumuh di Aceh terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011, lingkungan permukiman kumuh di Aceh mencapai 17,39%, angka ini mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 16,57%, sedangkan pada tahun 2013, mengalami sedikit kenaikan sehingga mencapai 14,50%. Namun demikian, pada tahun 2014 melalui berbagai langkah dan upaya strategis yang dilakukan Pemerintah Aceh, dapat menurunkan luas kawasan kumuh menjadi sebesar 8,51%.

Pada tahun 2015, penurunan lingkungan permukiman kumuh di Aceh dapat direalisasikan sebesar 4,92% dan hingga akhir tahun 2016, lingkungan permukiman kumuh di Aceh dapat diturunkan sebesar 4,57%. Secara rinci,

persentase penurunan permukiman kumuh di Aceh dapat disajikan dalam 3.65 di bawah ini :

Tabel 3.65
Persentase penurunan lingkungan permukiman kumuh di Aceh periode 2013-2016

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase penurunan lingkungan permukiman kumuh	7,37%	6,67%	4,92%	4,57%

Sumber : Dinas Cipta Karya Aceh, Desember 2016

Lingkungan permukiman kumuh mengalami penurunan seiring dengan penanganan di kawasan permukiman sektor bidang keciptakaryaan berupa penanganan air minum, air limbah, persampahan, dan perumahan. Penanganan permukiman kumuh di Aceh merupakan upaya yang dilakukan secara bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dengan sumber dana APBN, APBA dan APBK.

- **Indikator Kinerja “Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum/tahun” tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 50% mampu terealisasi sebesar 39% dengan tingkat capaian sebesar 78 % atau katagori Baik.**

Jumlah arus penumpang angkutan umum di Aceh mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2016, jumlah tersebut mencapai 15.153.863 orang. Jumlah tahun 2016 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2015 yang mencapai 10.901.864 orang, dan pada tahun 2014 yang hanya 4.086.240 orang. Peningkatan arus penumpang ini diikuti dengan adanya peningkatan layanan pada moda angkutan darat terutama armada angkutan

AKPA/AKDP melalui peremajaan dan penambahan kualitas kenyamanan atas kendaraan (bus) khususnya pada trayek antar provinsi.

a. Perkembangan Angkutan Udara

Bandar Udara Sultan Iskandar Muda merupakan satu-satunya bandar udara Internasional di Provinsi Aceh dengan aktivitas tinggi, baik lalu lintas pesawat, penumpang, maupun barang. Pada bulan Desember 2016 jumlah penumpang yang tercatat di bandar udara ini mencapai 96.351 orang, atau mengalami peningkatan sebesar 6,07 persen jika dibandingkan dengan bulan November 2016, juga mengalami peningkatan sebesar 26,77 persen dibandingkan bulan Desember 2015. Secara total di Provinsi Aceh, jumlah penumpang pada bulan Desember 2016 mencapai 112.901 orang (tidak termasuk bandara Alas Leuser), mengalami peningkatan dibandingkan bulan November 2016 sebesar 4,86 persen, juga mengalami peningkatan sebesar 29,01 persen bila dibandingkan dengan bulan Desember 2015. Total penumpang pada seluruh bandara di Provinsi Aceh selama tahun 2016 adalah sebanyak 1.134.551 orang, mengalami peningkatan sebesar 29,86 persen dibandingkan tahun 2015.

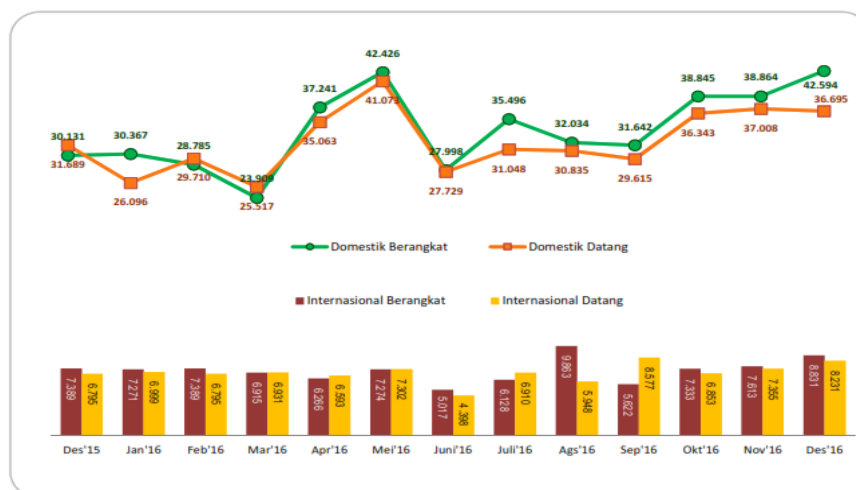
Tabel 3.66
Jumlah Pesawat dan Penumpang pada
Beberapa Bandar Udara di Provinsi Aceh,
Desember 2016

Bulan	Rincian	Bandar Udara											Total
		Lasikin	Sultan Iskandar Muda	Kuala Batu	Rembele	Cut Nyak Dhien	Alas Leuseur	T. Cut Ali	Malikussaleh	Hamzah Fansuri	Maimun Saleh	Blang Kejeran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2015													
Des	Pesawat	116	732	88	39	108	26	40	76	12	14		1.251
	Penumpang	3.381	76.004	309	284	3.769	160	144	2.961	27	476		87.515
Jan-Des	Pesawat	1872	6239	672	264	1432	236	283	742	210	222		12.172
	Penumpang	23.257	755.206	3492	2249	46.968	1901	1164	30.070	538	8.804		873.649
2016													
Jan	Pesawat	86	621	14	6	70	8	6	76	2	20	8	917
	Penumpang	2.948	70.733	43	23	3.686	20	7	2.599	2	587	6	80.654
Feb	Pesawat	120	680	58	23	110	44	26	82	2	16	32	1.193
	Penumpang	3.113	72.679	204	187	3.841	176	50	3.405	56	606	105	84.422
Mar	Pesawat	120	604	56	29	122	42	26	86	14	14	38	1.151
	Penumpang	3.705	63.272	264	283	4.282	230	79	3.172	29	507	111	75.934
Apr	Pesawat	100	847	60	26	112	44	26	82	12	18	38	1.365
	Penumpang	4.110	85.163	309	248	4.032	274	64	3.932	44	665	155	98.996
Mei	Pesawat	122	1.039	66	26	114	44	26	74	14	16	36	1.577
	Penumpang	4.198	98.075	444	247	4.327	304	108	3.801	40	704	116	112.364
Juni	Pesawat	108	754	66	26	108	42	26	76	14	12	28	1.260
	Penumpang	3.764	65.142	450	217	3.673	247	108	3.477	77	312	150	77.617
Juli	Pesawat	112	628	58	26	114	44	26	82	14	18	36	1.158
	Penumpang	4.188	79.582	374	224	4.188	305	147	4.620	60	720	168	94.576
Ags	Pesawat	110	734	58	24	114	42	30	92	14	16	28	1.262
	Penumpang	3.845	78.680	364	140	3.684	261	156	4.637	67	666	108	92.608
Sep	Pesawat	104	699	58	58	110	46	18	82	12	18	18	1.223
	Penumpang	3.763	75.456	396	2.500	3.803	337	81	3.998	54	518	147	91.053
Okt	Pesawat	100	825	50	62	106	42	18	86	12	14	36	1.351
	Penumpang	3.621	89.374	374	3.007	3.598	266	89	4.814	46	428	140	105.757
Nov	Pesawat	108	738	52	56	116	33	16	84	14	14	20	1.251
	Penumpang	3.791	90.840	424	2.978	3.879	231	73	4.858	52	357	186	107.669
Des	Pesawat	104	787	54	58	82	#	18	82	2	18	36	1.241
	Penumpang	3.847	96.351	444	2.922	3.576	#	79	4.852	9	616	205	112.901
Jan - Des '16	Pesawat	1.294	8.956	650	420	1.278	431	262	984	126	194	354	14.949
	Penumpang	44.893	965.347	4.090	12.976	46.569	2.651	1.841	48.165	536	6.686	1.597	1.134.551
Perubahan Y to Y	Pesawat	-10,34	7,51	-38,64	48,72	-24,07	na	-55,00	7,89	-83,33	28,57	na	-0,80
	Penumpang	13,78	26,77	43,69	928,87	-5,12	na	-45,14	63,86	-66,67	29,41	na	23,01

Keterangan: # = Data Belum Tersedia

Penumpang penerbangan domestik yang berangkat melalui bandar udara Sultan Iskandar Muda pada bulan Desember 2016 mencapai 42.594 orang atau mengalami peningkatan sebesar 9,60 persen terhadap bulan November 2016, juga mengalami peningkatan sebesar 41,36 persen dibandingkan bulan Desember 2015. Selanjutnya jumlah penumpang domestik yang datang pada bulan Desember 2016 sebanyak 36.695 orang, terjadi peningkatan sebesar 0,85 persen dibandingkan bulan November 2016, juga mengalami peningkatan sebesar 15,80 persen dibanding bulan Desember 2015.

Gambar 3.6
Jumlah Penumpang Angkutan Udara
Bandara Sultan Iskandar Muda
Provinsi Aceh, Desember 2016



Penumpang internasional yang berangkat dari Provinsi Aceh melalui bandar udara Sultan Iskandar Muda pada bulan Desember 2016 sebanyak 8.831 orang, mengalami peningkatan sebesar 16,00 persen dibandingkan bulan November 2016, juga mengalami peningkatan sebesar 19,52 persen dibanding bulan Desember 2015. Penumpang internasional yang datang pada bulan Desember 2016 sebanyak 8.231 orang, mengalami peningkatan sebesar 11,91 persen jika dibandingkan bulan November 2016, juga mengalami peningkatan terhadap bulan Desember 2015 yaitu sebesar 21,13 persen.

b. Perkembangan angkutan laut

Jumlah penumpang angkutan laut terbanyak pada bulan Desember 2016 terdapat pada pelabuhan Ulee Lheue yaitu tercatat sebanyak 60.276 penumpang, mengalami peningkatan sebesar 44,73

persen terhadap bulan November 2016, namun terjadi penurunan sebesar 18,81 persen jika dibandingkan dengan bulan Desember 2015. Secara total di Provinsi Aceh, jumlah penumpang pada bulan Desember 2016 mencapai 130.791 orang, mengalami peningkatan sebesar 47,56 persen dibandingkan bulan November 2016, namun mengalami penurunan sebesar 8,08 persen dibandingkan bulan Desember 2015. Total penumpang pada seluruh pelabuhan di Provinsi Aceh selama tahun 2016 adalah sebanyak 1.411.559 orang, mengalami peningkatan sebesar 7,12 persen dibandingkan tahun 2015.

Berikut Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Laut pada Beberapa Pelabuhan di Provinsi Aceh tahun 2016 :

Tabel 3.67
Perkembangan Jumlah Penumpang Angkutan Laut pada Beberapa Pelabuhan di Provinsi Aceh tahun 2016

Bulan	Rincian	Pelabuhan											Total
		Sinabang	Singkil dan Pulau Banyak	Tapaktuan	Idi	Meulaboh	Uleeheue, Malahayati, Lhoknga	Krueng Geuloh	Susoh	Calang	Balohan	Kuala Langa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2015	Kapal	486	549	318	0	349	2.554	380	54	55	1.946	13	6.704
	Penumpang	87.350	50.248	66.569	0	3.506	617.846	0	0	1.981	490.233	0	1.317.733
Des	Kapal	40	27	20	0	16	239	34	5	6	192	0	579
	Penumpang	6.798	1.871	4.287	0	333	74.238	0	0	245	54.510	0	142.282
2016	Kapal	40	42	24	0	15	213	28	1	1	177	2	543
	Penumpang	6.810	6.154	5.271	0	0	63.982	0	0	0	54.841	0	137.058
Jan	Kapal	42	44	30	0	18	210	28	7	6	142	1	528
	Penumpang	5.038	3.900	4.214	0	197	54.301	0	0	11	39.580	0	107.241
Feb	Kapal	40	53	16	2	17	215	30	7	10	180	0	570
	Penumpang	4.772	4.985	1.746	0	160	52.250	0	0	630	45.930	0	110.473
Mar	Kapal	41	65	7	0	19	206	27	8	8	195	2	578
	Penumpang	5.025	4.452	20	0	0	51.299	0	0	970	49.011	0	110.777
Apr	Kapal	33	47	17	0	13	251	27	9	7	203	1	608
	Penumpang	5.280	4.755	3.976	0	0	71.946	0	0	81	54.144	0	140.182
Mei	Kapal	33	35	18	0	17	205	25	1	5	211	0	550
	Penumpang	5.901	2.263	4.600	0	0	29.334	0	0	0	24.382	0	66.480
Juni	Kapal	29	36	21	0	16	247	30	1	5	192	1	578
	Penumpang	8.258	4.387	7.519	0	0	91.518	0	0	0	74.868	0	186.550
Juli	Kapal	39	52	20	0	20	249	36	1	6	156	1	580
	Penumpang	5.118	3.927	4.110	0	309	80.185	0	0	0	44.489	0	138.138
Ags	Kapal	33	52	12	0	23	218	28	1	5	179	0	551
	Penumpang	5.451	3.950	2.899	0	2.414	40.347	0	0	0	46.528	0	101.589
Sep	Kapal	41	36	9	2	31	241	30	2	6	187	3	588
	Penumpang	4.901	2.980	1.549	0	2.253	42.567	0	60	0	39.335	0	93.645
Okt	Kapal	46	17	11	3	32	131	30	4	8	159	2	443
	Penumpang	3.973	587	2.112	0	1.430	41.648	0	0	52	38.833	0	88.635
Nov	Kapal	48	52	21	0	36	228	31	4	8	171	0	599
	Penumpang	6.393	4.872	3.481	0	1.810	60.276	0	0	82	53.877	0	130.791
Jan-Des 2016	Kapal	465	531	268	7	257	2.614	350	46	75	2.152	13	6.716
	Penumpang	66.920	47.212	41.497	0	8.573	679.653	0	60	1.826	565.818	0	1.411.559

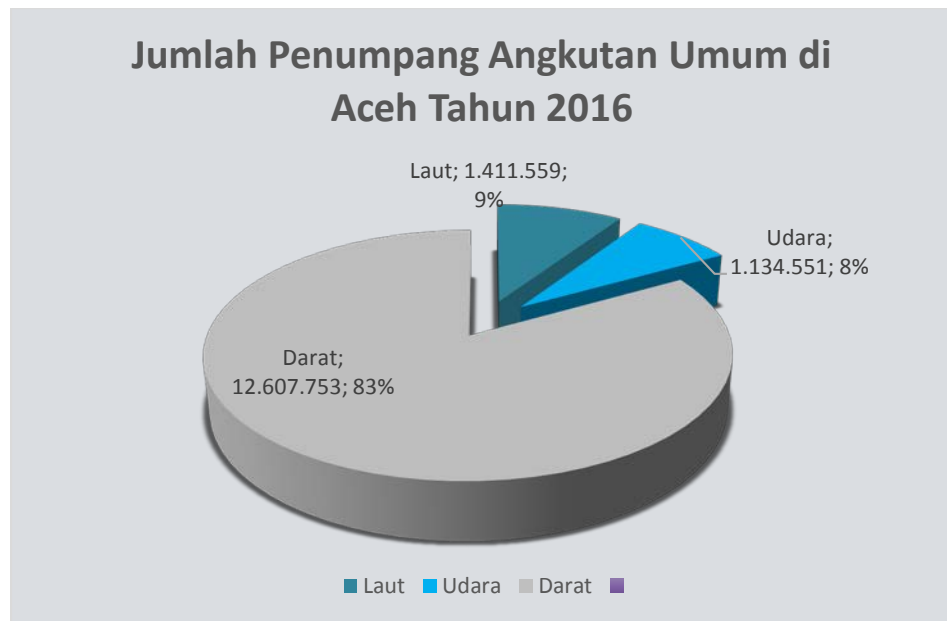
c. Perkembangan angkutan darat

Jumlah penumpang angkutan darat sampai dengan bulan Desember 2016 tercatat sebanyak 12.607.753 penumpang. Jumlah penumpang angkutan darat menyumbang porsi terbesar dalam perhitungan jumlah penumpang angkutan umum di Aceh. Jumlah tersebut terbagi dalam moda transportasi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 8.316.660 orang, Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 4.125.364 orang dan Trans Koetaradja sebanyak 165.729 (periode Juni-Desember 2016).

Peningkatan arus penumpang angkutan umum di Aceh terus mengalami peningkatan, upaya ini dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.600.681.651,-, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.900.481.996,-, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.947.427.116,-, dan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.349.240.000,-.

Proporsi jumlah penumpang angkutan umum di Aceh pada tahun 2016 sebagaimana tertera dalam grafik 3.27 di bawah ini.

Grafik 3.27





Sasaran Strategis-12 :

Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkualitas

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.68 di bawah ini :

Tabel 3.68
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keduabelas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Persentase Penanganan Sampah	70%	70%	100,00	Baik
2	Pemantauan Pencemaran Status Mutu Air	65%	104%	160,00	Sangat Baik
3	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	540 Ha	642,01 Ha	118,89	Sangat Baik
4	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	90%	19,57%	21,74	Kurang
5	Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi bencana	90%	91%	101,11	Sangat Baik
Rata-rata tingkat capaian				100,35	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran 5 (lima) indikator kinerja ”*Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkualitas*” mampu memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **100,35%** atau kategori **Sangat Baik**. Analisis terhadap capaian setiap indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

- **Indikator kinerja ”Persentase Penanganan Sampah” yang ditargetkan 70% dapat direalisasikan sebesar 70% dengan persentase tingkat capaian sebesar 100,00% atau dengan kategori Baik.**

Angka persentase target dan realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan ketersediaan Tempat Pengolahan Sampah (TPA) yang ada di tiap kabupaten/kota di Aceh. Untuk tahun 2016 jumlah kabupaten/kota di Aceh yang

memiliki TPA, baik TPA metode open dumping ataupun sanitary landfill, adalah 100% atau sekitar 23 buah TPA.

Pencapaian tahun 2016, telah mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 80% dan pada tahun 2014 hanya mencapai 73,91%.

Untuk terus mengoptimalkan penanganan sampah di Aceh pada tahun 2016, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis, diantaranya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 797.734.700,-.

- **Indikator kinerja "Pemantauan Pencemaran Status Mutu Air" yang ditargetkan 65% dapat direalisasikan sebesar 104,00% dengan persentase tingkat capaian sebesar 160,00% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Indikator ini merupakan salah satu kegiatan dalam pengendalian terhadap pencemaran lingkungan yakni dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas air (sungai/danau) yang termasuk dalam SPM Bidang Lingkungan Hidup. pemantauan ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi kualitas air sungai/danau dan kondisi kualitas udara *ambient* di wilayah perkotaan di Aceh. Pemantauan kualitas air dilakukan di 8 (delapan) lokasi, meliputi 6 (enam) sungai dan 2 (dua) danau yang diduga memiliki potensi tinggi tercemar limbah domestik karena sungai/danau tersebut melintasi wilayah, perkebunan, perindustrian, pasar dan pemukiman padat penduduk di 7 (tujuh) kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada Pengujian Kualitas Air Sungai/Danau di 8 (delapan) kab/kota terdiri

dari 6 (enam) sungai dan 2 (dua) danau dengan 2 (dua) kali pengambilan sampel, pada musim kemarau dan musim penghujan yang dilakukan pada 5 (lima) titik lokasi. Kegiatan pemantauan air tahun 2016 dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) periode pemantauan. Pemantauan Periode 1 (satu) dilakukan pada musim kemarau, sedangkan Pemantauan Periode 2 (dua) dilakukan pada musim penghujan. Pengambilan sampel dilakukan di:

- a. Krueng Geumpang Kabupaten Pidie
- b. Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen
- c. Krueng Keureuto Kabupaten Aceh Utara
- d. Krueng Meureubo Kabupaten Aceh Barat
- e. Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya
- f. Krueng Aceh Kabupaten Aceh Besar
- g. Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah
- h. Danau Aneuk Laot Kota Sabang

Pada tahun 2016, Pemerintah Aceh telah melakukan pemantauan air dengan jumlah titik pemantauan 5 (lima) lokasi dimulai dari hulu sungai sampai ke hilir. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada Pengujian Kualitas Air Sungai/Danau di 8 (delapan) kab/kota. Pemantauan dilaksanakan dengan sampel 8 (delapan) lokasi yakni 6 (enam) sungai dan 2 (dua) danau atau lebih banyak 3 (tiga) lokasi dari yang ditetapkan dalam target tahun 2016.

Dari hasil analisis dan interpretasi data Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahap I (musim kemarau) dan tahap II (musim hujan) Tahun 2016 berdasarkan Standar Baku Mutu Air Kelas II PPRI No. 82/2001, hasil uji kualitas air sungai sebagian besar parameter masih memenuhi nilai

ambang batas baku mutu air, dan sebagian parameter ada yang melebihi nilai ambang batas baku mutu air.

Capaian kinerja pemantauan pencemaran status mutu air pada tahun 2016 sebesar 104% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 53,33%. Demikian juga dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 33,33%. Perkembangan Pencemaran Status Mutu Air di Aceh Tahun 2013-2016, sebagaimana tertera pada tabel 3.69 di bawah ini :

Tabel 3.69
Perkembangan Pencemaran Status Mutu Air di Aceh Tahun 2014-2016

Uraian	Capaian		
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Pencemaran status mutu air	33,33%	53,33%	104,00%

Sumber: Bapedal Aceh, Desember 2016.

- **Indikator kinerja "Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis" yang ditargetkan 540 Ha dapat direalisasikan seluas 642,01 Ha dengan persentase tingkat capaian sebesar 118,89% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Pada tahun 2013 luas lahan kritis di Provinsi Aceh seluas 375.483,01 Ha, selama kurun waktu 5 tahun berkurang menjadi seluas 373.281.02 ha, sehingga terjadi penurunan seluas 2.201,99 Ha. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Aceh dalam UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPDAS Krueng Aceh) dan peran serta masyarakat dalam usaha menghijaukan kembali lahan kritis.

Luasan lahan kritis di Aceh menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, penurunan tersebut dapat dilihat dari tabel 3.70 di bawah ini :

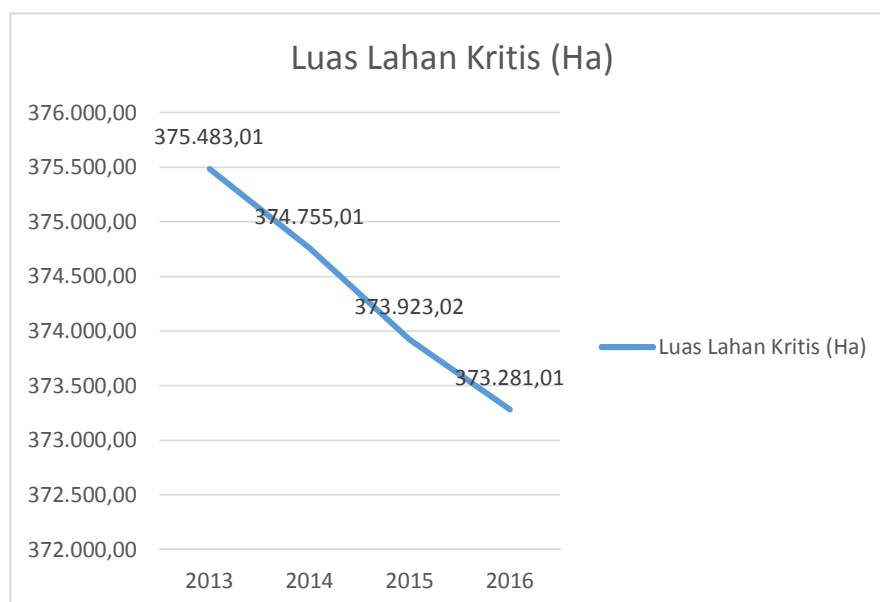
Tabel 3.70
Luas Lahan Kritis Aceh

Luas Lahan Kritis (Ha)	Tahun
375.483,01	2013
374.755,01	2014
373.923,02	2015
373.281,02	2016

Sumber: BPDAS Krueng Aceh

Penurunan luasan lahan kritis di Aceh terus dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.975.760.000,-, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.546.948.356,- dan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.443.950.000,-. Penurunan luasan lahan kritis aceh dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

Grafik 3.28
Grafik Lahan Kritis Provinsi Aceh



- **Indikator kinerja "Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL" yang ditargetkan 90% dapat direalisasikan sebesar 19,57% dengan persentase tingkat capaian sebesar 21,74% atau dengan kategori Kurang.**

Cakupan pelaksanaan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2015 yang telah mencapai 46,67%. Demikian juga jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014 yang mencapai 22,50%.

Sakupan pelaksanaan pengawasan terhadap AMDAL di Aceh dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui Pembinaan dan pengawasan penerbitan rekomendasi UKL-UPL yang bertujuan untuk terlaksananya penerapan penerbitan rekomendasi UKL-UPL yang dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dilaksanakan pada 5 kabupaten dan 1 kota (Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, dan Kota Sabang) di Provinsi Aceh; Pemantauan Pasca AMDAL (Uji Petik) dilakukan pada 5 lokasi di 5 kabupaten yaitu Pembangunan Waduk Krueng Keureto Kabupaten Aceh Utara, PT. Boswa Megapolis Kabupaten Aceh Jaya, Pemantauan PT. PIM Kabupaten Aceh Utara dan PT Syaukath Sejahtera Kabupaten Bireuen serta Pemantauan PLTU Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya; dan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Komisi Penilai Amdal telah dilakukan pada 4 kabupaten (Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tengah,

Kabupaten Aceh Barat, serta Kabupaten Nagan Raya,) di Provinsi Aceh.

Perkembangan cakupan pelaksanaan terhadap AMDAL di Aceh dapat dilihat pada tabel 3.71 di bawah ini :

Tabel 3.71

Perkembangan Cakupan Pelaksanaan Terhadap AMDAL di Aceh Tahun 2013-2016

Uraian	Capaian			
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	33,33%	22,50%	46,67%	19,57%

Sumber: Bapedal Aceh, Desember 2016.

Untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.542.899.300,-, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.371.803.054 dan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 998.841.350,-.

- **Indikator kinerja "Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah dalam menghadapi bencana" yang ditargetkan 90% dapat direalisasikan sebesar 91% dengan persentase tingkat capaian sebesar 101,11% atau dengan kategori Sangat Baik.**

Kondisi geografis, biologis, hidrologis dan demografis Aceh yang merpaukan daerah rawan bencana perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah di semua tingkatan dalam upaya meminimalisir

korban bencana. Upaya tersebut ditempuh Pemerintah Aceh melalui beberapa program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, LSM, NGO dan masyarakat.

Upaya ini terus dilakukan antara lain sejak tahun 2010 Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Pada tahun 2016 Pemerintah Aceh didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memperkuat peran kelembagaan penanggulangan Bencana Aceh guna mewujudkan masyarakat yang aman terhadap bencana serta *resilient city* di Aceh.

Pada penghujung tahun 2016 Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bireuen dilanda gempa bumi berkekuatan 6,4 SR yang berakibat lumpuhnya pemerintahan dan terganggunya fungsi pelayanan pemerintah di tiga Kabupaten tersebut.

Gambar 3.7

Kondisi gempa bumi yang melanda Kabupaten Pidie Jaya pada penghujung tahun 2016 yang berakibat lumpuhnya pemerintahan dan terganggunya fungsi pelayanan



Untuk menanggulangi dampak bencana tersebut, terutama pada tahap darurat bencana Pemerintah Aceh menetapkan status darurat bencana provinsi guna mendorong percepatan penanggulangan bencana berupa pencarian penyelamatan evakuasi masyarakat dan penanganan korban sesegera mungkin sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi lainnya. Operasi penanganan darurat tersebut dibiayai dengan APBA sumber dana belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung peran para pihak seperti TNI, POLRI, SARDA, dan lain-lain.

Berikut perkembangan capaian kinerja kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana periode 2013, 2014, 2015 dan 2016 sebagaimana tertera pada tabel 3.72 di bawah ini :

Tabel 3.72
Perkembangan Persentase kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Persentase kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana	100%	67%	68%	91%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Desember 2016

Untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana dengan alokasi anggaran mencapai Rp.6.042.540.350,-, dan Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.545.690.000,-.



Sasaran Strategis-13 : Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Aceh.

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.73 di bawah ini :

Tabel 3.73
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketigabelas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Skor Pola Pangan Harapan	88,9	70,9	79,75	Baik
2	Penanganan desa Rawan Pangan	200 desa	50 desa	25,00	Kurang
3	Nilai Tukar Nelayan	110,10	97,79	88,82	Baik
4	Nilai Tukar Petani	115 %	98,85%	85,96	Baik
Rata-rata tingkat capaian				69,88	Cukup

Berdasarkan hasil pengukuran 4 (empat) indikator kinerja ”*Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Aceh*” mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **69,88%** atau kategori **Cukup**. Analisis terhadap capaian indikator-indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

- **Indikator kinerja ”Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Harapan” yang ditargetkan 88,9 skor PPH dapat direalisasikan sebesar 70,90 skor PPH dengan persentase tingkat capaian sebesar 79,75% atau dengan kategori Baik.**

Guna mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) mendekati konsumsi pangan yang ideal sebagaimana yang digambarkan dengan skor PPH 100 Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan pengenakeragaman konsumsi pangan.

Kebijakan dan upaya dilakukan oleh Pemerintah Aceh diantaranya melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Capaian pola konsumsi pangan harapan masyarakat Aceh tahun 2016 yaitu sebesar 70,9, sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang telah mencapai 73,4. Nilai skor ini juga mengalami penurunan dibanding tahun 2014 yang mencapai 71,5. Pencapaian skor PPH Aceh tahun 2016 masih jauh dari skor PPH ideal sebesar 100.

Berbagai kondisi yang menyebabkan skor PPH Aceh masih berada di bawah skor PPH Standar Pelayanan Minimal antara lain masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras, masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah, pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah, kondisi perekonomian masyarakat terutama di pedesaan yang masih rendah serta bahan makanan mengalami inflasi. Namun demikian, dalam 4 (empat) tahun terakhir, skor PPH Aceh mengalami tren yang fluktuatif sebagaimana terlihat dalam tabel 3.74 berikut ini :

Tabel 3.74
Tingkat Pola Konsumsi Pangan Harapan Aceh
Periode 2013-2016

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Peningkatan pola konsumsi pangan harapan	66,70	71,50	73,40	70,90

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh, Desember 2016

Untuk terus mengoptimalkan peningkatan pola konsumsi pangan harapan, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya

Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.526.370.000,-.

- **Indikator kinerja "Penanganan Desa rawan Pangan" yang ditargetkan 200 kelompok/desa dapat direalisasikan sebanyak 50 kelompok/desa dengan persentase tingkat capaian sebesar 25,00% atau dengan kategori Kurang.**

Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) adalah upaya intervensi pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat/kelompok masyarakat atau rumah tangga dalam rangka mengatasi masalah kelangkaan/ketersediaan pangan yang terjadi. Kerawanan terhadap pangan dapat dibedakan menjadi dua kriteria yaitu Rawan Pangan *Transient* dan Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan *Transient* adalah rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang diakibatkan perbuatan manusia atau bencana alam.

Pencapaian penanganan desa rawan pangan di Aceh pada tahun 2016 yang mencapai 50 kelompok/desa mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015 yang mencapai 113 kelompok/desa. Pada Tahun 2016, Pemerintah Aceh telah mengupayakan untuk menangani Desa Rawan Pangan Kronis yang mengutamakan desa dengan kasus Balita gizi buruk. Selain menangani Daerah Rawan Pangan *Transient* dan Desa Rawan Pangan Kronis, dalam memenuhi kebutuhan pangan Pemerintah Aceh juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan Desa Mandiri Pangan untuk menerima bantuan Penanganan Desa Rawan Pangan (PDRP).

Permasalahan utama di bidang ketahanan pangan antara lain adalah: 1) belum lancarnya distribusi pangan; 2) harga pangan yang tidak stabil; 3) dukungan regulasi tentang ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota belum tersedia; 4) kurangnya data dan informasi yang akurat; 5) rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung; dan 6) rendahnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan

- **Indikator kinerja “Nilai Tukar Nelayan” yang ditargetkan 110,10% dapat direalisasikan sebesar 97,79% dengan persentase tingkat capaian sebesar 88,82% atau dengan kategori Baik.**

NTN adalah salah satu alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Bisa dikatakan salah satu faktor yang menentukan tingkat penerimaan nelayan adalah jumlah tangkapan ikan oleh nelayan. Capaian NTN Tahun 2016 sebesar 97,79 atau 88,82% dari target yang ditetapkan, telah sedikit meningkat dibandingkan dengan NTN tahun 2015 yaitu 97,70 atau 0,09%.

Secara rinci, nilai tukar nelayan tertera pada tabel 3.75 di bawah ini :

Tabel 3.75
Perkembangan Nilai Tukar Nelayan di Aceh

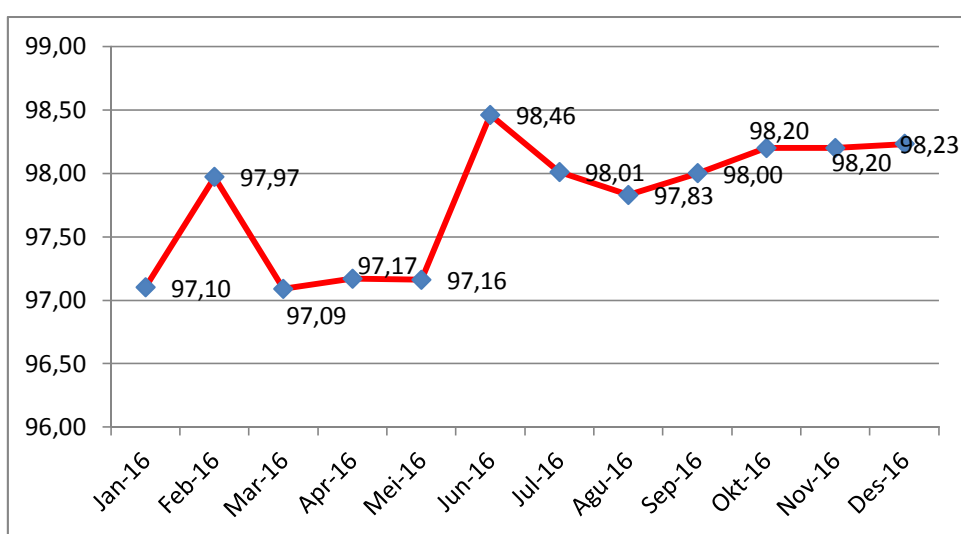
Uraian	Capaian Tahun 2014	Capaian Tahun 2015	Capaian Tahun 2016	Target Akhir RPJMA
Nilai Tukar Nelayan	100,61%	97,70%	97,79%	110,35%

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Januari 2017

NTN untuk periode 2016-2017 masih menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja pembangunan perikanan di

Aceh, dengan target ditahun akhir RPJMA 2017 sebesar 110,35, yang berarti bahwa masih diperlukan kerja keras dalam pencapaian IKU ini mengingat capaian sementara tahun 2016 masih sebesar 88,62%. Perkembangan NTN selama tahun 2016 seperti gambar berikut.

Gambar 3.8
Fluktuasi NTN Aceh selama Tahun 2016



Sumber : BPS Aceh; 2017 (diolah 2017)

NTN selama Januari hingga Desember 2016, fluktuatif sebagaimana pada gambar 3.8 Secara keseluruhan indeks harga yang diterima oleh nelayan mengalami peningkatan setiap bulannya, namun demikian kenaikannya lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang harus dibayarkan oleh nelayan. Berikut NTN Provinsi Aceh menurut subsektor Perikanan, periode Januari sampai dengan Desember 2016 :

Tabel 3.76

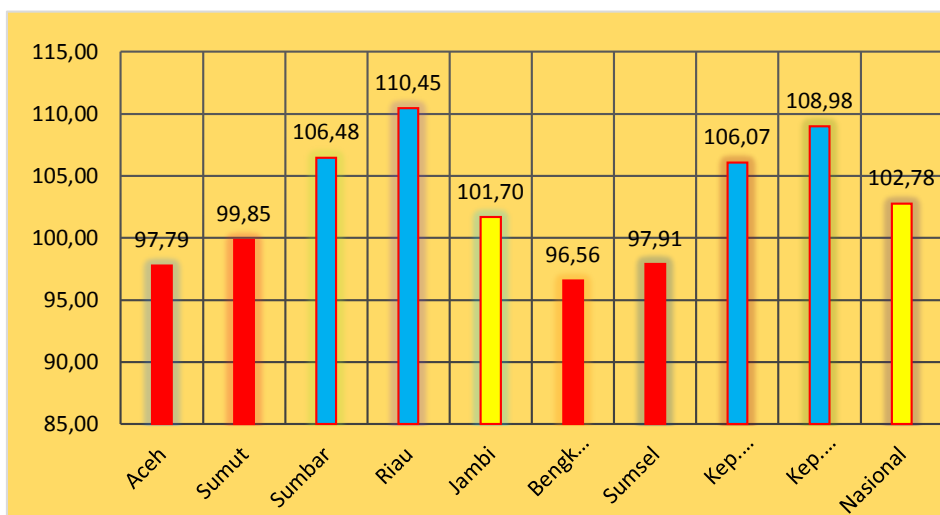
NTN Provinsi Aceh menurut subsektor perikanan,
Januari-Desember 2016

Bulan	2016		NTN Provinsi
	It	Ib	
Januari	115,18	118,61	97,10
Februari	116,59	119,00	97,97
Maret	115,32	118,78	97,09
April	114,72	118,07	97,17
Mei	115,05	118,41	97,16
Juni	117,06	118,88	98,46
Juli	117,53	119,91	98,01
Agustus	117,94	120,55	97,83
September	119,24	121,67	98,00
Oktober	119,63	121,82	98,20
November	119,63	121,82	98,20
Desember	119,83	121,99	98,23
Rata-Rata			97,79

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Januari 2017

NTN tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat kecil dibandingkan dengan tahun 2015. Namun, petani mengeluarkan biaya untuk usaha lebih besar (Ib) dibandingkan dengan hasil atau yang diterima (It) dari usaha tersebut, sehingga NTN Aceh tahun 2016 dengan peningkatan indeks yang dibayar (Ib) tidak bersamaan dengan peningkatan Indeks yang diterima (It) berarti nelayan mengalami kerugian atau tidak ada impas/break even dari usaha tersebut. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya.

Gambar 3.9
Perbandingan Rata-rata NTN
Provinsi se-Sumatera dan Nasional Tahun 2016



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) terlihat pada tahun 2016 tercatat ada 4 Provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki Nilai Tukar Nelayan dibawah 100, termasuk provinsi Aceh didalamnya. Artinya nelayan di ke-empat wilayah tersebut mengalami defisit. Penyebab belum membaiknya tingkat Nilai Tukar Nelayan di Aceh antara lain :

1. Tingginya inflasi di Provinsi Aceh, yang menyebabkan harga bahan baku untuk melaut dan pembudidayaan ikan ikut melonjak yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi.
2. Masih banyaknya jumlah nelayan kecil di Aceh yang mengandalkan penangkapan menggunakan alat sederhana dan perahu tempel dimana sangat tergantung pada cuaca sehingga membuat kesejahteraan nelayan masih rendah.

3. Tingginya target Provinsi melebihi target nasional sehingga perlu rasionalisasi angka.

- **Indikator kinerja "Nilai tukar petani" yang ditargetkan 115% dapat direalisasikan sebesar 98,85% dengan persentase tingkat capaian sebesar 85,96% atau dengan kategori Baik.**

NTP tanaman pangan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tahun 2012 NTP tanaman pangan berada diatas angka 100, yang berarti bahwa rata-rata petani mempunyai daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya produksi pertaniannya. Rata-rata NTP sub sektor tanaman pangan jauh lebih tinggi dibandingkan sub sektor lainnya (Hortikultura, Perkebunan, Perikanan) di Provinsi Aceh, sama halnya dengan NTP sub sektor Hortikultura yang berada diatas angka 100 pada tahun 2012.

Tahun 2013 NTP sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan dari tahun 2012, namun demikian NTP tanaman pangan tetap berada diatas angka 100 dan jauh lebih tinggi dibandingkan sub sektor lainnya di provinsi Aceh. Sedangkan NTP sub sektor tanaman hortikultura tahun 2013 berada dibawah angka 100, hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih kecil daripada indeks harga yang dibayar petani.

Tahun 2014 NTP sub sektor tanaman pangan kembali mengalami penurunan dari tahun 2013, hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga BBM dan banjir yang terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh sehingga indeks harga yang harus dibayar petani meningkat. Sebaliknya

NTP sub sektor tanaman hortikultura mengalami peningkatan dari tahun 2013 dan menjadi NTP tertinggi diantara sub sektor lainnya.

Tahun 2015 NTP sub sektor tanaman hortikultura mengalami peningkatan dikarenakan adanya peningkatan indeks yang diterima petani yang lebih besar dari peningkatan indeks yang dibayar petani. Peningkatan indeks yang diterima petani disebabkan karena naiknya indeks kelompok buah-buahan, sayur-sayuran, sedangkan tanaman obat-obatan turun. Untuk NTP subsektor tanaman pangan tahun 2015 mengalami penurunan, indeks yang diterima petani mengalami penurunan akibat turunnya indeks kelompok padi dan kelompok palawija sedangkan konsumsi rumah tangga dan indeks biaya produksi naik mengakibatkan pengeluaran petani meningkat.

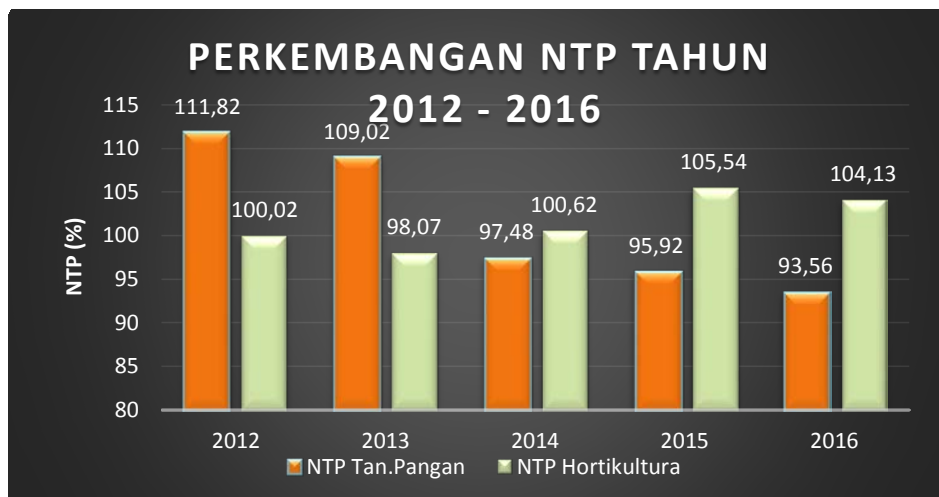
Nilai NTP sub sektor tanaman pangan tahun 2016 sebesar 93,56 masih sangat rendah jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2017 sebesar 142,7, dibutuhkan usaha keras dan kerjasama semua pihak untuk mencapai target tersebut. Tahun 2016 NTP sub sektor tanaman pangan dan tanaman hortikultura mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2015, meskipun tidak terlalu signifikan. NTP sub sektor tanaman pangan dalam beberapa tahun terakhir tidak mencapai angka 100 dan terus mengalami penurunan, rendahnya NTP berimbas pada berkurangnya tingkat kesejahteraan petani. Padahal, hasil produksi pertanian Aceh mengalami peningkatan, tapi kondisi ini tidak terlalu berpengaruh dalam mendongkrak nilai kesejahteraan para petani. Hal

ini disebabkan karena harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar petani untuk biaya produksi dan konsumsi barang dan jasa lainnya. Tingginya biaya produksi salah satu faktornya dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur yang tersedia, seperti akses jalan ke pasar yang mengalami kerusakan sehingga petani harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dari seharusnya.

Selanjutnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani sangat diperlukan peran serta dinas-dinas sektoral dalam menekan harga yang dibayar petani terhadap hasil pertanian, ini merupakan aspek lain dari peningkatan daya beli petani yaitu pengurangan beban pengeluaran rumah tangga petani. Terdapat hubungan negatif antara pengeluaran petani terhadap NTP, sehingga upaya peningkatan NTP dapat dilakukan melalui penurunan harga/biaya barang dan jasa, yaitu meliputi harga-harga produk yang dikonsumsi (yang mencakup produk bahan makanan, produk makanan, biaya sandang, biaya perumahan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya transportasi dan komunikasi), dan harga/biaya sarana produksi dan barang modal (yang mencakup harga/biaya pembelian bibit, pupuk-obat, sewa lahan, transportasi, dan penambahan barang modal).

Perbandingan NTP tahun 2016 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 3.29
Perkembangan NTP (Nilai Tukar Petani)
Tahun 2012 – 2016



Pencapaian Nilai Tukar Petani pada tahun 2015 didukung oleh 2 sub sektor Nilai Tukar Petani yang rata-rata tingkat capaiannya dalam kategori baik, bahkan sub sektor hortikultura tingkat capaiannya rata-rata sebesar 104,13. Rata-rata capaian sub sektor dimaksud sebagaimana tertera pada tabel 3.77 di bawah ini :

Tabel 3.77
Nilai Tukar Petani (NTP)
berdasarkan sub sektor

No.	Sub Sektor	Nilai Tukar Petani		
		Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Tanaman Pangan	95,73	95,92	93,56
2.	Hortikultura	102,69	105,54	104,13
Gabungan		95,64	100,73	98,85

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh, Januari 2017

Rata-rata Nilai Tukar Petani pada tahun 2013 di Aceh sebesar 98,15%, pada tahun 2014 sebesar 95,64%, nilai ini mengalami peningkatan di tahun 2015 hingga mencapai 100,73%, dan pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan hingga pada angka 98,85%. Berikut perbandingan rata-rata Nilai Tukar Petani di Aceh Tahun

2013 sampai dengan tahun 2016, sebagaimana tertera pada tabel 3.78 di bawah ini :

Tabel 3.78
Nilai Tukar Petani (NTP)

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Nilai Tukar Petani	98,15%	95,14%	100,73%	98,85%

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh, Januari 2017



Sasaran Strategis-14

Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.79 di bawah ini :

Tabel 3.79
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat belas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Produksi Padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun* :				
	a. Padi	2.550.000 ton	2.321.328 ton	91,03	Baik
	b. Jagung	250.000 ton	286.730 ton	114,69	Sangat Baik
	c. Kedelai	70.000 ton	23.506 ton	33,58	Kurang
2	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura :				
	a. Bawang Merah	6.781 ton	6.288,9 ton	92,74	Baik
	b. Kentang	81.598 ton	50.674,3 ton	62,10	Cukup
	c. Cabe Besar	52.012 ton	41.031,3 ton	78,89	Baik
3	d. Cabe Rawit	54.124 ton	41.595,1 ton	76,85	Baik
	Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah :				
	a. Karet Kering	390.099 ton	72.710 ton	18,64	Kurang
	b. Kelapa Sawit	1.021.603 ton	505.844 ton	49,51	Kurang
4	c. Kakao Biji Kering	209.425 ton	43.912 ton	20,97	Kurang
	Produksi Daging per tahun *	32.348.218 kg	36.386.393 kg	112,48	Sangat Baik
5	Produksi telur pertahun	17.453.966 kg	15.192.018 kg	87,04	Baik
6	Jumlah Produksi perikanan*	335.224 ton	265.039,7 ton	79,06	Baik
Rata-rata tingkat Capaian				70,58	Cukup

Berdasarkan hasil pengukuran 6 (enam) indikator kinerja dari sasaran strategis "Meningkatnya Produktivitas dan Nilai

Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan” mampu memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **70,58%** atau kategori **Cukup**.

Hasil pengukuran dari masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Indikator kinerja ”produksi padi atau bahan pangan lainnya” yang ditargetkan sebanyak 2.550.000 ton, dapat direalisasikan sebanyak 2.321.328 ton dengan persentase tingkat capaian sebesar 91,03% atau dikategorikan Baik.**

Produksi padi tahun 2013 mengalami peningkatan sekitar 9,40 persen bila dibandingkan dengan produksi tahun 2012. Produksi padi tahun 2013 mencapai 1.956.939 Ton Gabah Kering Giling (GKG), sedangkan pada tahun 2012 sebesar 1.788.738 Ton atau mengalami peningkatan sebesar 168.201 Ton. Peningkatan produksi padi tahun 2013 lebih disebabkan terjadinya kenaikan produksi padi sawah yaitu sebesar 164.908 Ton (9,30 persen) dibandingkan tahun 2012, sedangkan kenaikan produksi untuk padi ladang yaitu sebesar 3.293 Ton (20,90 persen).

Produksi padi tahun 2014 menurun sekitar 6,99 persen bila dibandingkan dengan produksi tahun 2013. Produksi padi tahun 2014 tercatat hanya sebesar 1.820.062 Ton GKG mengalami penurunan sebesar 136.877 ton jika dibandingkan dengan produksi padi tahun 2013 yang mencapai nilai 1.956.939 ton. Penurunan ini lebih disebabkan karena melemahnya produksi padi sawah yaitu sebesar 141.790 ton GKG (7,32 persen) dibandingkan tahun 2013, sedangkan untuk padi ladang mengalami

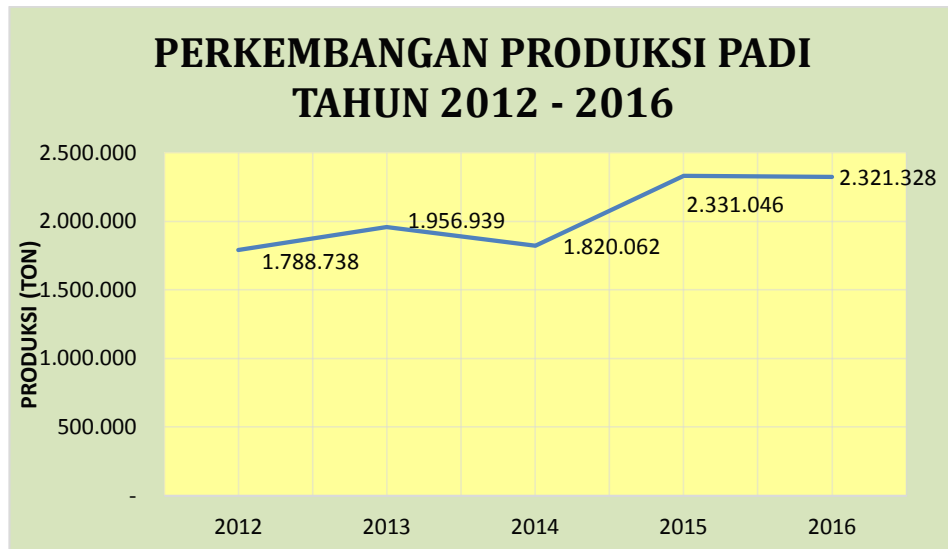
kenaikan produksi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4.913 ton (4,51 persen) namun belum mampu berkontribusi terhadap produksi padi tahun 2014. Selain itu, adanya puso/gagal panen seluas 27.056 Ha lebih tinggi dari puso tahun 2013 yaitu 9.244 Ha juga ikut andil dalam penurunan produksi tahun 2014. Untuk tahun 2015 total peningkatan produksi padi adalah sekitar 28,07 persen atau 510.984 Ton dibandingkan tahun 2014, sedangkan tahun 2016 produksi padi mengalami penurunan sebesar 9.718 Ton atau 0,42 persen dibandingkan tahun 2015.

Apabila dibandingkan realisasi kinerja produksi Padi sampai dengan tahun ini yaitu realisasi produksi tahun 2016 sejumlah 2.321.328 ton dengan target jangka menengah tahun 2017 yaitu 2.372.650 ton, maka dapat dikatakan realisasi tahun ini hampir mencapai target jangka menengah. Demikian juga dengan nilai produktivitas tahun 2016 sebesar 52,17 Ku/Ha dengan target jangka menengah tahun 2017 sebesar 52,59 Ku/Ha. Dengan mengevaluasi hasil kinerja tahun ini, menganalisis keberhasilan dan kegagalan berbagai kegiatan untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas, besar harapan bahwa target produksi dan produktivitas Padi jangka menengah tahun 2017 akan dapat dicapai.

Optimalnya tingkat capaian ini merupakan komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan swasembada pangan di Aceh dan sebagai salah satu daerah yang dapat memberikan kontribusi pencapaian swasembada pangan di Indonesia.

Grafik 3.30

Perkembangan Produksi Padi Tahun 2012 – 2016

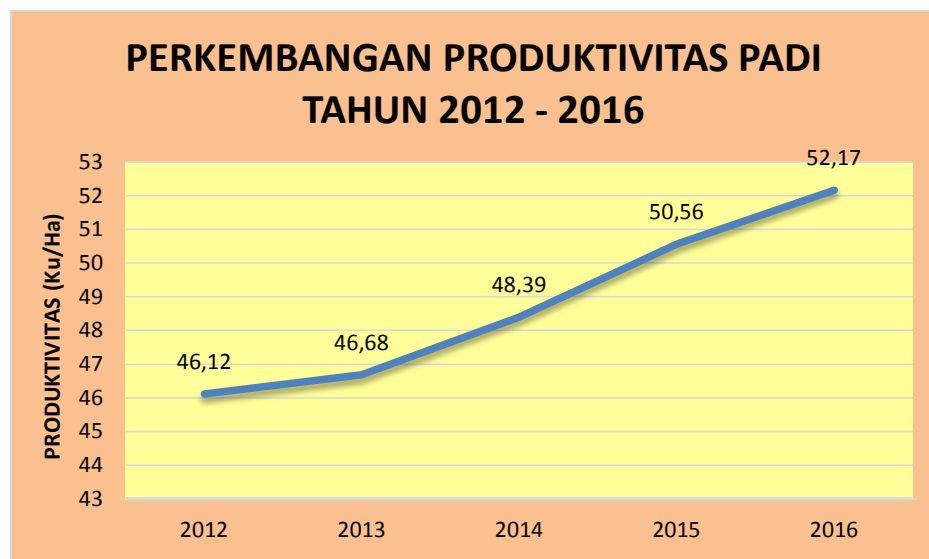


Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Desember 2016

Berikut Perkembangan Produktivitas Padi di Aceh Tahun 2012 – 2016 sebagaimana tertera di dalam grafik 3.31 di bawah ini :

Grafik 3.31

Perkembangan Produktivitas Padi Tahun 2012 – 2016



Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Desember 2016

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa hasil produksi per hektar padi beberapa tahun terakhir mengalami trend peningkatan, nilai produktivitas padi tahun 2012 adalah 46,12 Ku/Ha meningkat 1,21 persen menjadi 46,68 Ku/Ha di tahun 2013, meningkat lagi sekitar 3,66 persen menjadi 48,38 Ku/Ha di tahun 2014, tahun 2015 nilai produktivitas padi kembali mengalami peningkatan sebesar 4,48 persen menjadi 50,56 Ku/Ha, dan tahun 2016 nilai produktivitas kembali mengalami kenaikan menjadi 52,17 Ku/Ha atau naik 3,18 persen dari tahun 2015. Berdasarkan Angka Ramalan II tahun 2016 rata-rata nilai Produktivitas nasional adalah 52,64 Ku/Ha, sedangkan nilai produktivitas Padi Provinsi Aceh adalah 52,17 Ku/Ha mendekati rata-rata nilai produktivitas nasional, capaian ini merupakan suatu prestasi yang patut untuk terus ditingkatkan dalam usaha peningkatan produksi pada tahun-tahun mendatang.

- **Indikator kinerja ”produksi jagung” yang ditargetkan sebanyak 250.000 ton, dapat direalisasikan sebanyak 286.730 ton dengan persentase tingkat capaian sebesar 114,69% atau dikategorikan Sangat Baik.**

Produksi Jagung tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan. Produksi jagung tahun 2016 adalah sebesar 286.730 Ton atau sekitar 114,69 persen dari target, sedangkan produktivitas jagung tahun 2016 adalah sebesar 43,06 Ku/Ha atau sekitar 98,18 persen dari target yang telah ditetapkan.

Pencapaian yang melebihi target dan adanya peningkatan produksi yang cukup besar dibandingkan

tahun 2015 disebabkan karena jagung mempunyai pangsa pasar yang cukup luas dengan harga jual yang masih menguntungkan petani. Di samping itu juga dalam rangka mendukung kebutuhan jagung pipil dalam negeri yang sampai saat ini masih diimpor serta mengingat kebutuhan yang semakin meningkat terutama untuk industri pakan ternak menjadikan petani mempunyai minat yang tinggi dalam budidaya komoditi jagung. Ditambah lagi dengan adanya pemanfaatan lahan sawah oleh petani untuk melakukan penanaman jagung yang berdampak pada kenaikan produksi yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Sama halnya dengan produksi, produktivitas jagung juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Petani memilih menggunakan benih unggul yaitu benih jagung hibrida yang mutu produksinya tinggi dibandingkan benih jagung komposit. Beberapa daerah yang menjadi sentra produksi jagung adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

Berikut adalah Perbandingan Luas Lahan, Hasil Per Hektar, dan Produksi Jagung di Aceh Tahun 2014-2016 sebagaimana tertera pada tabel 3.80 di bawah ini:

Tabel 3.80
Perbandingan Luas Lahan, Hasil Per Hektar dan Produksi Jagung di Aceh Tahun 2014 dan 2016

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016*)
	Jagung	jagung	jagung
Luas Panen	47.357 Ha	47.967 Ha	66.591 Ha
Hasil Per Hektar	42,72 Ku/Ha	42,76 Ku/Ha	43,06 Ku/Ha
Produksi	202.319 ton	205.125 ton	286.730 ton

Ket : *) Angka Sementara (ASEM) 2016

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh,

Produksi jagung tahun 2016 meningkat cukup tinggi yaitu sekitar 39,78 persen atau sejumlah 81.605 ton dari produksi tahun 2015. Produksi meningkat akibat dari meningkatnya luas panen dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 38,83 persen atau seluas 18.624 Ha. Demikian halnya dengan produktivitas yang juga mengalami peningkatan di tahun 2016 sekitar 0,70 persen atau sebanyak 0,3 Ku/Ha dibandingkan tahun 2015. Berdasarkan Angka Ramalan II tahun 2016 rata-rata nilai Produktivitas Jagung nasional adalah 52,83 Ku/Ha, sedangkan nilai produktivitas Jagung Provinsi Aceh berdasarkan Angka Sementara (ARAM II) tahun 2016 adalah 43,06 Ku/Ha masih dibawah rata-rata nilai produktivitas nasional.

Apabila dibandingkan nilai produktivitas Jagung tahun 2016 sebesar 43,06 Ku/Ha dengan target jangka menengah tahun 2017 sebesar 45,92 Ku/Ha, maka peningkatan yang ingin dicapai adalah sebesar 6,23 persen dari capaian tahun 2016, sedangkan untuk target produksi Jagung jangka menengah tahun 2017 adalah sebesar 223.865 ton dan realisasi tahun 2016 adalah sebesar 286.730 ton, yang berarti capaian tahun ini telah melebihi target produksi jangka menengah tahun 2017.

Prestasi ini patut ditingkatkan dengan cara terus mengimbau petani jagung untuk tidak perlu khawatir merugi dalam mengembangkan produksi jagung karena prospek pasarnya lebih terbuka, selain itu peran Pemerintah juga diperlukan untuk mendorong jagung menjadi bagian konsumsi utama di masyarakat jika stok beras berkurang dengan cara memperkenalkan anak-anak

untuk mengkonsumsi jagung dan tidak tergantung dengan beras. Pemerintah daerah juga harus melindungi petani terutama saat harga pangan jatuh dengan cara mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembelian hasil panen petani saat harga jatuh, sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP).

- **Indikator kinerja "produksi kedelai" yang ditargetkan sebanyak 70.000 ton, hanya mampu direalisasikan sebanyak 23.506 ton dengan persentase tingkat capaian sebesar 33,58% atau dikategorikan Kurang.**

Produksi dan produktivitas Kedelai tahun 2016 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Produksi Kedelai tahun 2016 adalah sebesar 23.506 Ton atau sekitar 33,58 persen dari target, sedangkan produktivitas Kedelai tahun 2016 adalah sebesar 14,82 Ku/Ha atau sekitar 95,61 persen dari target yang telah ditetapkan. Produksi Kedelai tahun 2016 juga mengalami penurunan sekitar 50,94 persen atau sebesar 24.404 ton jika dibandingkan dengan produksi tahun 2015, sedangkan produktivitas Kedelai tahun 2016 mengalami peningkatan sekitar 1,44 persen atau sebesar 0,21 Ku/Ha dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Angka Ramalan II tahun 2016 rata-rata nilai produktivitas Kedelai nasional adalah 15,06 Ku/Ha, sedangkan nilai produktivitas Kedelai Provinsi Aceh berdasarkan Angka Ramalan (ARAM II) tahun 2016 adalah 14,82 Ku/Ha masih dibawah rata-rata nilai produktivitas nasional. Jika dibandingkan dengan target produksi dan produktivitas jangka menengah tahun 2017 yaitu sebesar 65.652 ton dan 16,35 Ku/Ha, maka dibutuhkan kerja

keras untuk mencapai angka tersebut mengingat komoditi Kedelai kurang diminati petani karena kurang memberikan keuntungan secara ekonomis akibat harga pasar yang rendah. Selain itu, kedelai impor memiliki biji yang lebih besar dan harga yang lebih murah dibandingkan kedelai lokal. Faktor lain yang menjadi penghambat kenaikan produksi kedelai yaitu efek La Nina. Iklim basah kurang kondusif untuk penanaman kedelai, tanaman kedelai menjadi puso karena banjir dan serangan OPT, hal ini memicu petani lebih memilih komoditas pangan yang lebih menguntungkan seperti padi. Sementara untuk lahan kering, petani lebih memilih tanaman jagung untuk dibudidayakan.

Perkembangan luas lahan, produktivitas dan produksi kedelai di Aceh tahun periode 2014-2016 sebagaimana tabel 3.81 di bawah ini:

Tabel 3.81
Perbandingan Luas Lahan, produktivitas dan Produksi
Kedelai di Aceh Periode 2014-2016

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016*)
	Kedelai	Kedelai	Kedelai
Luas Panen	42.784 Ha	32.796 Ha	15.866 Ha
Hasil Per Hektar	14,81 Ku/Ha	14,61 Ku/Ha	14,82 Ku/Ha
Produksi	63.352 Ton	47.910 Ton	23.506 ton

Ket : *) Angka Sementara (ASEM) 2016

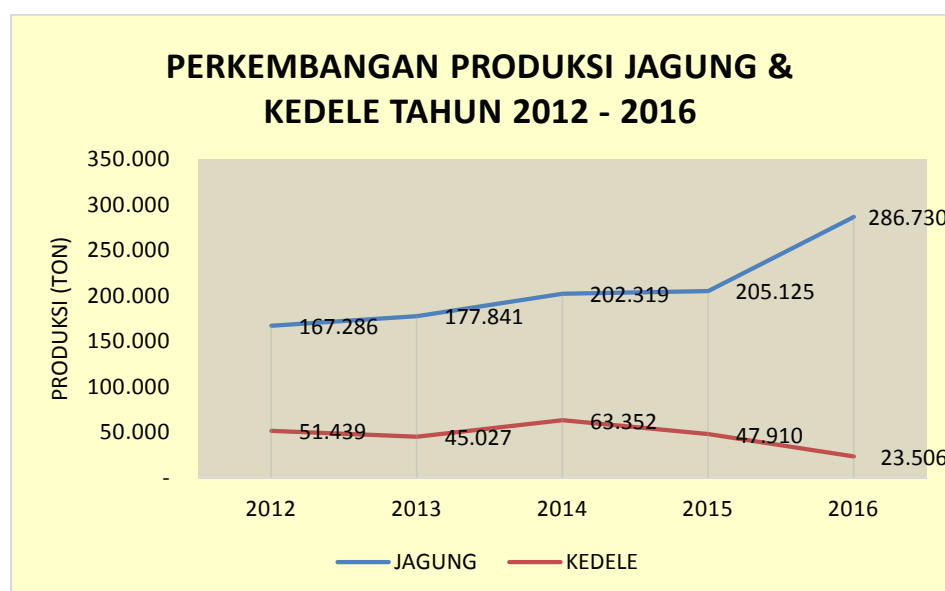
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh,

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah produksi, dan luas panen komoditi Kedelai tahun 2016 semuanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, kecuali hasil per hektar (produktivitas) yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Penurunan produksi Kedelai tahun 2016 disebabkan karena terjadinya penurunan luas panen seluas 16.930 Ha atau sekitar 50,94 persen dari tahun sebelumnya.

Penurunan produksi cukup besar ini terjadi karena keengganan petani menanam kedele akibat harga yang sangat rendah dalam beberapa waktu terakhir. Petani mulai kehilangan gairah dalam membudidayakannya. Harga kedele hanya berkisar Rp. 3.000-4.000/Kg, harga ini jauh dibawah biaya penanaman dan pemeliharannya.

Berikut Perkembangan Produksi Jagung dan Kedelai tahun 2012 - 2016.

Grafik 3.32
Perkembangan Produksi Jagung dan Kedelai di Aceh tahun 2012 - 2016

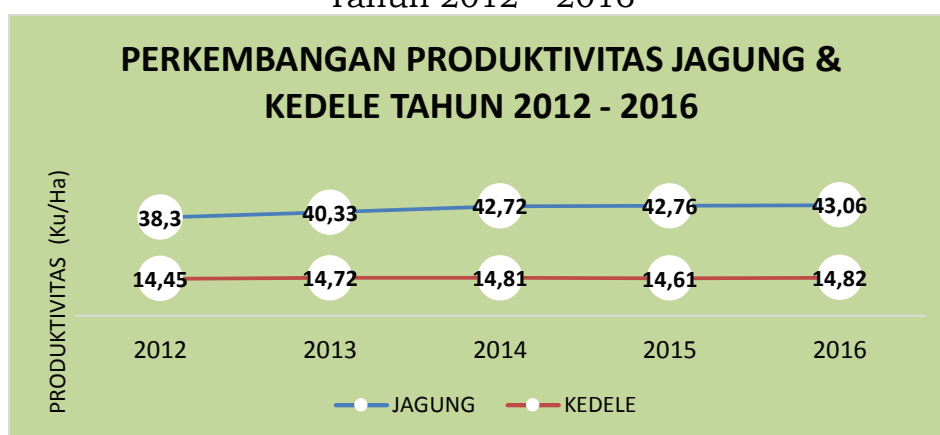


Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Desember 2016

Produksi Jagung beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan, tahun 2013 produksi jagung meningkat sebesar 6,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2014 produksi Jagung mengalami peningkatan sebesar 13,76 persen dibandingkan tahun 2013, tahun 2015 komoditi Jagung kembali mengalami peningkatan sebesar 1,39 persen dibandingkan 2014, dan

di tahun 2016 produksi jagung mengalami peningkatan cukup besar sekitar 39,78 persen dibandingkan tahun lalu. Sedangkan komoditi Kedelai tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 12,47 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2014 produksi komoditi ini mengalami peningkatan sebesar 40,70 persen, tahun 2015 produksi kedelai kembali mengalami penurunan sebesar 24,37 persen dibandingkan tahun 2014, dan tahun 2016 komoditi kedele mengalami penurunan produksi yang cukup besar yaitu sekitar 50,94 persen. Perkembangan Produktivitas Jagung dan Kedelai Tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.33
Perkembangan Produktivitas Jagung dan Kedelai di Aceh
Tahun 2012 - 2016



Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Desember 2016

Sejalan dengan peningkatan produksi, produktivitas Jagung juga mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Produktivitas tahun 2013 meningkat sebesar 5,30 persen dibandingkan tahun 2012, tahun 2014 produktivitas Jagung meningkat lagi sebesar 5,93 persen dibandingkan tahun 2013, dan kembali mengalami

peningkatan tahun 2015 sebesar 0,09 persen dibandingkan dengan tahun 2014, dan tahun 2016 produktivitas jagung juga mengalami peningkatan sebesar 1,44 persen dibandingkan tahun lalu. Pada komoditi Kedelai, berbeda dengan produksi yang mengalami penurunan, produktivitas kedelai tahun 2013 justru mengalami peningkatan sebesar 1,87 persen dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2014 selain mengalami peningkatan produksi, nilai produktivitas kedelai juga meningkat yaitu sebesar 0,61 persen dibandingkan tahun 2013. Tahun 2015 sejalan dengan penurunan produksi, nilai produktivitas kedelai juga mengalami penurunan sebesar 1,35 persen dibandingkan tahun 2014, sedangkan tahun 2016 nilai produktivitas kedelai meningkat sebesar 1,44 persen namun produksinya jauh menurun dibandingkan tahun lalu.

- **Indikator kinerja ”Jumlah Produksi tanaman hortikultura”, di Aceh merupakan akumulasi dari beberapa komoditi hortikultura di Aceh. Analisis dari beberapa produksi tanaman hortikultura di Aceh adalah sebagai berikut :**

Produksi tanaman hortikultura di Aceh hanya diprioritaskan pada empat komoditi yaitu bawang merah, kentang, cabe besar, cabe rawit yang pada tahun 2016 bawang merah ditargetkan sebesar 6.781 ton dapat terealisasi sebesar 6.288,9 Ton dengan tingkat persentase 92,74%. Produksi Bawang Merah pada tahun 2016 mengalami peningkatan produksi, sedangkan produksi komoditi lainnya mengalami penurunan dibandingkan

tahun 2015. Peningkatan produksi Bawang Merah tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya mencapai sebesar 9,59 persen. Peningkatan produksi ini lebih disebabkan karena adanya peningkatan produktivitas yaitu adanya bantuan saprodi di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Pidie, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi tahun ini.

Sementara itu, untuk tanaman hortikultura lainnya seperti tanaman Kentang, Cabe Besar, Cabe Rawit, turun masing-masing 27,66 persen, 22,44 persen, 29,40 persen. Pada komoditi seperti Kentang, Cabe Besar, dan Cabe Rawit penurunan produksi dibandingkan tahun lalu lebih disebabkan oleh penurunan luas panen, meskipun ketiga komoditi tersebut mengalami peningkatan produktivitas.

Perkembangan produksi empat komoditi hortikultura tahun 2014-2016 sebagaimana tertera dalam tabel 3.82 di bawah ini :

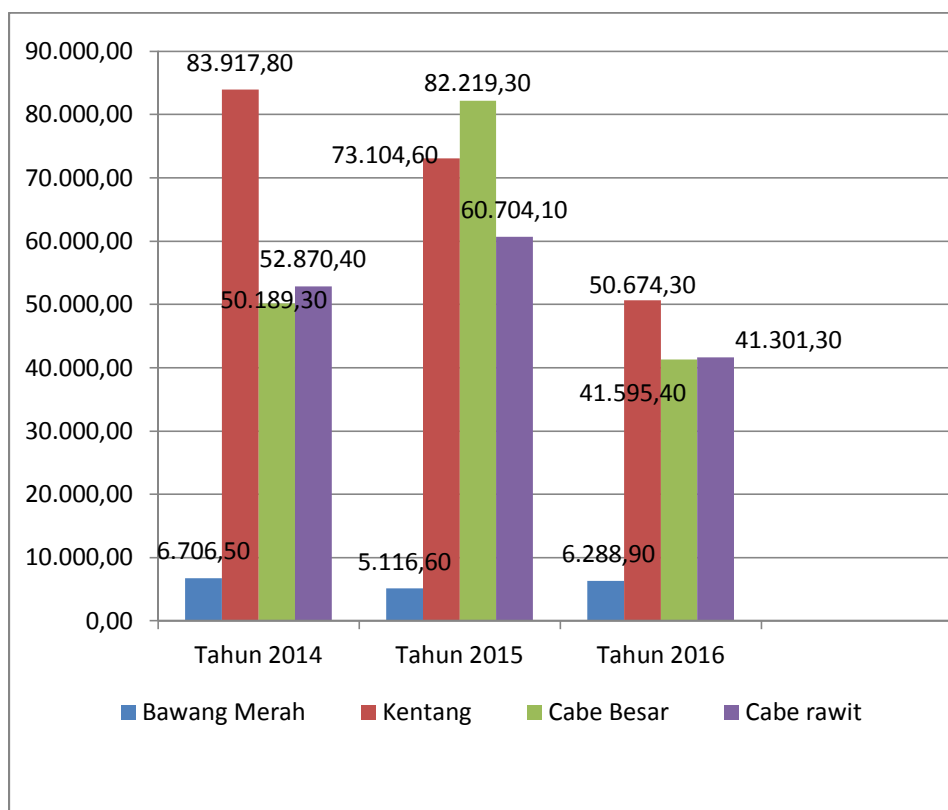
Tabel 3.82
Perkembangan Produksi Empat Komoditi Hortikultura
Tahun 2014-2016

Komoditi	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Bawang Merah	6.706,50 Ton	5.116,60 Ton	6.288,9 Ton
Kentang	83.917,80 Ton	73.104,60 Ton	50.674,3 Ton
Cabe Merah	50.189,30 Ton	82.129,30 Ton	41.301,3 Ton
Cabe Rawit	52.870,40 Ton	60.704,10 Ton	41.595,4 Ton

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh, Desember 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas Perkembangan produksi empat komoditi hortikultura tahun 2014-2016 secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.34
Perkembangan Produksi Komoditi Hortikultura di Aceh
Tahun 2014-2016



Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Desember 2016

- **Indikator kinerja "Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan Daerah" yang ditargetkan sebesar 1.621.127 ton, mampu direalisasikan sebesar 622.466 ton dengan persentase tingkat capaian sebesar 38,40% atau dengan kategori Kurang.**

Komoditi perkebunan yang dominan dikembangkan di Aceh oleh rakyat, swasta, maupun BUMN adalah kelapa sawit, karet, kakao.

Produksi Komoditi unggulan Aceh untuk Tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun

2015. Pada komoditi Karet Kering, mengalami penurunan dari tahun 2015 yang berjumlah 99.120 ton menjadi 72.710 ton, demikian juga pada komoditi kelapa sawit di Aceh, dimana produksi tahun 2015 mencapai 738.657 ton, turun pada tahun 2016 hingga 505.844 ton. Namun demikian, lain halnya dengan komoditi kakao biji kering. Pada tahun 2016 komoditi kakao biji kering mengalami peningkatan jumlah produksi hingga mencapai 43.912 ton, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 172 ton dari tahun sebelumnya.

Perkembangan produksi tiga komoditi perkebunan unggulan di Aceh tahun 2012-2016 sebagaimana tertera pada tabel 3.83 di bawah ini :

Tabel 3.83

Peningkatan Produksi tiga komoditi perkebunan unggulan di Aceh tahun 2012-2016 (dalam ton)

Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Peningkatan Produksi Komoditi unggulan daerah :					
a. Karet	64.621	72.483	91.793	99.120	72.710
b. Kelapa Sawit	183.344	310.766	355.366	738.657	505.844
c. Kakao biji kering	37.582	36.661	37.514	43.740	43.912

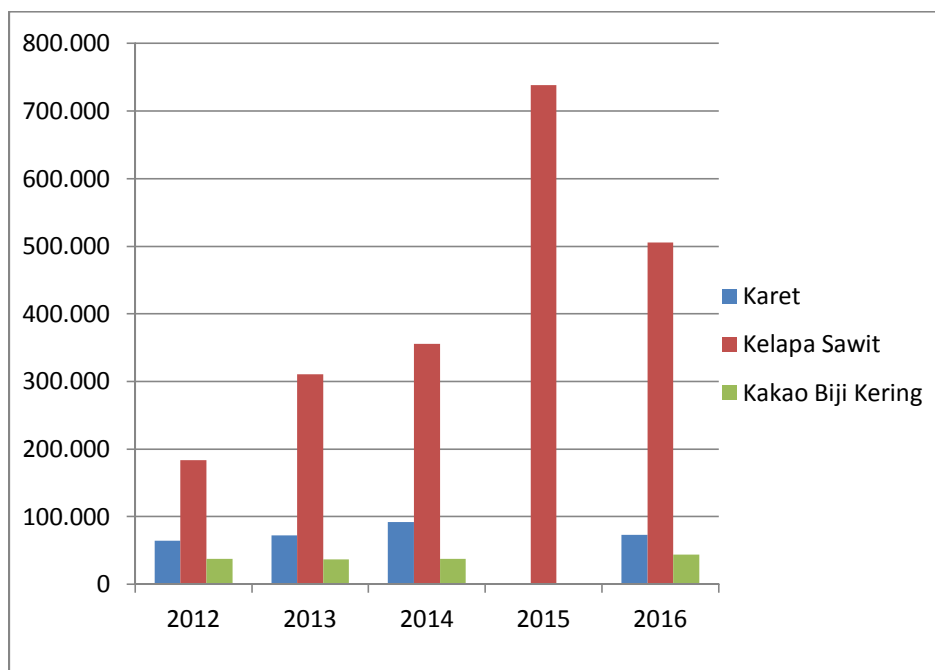
Sumber : Dinas Perkebunan Aceh, Desember 2016

*; angka sementara bulan desember 2016

Pencapaian kinerja produksi komoditi unggulan di Aceh dicapai melalui pelaksanaan program peningkatan produksi tanaman perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.303.342.021,-.

Berdasarkan tabel tersebut di atas secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 3.35
Perkembangan Produksi komoditi perkebunan unggulan di Aceh tahun 2012-2016 (dalam ton)



Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, Desember 2016

- **Indikator kinerja "Produksi daging" yang ditargetkan sebesar 32.348.218 kg, mampu direalisasikan sebesar 36.386.393 Kg dengan persentase tingkat capaian sebesar 112,48 % atau dengan kategori Sangat Baik.**

Produksi daging terbesar pada komoditi ayam ras petelur mencapai 147,8% , diikuti oleh ayam ras pedaging sebesar 131,5%. Meningkatnya produksi daging ayam ras petelur meskipun belum sebanding dengan peningkatan populasinya yang hanya sebesar 5,1% dibanding tahun 2015, namun sudah menunjukkan kinerja bahwa

Pemerintah Aceh berkomitmen dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi produk peternakan.

Pada ternak ruminasia, produksi tertinggi disominasi pada produksi domba. Capaian produksi tertinggi pada komoditi domba. Capaian produksi terendah pada komoditi kambing. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan populasi kambing tidak sebanding dengan pemotongan ternak kambing. Rendahnya capaian populasi kambing disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman dan pengetahuan petani terhadap budidaya ternak serta kesulitan dalam mengatasi penyakit kambing seperti scabies, orf dan tympani. Tingginya pemotongan ternak kambing disebabkan oleh perspektif minat konsumen di Aceh terhadap daging kambing sangat tinggi terutama pada Hari Raya Idul Adha dan upacara kelahiran anak (Aqiqah). Ternak kambing mempunyai nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan domba. Angka pemotongan ternak kambing tahun 2016 tercatat sebesar 91.706 ekor/tahun. Meningkatnya permintaan produksi daging kambing secara simultan menekan laju pertumbuhan populasi ternak kambing di Aceh.

Perkembangan populasi ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) pada 2015 dan 2016 sebesar 4,2% mengalami penurunan sebesar 8% dari tahun sebelumnya. Adapun data perkembangan populasi ternak ruminansia tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat dari tabel 3.84 di bawah ini :

Tabel 3.84
Perkembangan populasi ternak ruminansia
tahun 2015 dan 2016

Uraian	Jumlah Populasi	
	Tahun 2015	Tahun 2016
Populasi ternak per tahun :		
Sapi potong	580.287 Ekor	600.756 Ekor
Kerbau	171.747 Ekor	178.392 Ekor
Kambing	594.065 Ekor	623.038 Ekor
Domba	107.163 Ekor	112.394 Ekor
Jumlah	1.453.262 Ekor	1.514.580 Ekor

Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Desember 2016

Peningkatan populasi ternak merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan produksi dan produktifitas ternak sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan asal ternak. Adapun pertumbuhan populasi ternak ruminansia baik kecil maupun besar secara keseluruhan adalah sebesar 4,2%, mengalami penurunan sebesar 8,98% dari periode sebelumnya. Hal ini terjadi terutama pada populasi sapi potong dan kerbau, mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,4% untuk sapi potong dan 1% untuk ternak kerbau. Untuk mengetahui perkembangan populasi ternak unggas tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 3.85 di bawah ini:

Tabel 3.85
Perkembangan populasi ternak unggas di Aceh
tahun 2015 dan 2016

Uraian	Populasi	
	Tahun 2015	Tahun 2016
Populasi ternak per tahun :		
Ayam Buras	5.184.254 Ekor	5.350.685 Ekor
Ayam ras Petelur	340.970 Ekor	357.678 Ekor
Ayam Pedaging	4.591.820 Ekor	5.051.004 Ekor
Itik	2.186.058 Ekor	2.267.548 Ekor
Jumlah	12.303.102 Ekor	13.026.915 Ekor

Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Desember 2016

Perkembangan populasi unggas secara keseluruhan adalah 5,9%, dimana mengalami peningkatan sebesar 1% dari periode sebelumnya. Peningkatan yang signifikan terjadi

pada populasi ayam ras pedaging yaitu sebesar 10%, mengalami peningkatan sebesar 5,1% dari tahun lalu. Sementara untuk populasi ayam buras (menurun sebesar 1,8% dari tahun lalu) dan 3,7% untuk itik (menurun sebesar 1,2% dari tahun lalu). Tingginya populasi ayam ras pedaging di Provinsi Aceh dikarenakan usaha peternakan ayam ras pedaging difasilitasi oleh PT. Charoon Phokphan Indonesia (CPI) yang merupakan mitra kerja Dinas Kesehatan hewan dan Peternakan.

Populasi ayam buras pada tahun 2016 meningkat 3,2% dibandingkan dengan capaian tahun 2015 walaupun masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 56,2%. Peningkatan populasi ini disebabkan karena rendahnya angka kematian ternak ayam buras. Ayam buras memiliki karakteristik tubuh yang tahan terhadap penyakit tertentu sehingga ayam buras mudah dan murah untuk dipelihara. Disamping itu Pemerintah terus berupaya dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan penyakit penular unggas, diantaranya dengan program pencegahan (vaksinasi) penyakit New castle Disease (ND), pembinaan peternak serta penyediaan obat dan suplemen unggas.

Populasi itik tahun 2016 meningkat 3,5% dibandingkan dengan capaian tahun 2015 walaupun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 68,9%. Hal ini karena usaha peternakan itik masih belum berkembang di wilayah Aceh. Usaha itik hanya berupa usaha sampingan. Adanya pembinaan kelompok masyarakat terhadap produk olahan telur itik asin yang difasilitasi oleh Pemerintah mendorong motivasi masyarakat dalam usaha pengembangan ternak itik khususnya itik petelur. Telur itik asin kelompok binaan

sering mengikuti even Pameran produk peternakan baik lokal maupun nasional sebagai salah satu kuliner Aceh.

Capaian perkembangan populasi ternak beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari tabel 3.86 di bawah ini :

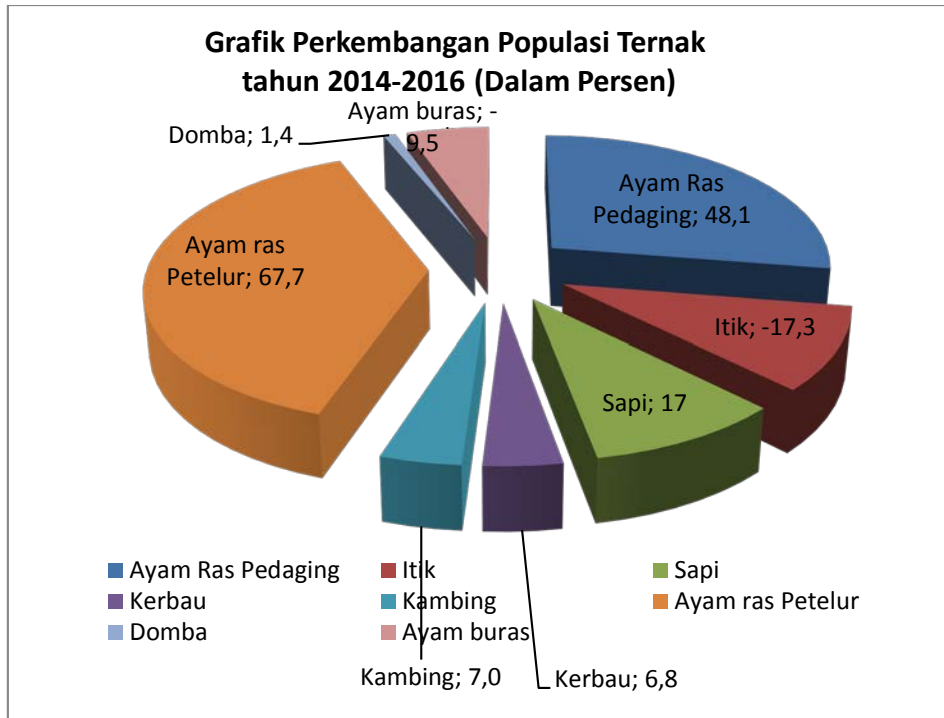
Tabel 3.86
Analisa Capaian Perkembangan populasi ternak di Aceh tahun 2014-2016

Jenis Ternak	Realisasi		
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Sapi	511.452 ekor	580.349 ekor	600.818 ekor
Kerbau	331.554 ekor	171.747 ekor	178.392 ekor
Kambing	824.301 ekor	594.065 ekor	623.038 ekor
Domba	184.972 ekor	5.184.254 ekor	112.394 ekor
Ayam Buras	9.065.081 ekor	340.970 ekor	5.350.685 ekor
Ayam ras Petelur	363.887 ekor	4.591.820 ekor	357.678 ekor
Ayam ras Pedaging	3.522.058 ekor	2.186.058 ekor	5.051.004 ekor
Itik	3.134.391 ekor	2.186.058 ekor	2.267.548 ekor

Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Desember 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan populasi ayam buras dan itik untuk tiga tahun terakhir menurun 9,55 untuk ayam buras dan 17,3% untuk itik. Sementara untuk populasi kambing dan domba mengalami peningkatan dari beberapa tahun sebelumnya yakni 7% untuk kambing dan 14% untuk domba. Perkembangan populasi sapi juga mengalami penurunan yaitu 17%.

Perkembangan populasi ternak dari tahun 2014 s.d 2016 dapat kita lihat pada grafik 3.36 berikut :



Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Desember 2016

Untuk terus meningkatkan produksi daging di Aceh, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.119.729.400,-, dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.099.580.000,-.

- **Indikator kinerja "Produksi telur per tahun" yang ditargetkan sebesar 17.453.966 kg, mampu direalisasikan sebesar 15.192.018 Kg dengan persentase tingkat capaian sebesar 87,04 % atau dengan kategori Baik.**

Produksi telur di Aceh sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2016 yang produksinya mencapai 15.192.018 kg atau meningkat 3,94 % dari tahun 2015 yang produksinya mencapai 14.615.666 kg, perkembangan produksi telur di Aceh dari tahun 2013-2015 sebagaimana tertera dalam tabel 3.87 di bawah ini:

Tabel 3.87
Perkembangan Produksi Telur di Aceh
Tahun 2014-2016

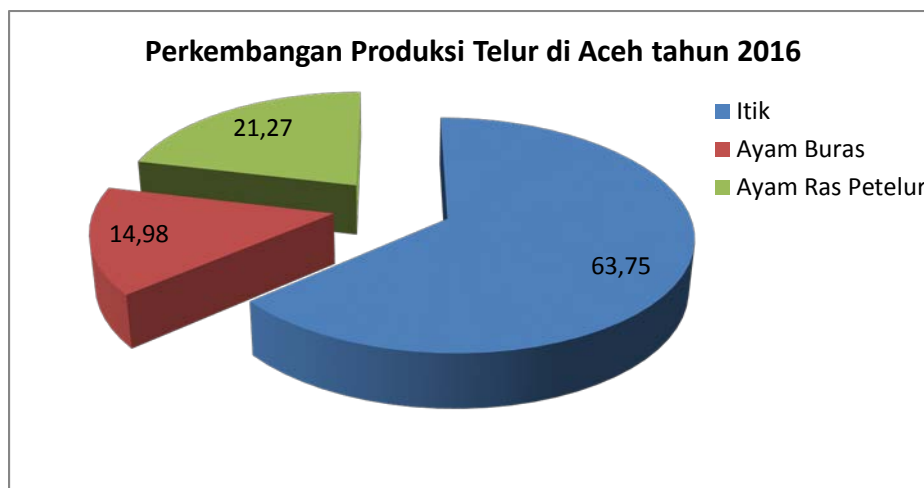
Jenis Ternak	2014	2015	2016
	Capaian	Capaian	Capaian
Ayam buras (kg)	2.525.379	2.204.474	2.275.245
Ayam ras petelur (kg)	1.892.313	3.080.170	3.231.102
Itik (kg)	11.610.667	9.331.022	9.685.671
Jumlah	16.028.359	14.615.666	15.192.018

Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Desember 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan produksi telur selama 3 (tiga) tahun terakhir sangat bervariasi. Secara keseluruhan rata-rata produksi telur menurun sebesar 4,9% per tahun. Kontribusi terbesar dari produksi telur di Aceh pada tahun 2016 masih didominasi oleh telur itik dengan persentase sebesar 67,7%.

Untuk terus meningkatkan produksi telur di Aceh, Pemerintah Aceh telah melaksanakan beberapa program strategis, diantaranya Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 122.195.903.622,-.

Grafik 3.37
Perkembangan Produksi telur di Aceh Tahun 2016



Sumber : Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, Desember 2016

- **Indikator kinerja “Jumlah Produksi Perikanan” yang ditargetkan sebesar 335.224 ton, hanya dapat direalisasikan sebesar 265.039,7 ton dengan persentase tingkat capaian sebesar 79,06 % atau dengan kategori Baik.**

Pada tahun 2016 tercapai produksi perikanan sebanyak 265.039,1 ton atau 79,06% dari target sebanyak 335.224 ton. Produksi perikanan tahun 2016 berasal dari produksi perikanan tangkap yang mencapai 180.872,6 ton dan produksi perikanan budidaya yang mencapai 84.167,10 ton. Namun demikian, produksi perikanan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 10,95% dibandingkan dengan tahun 2015 yang produksinya mencapai 238.874,8 ton.

Berdasarkan uraian tersebut, perkembangan produksi perikanan di Aceh sejak tahun 2012-2016 sebagaimana tabel 3.88 berikut.

Tabel 3.88
Volume produksi perikanan di Aceh
tahun 2012-2016

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Perikanan Tangkap	155.277,5	155.982,2	159.487,9	174.792,9	180.872,6
Perikanan Budidaya	40.215,5	46.878,1	58.757,65	64.081,9	84.167,1
Total Produksi	195.493	202.860,3	218.245,55	238.874,8	265.039,7

Keterangan : *) = angka sementara

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Januari 2017

Berdasarkan tabel tersebut di atas produksi perikanan di Aceh terdiri dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap, yang perkembangan produksinya dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Produksi perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya tahun 2016 mencapai 84.167,10 ton (angka sementara) atau 83,75% dari target 100.500 ton. Kegiatan produksi perikanan disumbangkan melalui kegiatan budidaya tambak, kolam, keramba dan sawah. Produksi pada budidaya kolam telah mencapai target yaitu sebesar 101,28% dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk kegiatan budidaya tambak, keramba dan sawah masih belum mencapai target.

Jumlah produksi per jenis budidaya tambak, kolam, keramba, jaring apung, jaring tancap, sawah, jaring apung dan laut dalam waktu 2012 sampai 2016 yakni sebagai berikut :

Tabel 3.89
Capaian produksi perikanan menurut jenis
tahun 2012-2016 (dalam ton)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Tambak	27.619,7	32.643,1	37.721,0	39.004,1	54.110,6
Kolam	10.986,8	12.751,8	18.930,0	21.084,6	20.813,1
Keramba	265,6	19,5	-	-	7.039,1
Sawah	1.081,6	933,9	1.150,6	1.414,1	2.204,3
Total	40.228,3	46.829,2	58.823,0	62.724,9	84.167,1

Keterangan : *) = angka sementara

Produksi sementara perikanan budidaya tahun 2016 masih didominasi oleh ikan bandeng 27,52% kemudian diikuti oleh produksi budidaya udang windu, ikan nila, ikan mas, ikan lele dan jenis lainnya dengan masing-masing produksinya 12,54%, 12,32%, 9,88%, 9,56% dan 11,66%.

Tidak tercapainya target produksi budidaya antara lain karena kondisi alam, banjir bandang yang menyebabkan panen dini atau gagal panen, masih kurangnya tenaga penyuluh perikanan yang ada di Provinsi Aceh juga menyebabkan belum berkembangnya potensi budidaya perikanan padahal potensinya sangat besar khususnya untuk budidaya rumput laut, ketersediaan lahan yang layak budidaya masih kurang, informasi pasar untuk masyarakat masih kurang dan makin sedikitnya pakan alami.

b. Produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap secara umum pada tahun 2016 belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 180.872,60 ton atau 77,06% dari target yang ditetapkan sebesar 234.724 ton. Produksi perikanan tangkap in terdiri dari perikanan tangkap perairan laut dan perikanan tangkap perairan umum. Secara rinci jumlah perikanan tangkap pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.90 berikut ini :

Tabel 3.90

Produksi Perikanan tangkap Aceh Tahun 2016

No.	Uraian	Realisasi
I.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	
a.	Perairan Laut	179.096 ton
b.	Perairan Umum	1.776 ton

Sumber ; DKP Aceh

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 (180.872,60 ton) jika dibandingkan tahun 2015 (174.793 ton) meningkat sebesar 13,15% atau berkisar 21.384,80 ton.

Tabel 3.91

Jumlah Produksi Perikanan dibandingkan dengan target jangka menengah Aceh

Uraian	Realisasi Tahun 2015	Tahun 2016			Capaian Akhir RPJMA
		Target	Realisasi	% capaian	
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	174.793	234.724	180.873	77,06	68,62

Sumber: DKP Aceh; 2016

Tidak tercapainya produksi perikanan tangkap dikarenakan masih mempunyai permasalahan seperti PPI/TPI yang tidak memenuhi standar yang layak, seperti tidak tersedianya lemari es penyimpanan ikan, dan pengelolaannya tidak hanya sebagai pengumpul dan pemisah ikan saja tapi dapat menjadi tempat pengolahan ikan kaleng secara langsung, kemiskinan, faktor umum biasanya karena biaya melaut lebih mahal dibandingkan hasil yang didapatkan, lemahnya armada perikanan, kapal-kapal yang sangat tradisional sehingga mereka tidak dapat berlayar jauh, pengembangan perikanan tangkap masih sangat ketergantungan dengan anggaran pemerintah, yang dimana anggaran tersebut sangat terbatas, illegal fishing, dan musim paceklik, dimana

bulan Mei sampai dengan Oktober 2016 terjadi gelombang tinggi dan angin kencang yang mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut secara optimal.

Pencapaian produksi perikanan di Aceh telah mencapai hasil yang optimal, hal ini merupakan upaya pemerintah Aceh dalam meningkatkan hasil produksi perikanan yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.764.276.083,- dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.017.045.508,-.



Sasaran Strategis-15 : *Meningkatnya eksplorasi sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan*

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran strategis ini disajikan dalam tabel 3.92 di bawah ini :

Tabel 3.92
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelimabelas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% tingkat capaian	Kategori
1	Persentase penurunan pertambangan tanpa ijin	24%	4,29%	17,88	Kurang
2	Rumah tangga pengguna air bersih	75,65%	74,09%	97,94	Baik
3	Rumah tangga pengguna listrik	94,50%	109,21%	115,57	Sangat Baik
Rata-rata tingkat Capaian				77,13	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran 3 (tiga) indikator kinerja dari sasaran strategis “*Meningkatnya eksplorasi sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan*” mampu memperoleh rata-rata persentase capaian sebesar **77,13%** atau kategori **Baik**.

Capaian kinerja sasaran strategis ini didukung oleh keberhasilan terhadap 3 (tiga) indikator kinerja, dengan uraian sebagai berikut :

- **Indikator kinerja "Persentase penurunan pertambangan tanpa izin" yang ditargetkan sebesar 24%, hanya dapat direalisasikan sebesar 3,84% dengan persentase tingkat capaian sebesar 16,00% atau dengan kategori *Kurang*.**

Hingga saat ini permasalahan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) semakin berkembang di semua sektor penambangan, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta menimbulkan perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market trading*), dan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Aceh bersama instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahunnya terus melakukan pembinaan dan penertiban penambangan ilegal/tanpa izin.

Berbagai upaya dan tindakan yang dilaksanakan Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menurunkan luasan kawasan PETI dengan perolehan penurunan yang signifikan sehingga pada tahun 2016, luasan kawasan pertambangan tanpa izin telah berkurang menjadi 1.372,13 Ha. Luasan kawasan tersebut telah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 1.508,87 Ha.



Gambar 3.10
Salah satu aktifitas
PETI di Kabupaten
dalam wilayah Aceh

Berdasarkan upaya tersebut, luasan kawasan PETI dari tahun 2012-2016 di Aceh terus mengalami penurunan. Perkembangan penurunan luasan PETI di Aceh dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tertera pada tabel 3.93 di bawah ini :

Tabel 3.93
Luas Wilayah Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Luas wilayah Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	2.614 Ha	2.582 Ha	1.745 Ha	1.509 Ha	1.372,13 Ha

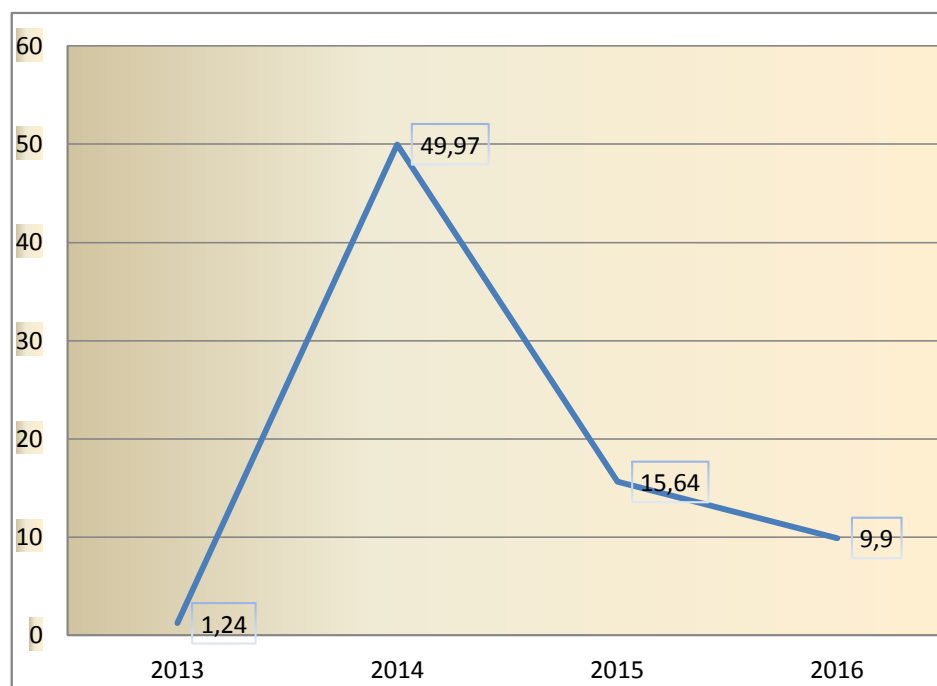
Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Desember 2016

Berdasarkan Tabel 3.92 di atas, Pada Tahun 2012, luasan kawasan PETI mencapai 2.614 Ha. Pada tahun 2013, luasan kawasan PETI kembali berhasil diturunkan oleh Pemerintah Aceh hingga mencapai angka 2.582 Ha. pada tahun 2014 yaitu sebesar 1.745 Ha, mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 47,97% atau setara dengan 837 Ha. Hingga akhir tahun 2015, Pemerintah Aceh telah mampu menurunkan luasan kawasan PETI sebesar 15,64% atau sebesar 236 Ha, sehingga luasan kawasan PETI menjadi 1.509, 87 Ha. Pada tahun 2016, berbagai upaya dan langkah strategis telah dilaksanakan Pemerintah Aceh dalam upaya penurunan luasan kawasan PETI di Aceh hingga mencapai 1.372,13 Ha. Capaian ini

dilaksanakan Pemerintah Aceh melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.080.230.000,-.

Sedangkan secara grafik, persentase penurunan pertambangan tanpa ijin sebagaimana tertera pada grafik 3.38 di bawah ini :

Grafik 3.38
Perkembangan Persentase Penurunan Pertambangan Tanpa Ijin Tahun 2013-2016



Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Januari 2017

Dari beberapa kabupaten yang masuk dalam wilayah PETI, Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan perkembangan penertiban PETI yang cukup baik. Hal ini dikarenakan telah berkurangnya luasan PETI sejumlah 58,87 Ha di Kecamatan Sawang dan Manggamat Kabupaten Aceh Selatan. Upaya penertiban wilayah PETI dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan instansi teknis pengelola pertambangan di Kab/Kota dan

pelaku penambangan atau masyarakat/pemuka masyarakat di sekitar lokasi penambangan illegal tersebut.

Berikut Kabupaten dan lokasi serta Luasan Aktivitas PETI di Aceh pada tahun 2016 sebagaimana tertera pada tabel 3.94 berikut ini :

Tabel 3.94
Perkembangan Luasan Aktifitas PETI di Aceh
Tahun 2015-2016

No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Komoditas	Luas Areal PETI	
				Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Aceh Selatan	Sawang	Emas Primer	11 Ha	7 Ha
		Manggamat	Emas Primer	256,87 Ha	143,13 Ha
2.	Pidie	Geumpang	Emas Primer	931 Ha	931 Ha
		Tangse	Emas Primer	182 Ha	182 Ha
		Tangse	Emas (placer)	-	2 Ha
3.	Aceh Barat	Lancong/ Tutut	Emas (placer)	70 Ha	0 Ha
		S.Sei Bintang	Emas (placer)	15 Ha	0 Ha
4.	Nagan Raya	Krueng Cut	Emas (placer)	16 Ha	0 Ha
		Krueng Kila	Emas (placer)	16 Ha	0 Ha
5.	Aceh Tengah	Linge	Emas (placer)	12 Ha	12 Ha
Total Luasan				1.509,87Ha	1.372,13 Ha

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Januari 2017

Upaya pembinaan dan penertiban PETI di Aceh terus dilaksanakan sehingga akhir periode RPJMA tahun 2012-2017 yang menargetkan luasan kawasan PETI di Aceh dapat turun hingga mencapai 261,4 Ha.

- **Indikator kinerja "Rumah tangga pengguna air bersih" yang ditargetkan sebesar 75,65% mampu direalisasikan sebesar 74,09% dengan tingkat persentase capaian sebesar 97,94% atau dengan kategori Baik.**

Terpenuhinya kebutuhan air bersih pada setiap rumah tangga adalah merupakan kebutuhan pokok. ketersediaan air bersih merupakan salah satu prasyarat yang dapat dijadikan indikator tingkat derajat kesehatan dan dalam rangka penurunan persentase lingkungan

kumuh. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Aceh dalam RPJMA Tahun 2012-2017 yang salah satu indikator adalah peningkatan rumah tangga pengguna air bersih, yang setiap tahun bertambah.

Pada tahun 2016, rumah tangga pengguna air bersih di Aceh ditargetkan menjadi 75,65%, namun hanya mampu direalisasikan sebesar 34,30%. Capaian ini dihitung berdasarkan cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih di setiap Kabupaten/Kota di Aceh. Pencapaian yang belum optimal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang akan dilayani air bersih di Aceh terus bertambah, dan belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur air bersih di beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh.

Dalam upaya pemenuhan dan peningkatan kebutuhan Rumah tangga pengguna air bersih, selain dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait, Pemerintah Aceh secara khusus juga telah membentuk BPSPAM.

- **Indikator kinerja "Rumah tangga pengguna listrik" yang ditargetkan sebesar 94,50% mampu direalisasikan sebesar 109,21% dengan tingkat persentase capaian sebesar 115,57% atau dengan kategori *Sangat Baik*.**

Akses rumah tangga terhadap listrik merupakan suatu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi dan peluang bagi kondisi kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Aceh berkomitmen dalam memperluas jaringan listrik kepada rumah tangga pengguna listrik, baik melalui

kerjasama dengan PLN maupun melalui pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan potensi daerah.

Capaian kinerja sebesar 109,21% rumah tangga pengguna listrik merupakan bukti kongkrit dalam meningkatkan akses rumah tangga terhadap pemenuhan kelistrikan. Persentase rumah tangga pengguna listrik di Aceh Tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan sebagaimana tertera pada tabel 3.95 berikut ini :

Tabel 3.95
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Aceh
Tahun 2012-2016

Uraian	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Rumah tangga pengguna listrik	88,48%	97,25%	97,56%	97,58%	109,21%

C. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan pasal (1) point 23 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Gubernur Aceh dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah menetapkan Qanun Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 12.874.631.946.619,00,-** dengan struktur dan komponen sebagai berikut :

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



I. PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Aceh	Rp. 2.057.481.533.300,00
2.	Dana Perimbangan	Rp. 1.670.711.099.000,00
3.	Lain-lain pendapatan yang Sah	Rp. 8.822.973.419.500,00
Jumlah		Rp. 12.551.166.051.800,00

II. BELANJA		
1.	Belanja Langsung	Rp. 6.775.132.114.290,00
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 6.099.499.832.239,00
Jumlah		Rp. 12.874.631.946.619,00

III. PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 328.465.894.819,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah		Rp. 323.465.894.819,00

Secara rinci, rencana dan realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Aceh pada tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 3.96 di bawah ini :

Tabel. 3.96
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Aceh (APBA)
Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PENDAPATAN ACEH				
1.	Pendapatan Asli Aceh	2.057.481.533.300,00	2.031.997.964.906,73	98,76
2.	Dana Perimbangan	1.670.711.099.000,00	1.572.466.631.620,00	94,12
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	8.822.973.419.500,00	8.731.916.398.976,00	98,97
Jumlah		12.551.166.051.800,00	12.336.380.995.502,70	98,29

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PEMBIAYAAN ACEH				
1.	Penerimaan Pembiayaan Aceh	328.465.894.819,00	288.676.554.172,33	87,89
2.	Pengeluaran Pembiayaan Aceh	5.000.000.000,00	70.795.431.626,89	1.415,91
Jumlah		323.465.894.819,00	217.881.122.545,44	67,36

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, Januari 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan Aceh menunjukkan tingkat capaian yang optimal, karena secara keseluruhan realisasi anggaran pendapatan mencapai sebesar Rp. 12.336.380.995.502,70 dari

target yang direncanakan sebesar Rp. 12.551.166.051.800,00,. Sedangkan realisasi anggaran pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp. 323.465.894.819,00, hanya mampu direalisasikan sebesar Rp. 217.881.122.545,44,.

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan Aceh tahun 2016, realisasi anggaran belanja Aceh yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara rinci sebagaimana tertera pada tabel 3.97 di bawah ini :

Tabel. 3.97
Realisasi Anggaran Belanja Aceh Tahun 2016

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA				
1.	Belanja Tidak Langsung	6.099.499.832.239,00	6.028.564.352.590,14	98,84
2.	Belanja Langsung	6.775.132.114.290,00	6.091.148.844.056,93	89,90
Jumlah		12.874.631.946.619,00	12.119.713.196.647,10	94,14

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, Januari 2017

Berdasarkan komposisi Anggaran Belanja Aceh tahun 2016 yang berjumlah Rp. 12.874.631.946.619,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.099.499.832.239,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 6.028.564.352.590,14 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.775.132.114.290,00, dengan realisasi sebesar Rp. 6.091.148.844.056,93,

Perkembangan dan realisasi APBA serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, namun rata-rata realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun mencapai 92,63%, secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel 3.98 di bawah ini :

Tabel 3.98
Jumlah dan Realisasi APBA
dalam kurun waktu 2012-2016

No.	Tahun	APBA		%
		Jumlah	Realisasi	
1.	2012	9.711.938.653.801	8.757.321.935.052	90,17
2.	2013	12.398.354.500.285	11.217.741.311.905	90,48
3.	2014	12.939.644.749.248	12.045.847.341.692,80	93,09
4	2015	12.749.671.570.835	12.149.422.255.379,70	95,29
5	2016	12.874.631.946.619,00	12.119.713.196.647,10	94,14

Sumber : Dinas Keuangan Aceh, Januari 2017

Hingga akhir tahun 2016, kemampuan daya serap anggaran untuk mewujudkan kinerja pada tahun 2016 mencapai 89,90%. Tingkat pencapaian realisasi anggaran yang relatif baik tersebut lebih kecil dari tingkat capaian kinerja rata-rata yang mencapai 96,95%. Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Aceh menjadi lebih efisien sebesar 7,05% dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, sejalan dengan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Aceh tahun 2016 merupakan gambaran tentang capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017.

Pencapaian kinerja Pemerintah Aceh merupakan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 15 sasaran strategis dan 70 indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan membandingkan realisasi dan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis "*Meningkatnya Implementasi UUPA dalam Percepatan Pembangunan dan Menjaga Keberlanjutan Perdamaian*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **127,56%**, dengan predikat **Sangat Baik**.
2. Sasaran strategis "*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Good Governace dan Clean Governmet*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **94,39%**, dengan predikat **Baik**.
3. Sasaran strategis "*Meningkatnya Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Budaya Aceh Yang Sejalan Dengan Nilai-Nilai Dinul Islam*", memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **124,90%**, dengan predikat **Sangat Baik**.

4. Sasaran strategis *"Meningkatnya Struktur Perekonomian Yang Mantap Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Wilayah Pada Semua Sektor dan Peningkatan Investasi"* memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **89,85%**, dengan predikat **Baik**.
5. Sasaran strategis *"Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAA)"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **110,85%**, dengan predikat **Sangat Baik**.
6. Sasaran strategis *"Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka Aceh dan Angka Kemiskinan Dengan Perbaikan Pendapatan dan Pemberdayaan Kemandirian Melalui Perluasan Lapangan Usaha"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **77,16%**, dengan predikat **Baik**.
7. Sasaran strategis *"Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Pendidikan Pada Tahun 2015"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **106,04%**, dengan predikat **Sangat Baik**.
8. Sasaran strategis *"Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Dayah, Pendidikan Vokasional dan Pendidikan Tinggi Dalam Memenuhi Kebutuhan Ketenagakerjaan"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **125,91%**, dengan predikat **Sangat Baik**.
9. Sasaran strategis *"Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Kesehatan 2015"*, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **102,92%**, dengan predikat **Sangat Baik**.
10. Sasaran strategis *"Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular"*,

memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **81,05%** dengan predikat **Baik**.

11. Sasaran strategis ” *Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur antara Wilayah dan Daerah Yang Seimbang dan Proporsional Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Dan Potensi Daerah*”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **95,79 %**, dengan predikat **Baik**.
12. Sasaran strategis ” *Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berkualitas*”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **100,35%**, dengan predikat **Sangat Baik**.
13. Sasaran strategis ” *Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Aceh*”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **69,88%** dengan predikat **Cukup**.
14. Sasaran strategis ” *Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan*”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **70,58%** dengan predikat **Cukup**.
15. Sasaran strategis ” *Meningkatnya Eksplorasi Sumberdaya Alam Secara Lestari dan Berkelanjutan*”, memperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **77,13%** dengan predikat **Baik**.

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, pencapaian kinerja Pemerintah Aceh tahun 2016 dapat dikategorikan **Baik** dengan nilai rata-rata sebesar **96,95%**. Rata-rata nilai capaian kinerja dimaksud dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran tahun 2016 sebesar **89,90%**, capaian realisasi rata-rata kinerja lebih besar **7,05%** dari

capaian realisasi anggaran. Hal ini membuktikan bahwa komitmen Pemerintah Aceh dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berbasis kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah serta merupakan salah satu Misi Pemerintah Aceh tahun 2012-2017 telah menunjukkan hasil yang signifikan.

Keberhasilan Pemerintah Aceh dalam pencapaian kinerja secara akumulatif, belum diikuti dengan tingkat pencapaian yang optimal pada setiap indikator kinerja. Hal ini disebabkan masih adanya hambatan/kendala dalam pencapaian beberapa indikator kinerja, antara lain ; penerapan Sistem Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis kinerja yang belum optimal, Sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang ikut mempengaruhi dalam pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan Aceh.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang amanah, akuntabel, dan berbasis kinerja, Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya perbaikan melalui optimalisasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja (Sistem AKIP), meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kompetensi Aparatur baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan , dan pelaporan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj)

Pemerintah Aceh Tahun 2016



Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Aceh yang merupakan gambaran pencapaian kinerja pada tahun 2016 dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh yang telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017.

**PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH ACEH
TAHUN 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Implementasi UUPA dalam Percepatan Pembangunan dan Menjaga Keberlanjutan Perdamaian.	1.1 Jumlah Qanun Aceh yang ditetapkan 1.2 Jumlah Peraturan Gubernur yang ditetapkan 1.3 Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	15 Qanun 75 Pergub 80 %	13 Qanun 147 Pergub 80 %	86,67 196,00 100,00
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> .	2.1 Perolehan Opini hasil pemeriksaan BPK * 2.2 Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh * 2.3 Peringkat LPPD Pemerintah Aceh * 2.4 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik : a. RSUZA b. RSIA c. RSJ d. BP2T 2.5 Persentase penurunan temuan kerugian daerah dibandingkan dengan anggaran yang diperiksa * 2.6 Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut pengawasan 2.7 Persentase informasi pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang terintegrasi pada website Pemerintah Aceh *	WTP 60,5 2,35 95 79,6 76,5 86 0,2 % 5 % 96 %	WTP 58,25 2,34 99,30 75,75 69,00 83,56 0,08 % 6,05 % 96 %	100,00 96,28 99,57 104,53 95,16 90,20 97,16 40,00 121,00 100,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Kehidupan Masyarakat yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Budaya Aceh yang Sejalan dengan Nilai-Nilai Dinul Islam.	3.1 Persentase Penurunan pelanggaran qanun syariat, dan gangguan trantibun	4 %	3 %	75,00
		3.2 Jumlah Fatwa, Himbauan, Seruan dan Taushiah yang ditetapkan	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00
		3.3 Jumlah sertifikasi produk halal *	30 Sertifikat	60 Sertifikat	200,00
		3.4 Jumlah Qari/Qariah, Hafidh/Hafidhah, Mufassir/Mufassirah yang berprestasi pada STQ dan MTQ Nasional/ Internasional	10 Orang	12 Orang	120,00
		3.5 Jumlah Dayah berakreditasi	471 Dayah	1.015 Dayah	215,50
		3.6 Jumlah Penerimaan Infaq/sadaqah	28,45 M	22,45 M	78,91
		3.7 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke aceh	30 %	25,46 %	84,87
4.	Meningkatnya Struktur Perekonomian yang Mantap Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Wilayah pada Semua Sektor dan Peningkatan Investasi.	4.1 Pertumbuhan PDRB	6,9 %	3,31 %	47,97
		4.2 Laju inflasi Aceh	5 %	3,86 %	122,80
		4.3 Ekspor non migas	100 Juta US\$	68,70 Juta US\$	68,70
		4.4 Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) *	3.041 T	4.973 T	163,53
		4.5 Rasio daya serap tenaga kerja	1:60	1:74 Rasio	46,25
5.	Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh (PAA).	5.1 Persentase kontribusi pajak aceh terhadap PAA	60 %	61,65 %	102,75
		5.2 Persentase peningkatan kontribusi zakat terhadap PAA	1,5 %	1,77 %	118,00
		5.3 Persentase kontribusi PAA terhadap APBA	15 %	16,77 %	111,80

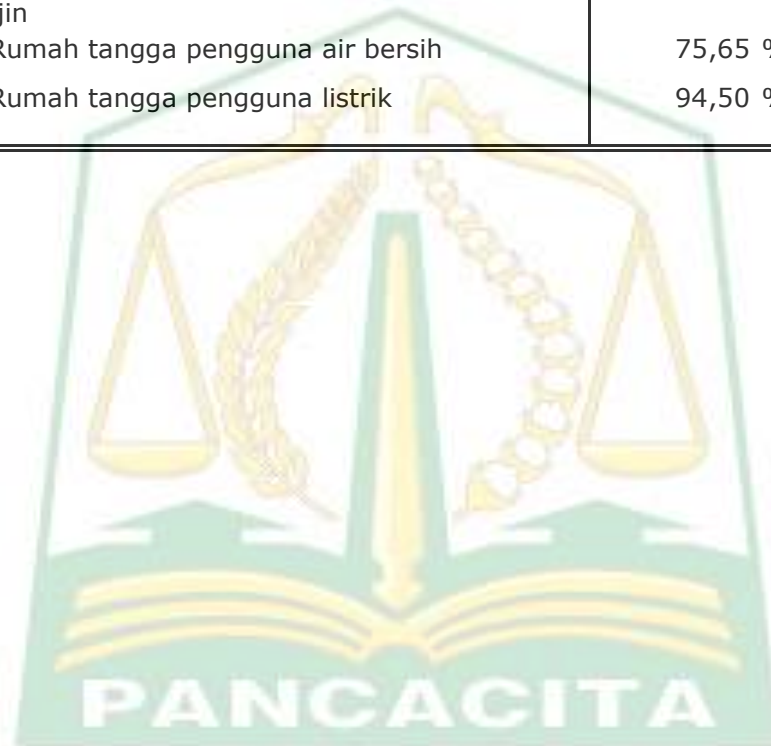
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka Aceh dan Angka Kemiskinan dengan Perbaikan Pendapatan dan Pemberdayaan Kemandirian melalui Perluasan Lapangan Usaha.	6.1 Persentase angka pengangguran terbuka *	6,8 %	7,57 %	88,68
		6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*	71,83 %	64,26 %	89,46
		6.3 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan*	11,5 %	16,43 %	57,13
		6.4 Persentase Penanganan PMKS *	60 %	36,69 %	61,15
		6.5 Persentase koperasi aktif *	57,79 %	67,33 %	116,51
		6.6 Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM	22,66 Triliun	11,34 Triliun	50,04
7.	Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Pendidikan pada tahun 2015.	7.1 Angka partisipasi murni :			
		a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,60 %	95,55 %	96,91
		b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	80,50 %	82,21 %	102,12
		c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA/ Paket C	74,50 %	67,22 %	90,23
		7.2 Angka pendidikan yang ditamatkan :			
		a. Tamat SD/ sederajat	21,00 %	20,85 %	99,29
		b. Tamat SMP/ sederajat	17,00 %	24,29 %	142,88
c. Tamat SMA/ sederajat	32,00 %	35,52 %	111,00		
7.3 Angka melek huruf usia 15-24 tahun	97,800 %	97,63 %	99,83		
8.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Dayah, Pendidikan Vokasional dan Pendidikan Tinggi dalam Memenuhi Kebutuhan Ketenagakerjaan.	8.1 Angka rata-rata lama sekolah	11,5 Tahun	13,37 Tahun	116,26
		8.2 Angka partisipasi kasar			
		a. SD/MI/Paket A	105,00 %	105,77 %	99,27
		b. SMP/MTS/Paket B	100,00 %	103,39 %	96,61
c. SMA/MA/Paket C	91,00 %	86,19 %	94,71		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		8.3 Angka Putus Sekolah a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs c. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	4 % 12 % 0,10 %	5,00 % 12,00 % 0,37 %	75,00 100,00 370,00
		8.4 Angka Kelulusan * a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs c. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	96 % 96 % 97 %	99,00 % 98,00 % 99,00 %	103,13 102,08 102,06
9.	Tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bidang Kesehatan pada Tahun 2015.	9.1 Umur harapan hidup 9.2 Angka kematian ibu melahirkan * 9.3 Angka kematian bayi * 9.4 Angka kematian anak balita * 9.5 Prevalensi gizi kurang dan buruk	71,60 Tahun 100 /100.000 12 /1000 LH 25 /1000 LH 14 %	69,9 Tahun 144 /100.000 10 /1000 LH 10 /1000 LH 16,20 %	97,63 56,00 116,67 160,00 84,29
10.	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular.	10.1 Angka kesuksesan pengobatan TB 10.2 Cakupan prevalensi penyakit kusta < 1 10.3 Cakupan kabupaten/kota yang memasuki tahap eliminasi malaria * 10.4 Jumlah penduduk yang mendapat pelayanan JKMA * 10.5 Prevalensi ODMK	93 % 1 /10.000 23 kab/kota 1,76 Juta Jiwa 2 %	86,00 % 0,99 /10.000 16 kab/kota 1,97 Juta Jiwa 2,60 %	92,47 101,00 69,57 111,93 30,30
11.	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Antara Wilayah dan Daerah yang Seimbang dan Proporsional Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Potensi Daerah.	11.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik * 11.2 Persentase Peningkatan Rasio Jaringan Irigasi * 11.3 Persentase penurunan lingkungan pemukiman kumuh 11.4 Persentase peningkatan arus penumpang angkutan umum/ tahun	61,52 % 69,74 % 4,5 % 50 %	61,15 % 72,67 % 4,57 % 39,00 %	99,40 104,20 101,56 78,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Meningkatnya Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkualitas.	12.1 Persentase penanganan sampah	70 %	70,00 %	100,00
		12.2 Pemantauan Pencemaran status mutu air mutu air	65 %	104,00 %	160,00
		12.3 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	540 Ha	642,01 Ha	118,89
		12.4 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal.	90 %	19,57 %	21,74
		12.5 Persentase kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana *	90 %	91 %	101,11
13.	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan Aceh.	13.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,9 Skor PPH	70,90 Skor	79,75
		13.2 Penanganan Desa Rawan Pangan*	200 Desa	50 Desa	25,00
		13.3 Nilai Tukar Nelayan	110,10 NTN	97,79 NTN	88,82
		13.4 Nilai Tukar Petani	115 %	98,85 %	85,96
14.	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.	14.1 Produksi Padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun : *			
		a. Padi	2.550.000 Ton	2.321.328 Ton	91,03
		b. Jagung	250.000 Ton	286.730 Ton	114,69
		c. Kedelai	70.000 Ton	23.506 Ton	33,58
		14.2 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura :			
		a. Bawang Merah	6.781 Ton	6.288,90 Ton	92,74
		b. Kentang	81.598 Ton	50.674,30 Ton	62,10
		c. Cabe Besar	52.012 Ton	41.031,30 Ton	78,89
		d. Cabe Rawit	54.124 Ton	41.595,10 Ton	76,85
		14.3 Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah :			
		a. Karet Kering	390.099 Ton	72.710,00 Ton	18,64
		b. Kelapa Sawit	1.021.603 Ton	505.844,00 Ton	49,51
		c. Kakao Biji Kering	209.425 Ton	43.912,00 Ton	20,97
14.4 Produksi Daging per tahun *	32.348.218 Kg	36.386.393 Kg	112,48		
14.5 Produksi telur pertahun	17.453.966 Kg	15.192.018 Kg	87,04		
14.6 Jumlah Produksi perikanan *	335.224 Ton	265.039,70 Ton	79,06		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Meningkatnya Eksplorasi Sumber Daya Alam secara Lestari dan Berkelanjutan.	15.1 Persentase penurunan pertambangan tanpa ijin 15.2 Rumah tangga pengguna air bersih 15.3 Rumah tangga pengguna listrik	24 % 75,65 % 94,50 %	4 % 74,09 % 109,21 %	17,88 97,94 115,57

* Indikator Kinerja Utama



GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH